

## LAMPIRAN

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 15 TAHUN

### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari dana APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana Pembangunan provinsi dan nasional. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana Pembangunan daerah dengan rencana Pembangunan nasional.

RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 ayat (1) menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- e. memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan

penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan RKPD memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan karena adanya asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena adanya asumsi makro yang berimbas kepada struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, disamping itu untuk menampung beberapa tambahan prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P) Tahun 2024, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042; dan
- t. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

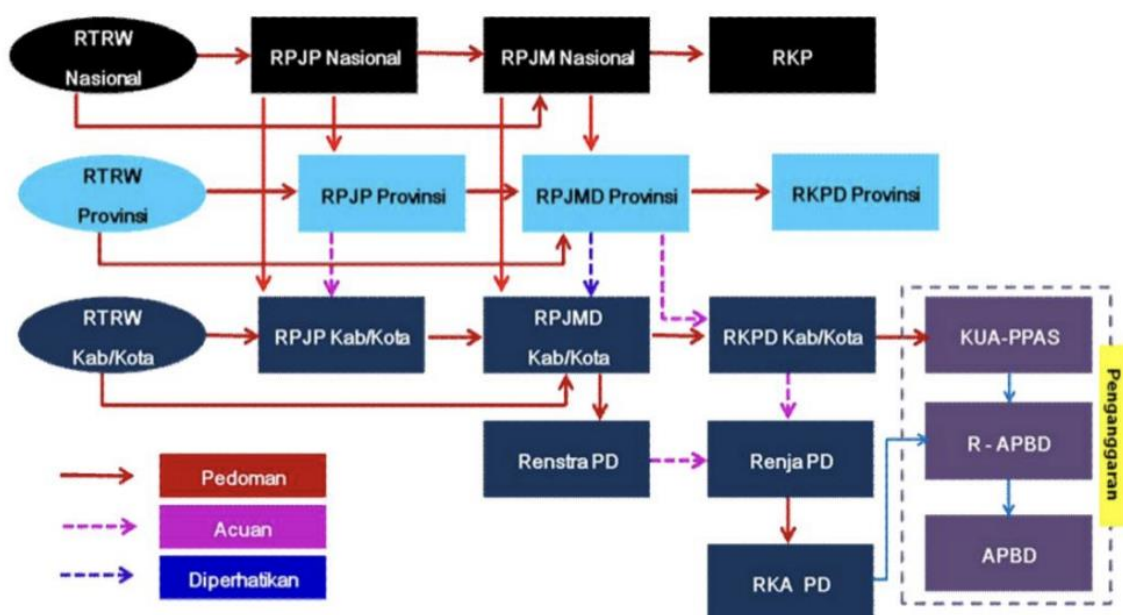
Adapun Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 untuk:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum (KUA) Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. menyesuaikan perubahan program/kegiatan; dan
- c. pemanfaatan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### 1.4 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem Pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang nanti menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja dan RKA serta DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan berikut:



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah**

#### 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

##### a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen Perubahan RKPD.

- b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2024  
Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 hingga Triwulan II
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah tahun lalu, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2024; arah kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Bab ini memuat sasaran Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Bab ini memuat kerangka pendanaan daerah dan rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan serta non urusan
- f. BAB VI PENUTUP

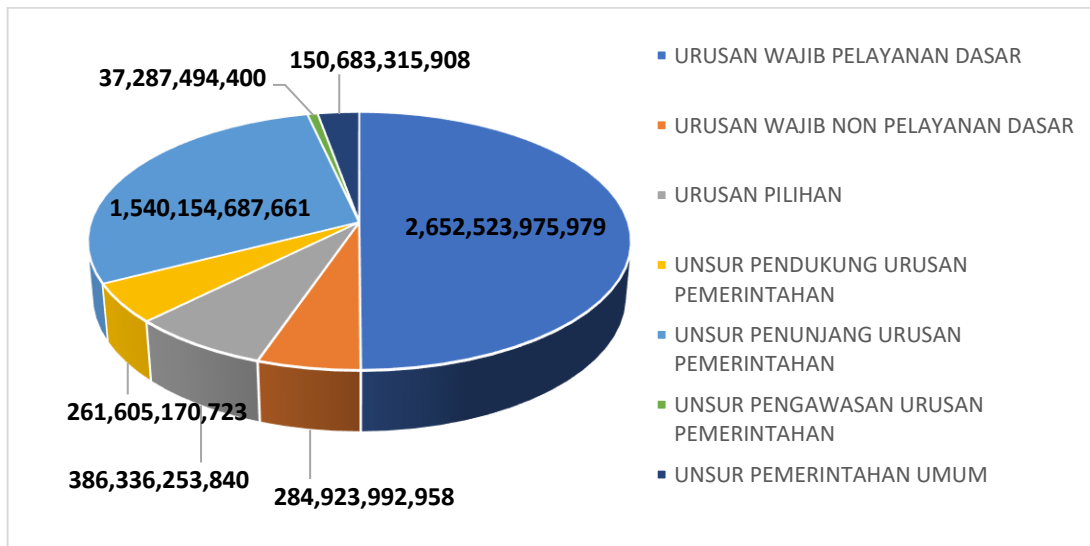
BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Jumlah /besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024. Sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah :

**Gambar 2.1**  
**Grafik Pagu Anggaran Tahun 2024**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Sumber : Data SIPD Tahun 2024 (di olah)



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu  
Per Urusan Pemerintahan Tahun 2024

Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	42	128	2.652.523.975.979
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	82	231	284.923.992.958
Urusan Pilihan	41	128	386.336.253.840
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	22	116	261.605.170.723
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	16	80	1.540.154.687.661
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3	12	37.287.494.400
Unsur Pemerintahan Umum	6	13	150.683.315.908

Sumber : Data SIPD Tahun 2024 (di olah)

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa dana yang dikelola untuk pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp. 2.652.523.975.979.- dengan jumlah program 42 dan 128 kegiatan, untuk pelaksanaan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar sebesar Rp. 284.923.992.958.- dengan jumlah program 82 dan 231 kegiatan. Urusan Pilihan sebesar Rp. 386.336.253.840.- dengan jumlah program 41 dan 128 kegiatan, untuk pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 261.605.170.723.- dengan jumlah program 22 dan 116 kegiatan, untuk pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 1.540.154.687.661.- dengan jumlah program 16 dan 80 kegiatan. untuk pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 37.287.494.400.- dengan jumlah program 3 dan 12 kegiatan, untuk pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp. 150.683.315.908.- dengan jumlah program 6 dan 134 kegiatan. Total keseluruhan 212 program, 708 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.313.514.891.462.-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPKD terdiri dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran berdasarkan laporan RKPD perangkat daerah Tahun 2024 sampai triwulan II sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
Rekapan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Belanja  
Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan	Prog	Keg.	Sub Keg	Pagu Anggaran	
1	2	3	4	5	6	
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	45	130	362	2.983.120.873.78 2	APBD
1	Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6	13	57	1.319.665.879.44 4	APBD
2	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	5	18	54	230.640.182.029	APBD
3	RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	2	6	13	196.949.904.068	APBD
4	RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah	1	5	5	113.576.800.000	APBD
5	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	4	15	50	422.995.634.831	APBD
6	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	8	15	41	463.527.723.301	APBD
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	7	16	36	103.528.040.931	APBD
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	3	12	42	16.629.262.654	APBD
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah					APBD
10	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah					APBD
II.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	82	231	598	355.377.362.028	APBD
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	9	24	63	50.469.782.668	APBD
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	7	22	58	17.633.323.902	APBD
13	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	4	12	36	33.063.666.448	APBD
14	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	11	21	50	13.639.699.180	APBD
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	5	14	27	12.474.810.645	APBD
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah					APBD
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	4	13	40	12.707.305.627	APBD
18	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	4	22	50	44.292.755.716	APBD
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	5	14	48	26.156.082.930	APBD
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	8	17	47	15.783.653.604	APBD
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	6	15	41	18.094.996.968	APBD
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	4	15	23	42.163.319.045	APBD
23	Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5	9	17	16.205.172.985	APBD
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	5	21	55	27.161.626.349	APBD
III	URUSAN PILIHAN	41	125	322	424.494.735.497	APBD
25	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	6	20	50	63.706.686.479	APBD
26	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	5	17	35	17.982.111.516	APBD
27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	5	15	59	144.829.056.357	APBD
28	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	6	16	33	90.108.918.135	APBD
29	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	5	17	38	62.544.133.914	APBD
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	5	20	51	22.450.386.253	APBD
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	9	20	56	22.873.442.843	APBD

IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	19	92	239	312.120.713.279	APBD
32	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	9	19	3.549.999.355	APBD
33	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1	9	37	76.020.287.393	APBD
34	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	9	17	4.600.000.000	APBD
35	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	9	15	8.199.999.947	APBD
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	10	23	4.500.000.000	APBD
37	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	6	11	2.770.559.860	APBD
38	Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	10	15	45.308.399.700	APBD
39	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	4	8	3.519.199.931	APBD
40	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	8	17	4.415.000.000	APBD
41	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	2	18	77	159.237.267.093	APBD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16	80	293	1.363.523.763.988	APBD
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3	15	82	47.055.134.278	APBD
43	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	9	32	87.123.151.447	APBD
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3	14	67	1.148.578.188.695	APBD
45	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	12	32	19.634.766.605	APBD
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	10	30	28.238.408.314	APBD
47	Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2	12	35	16.613.700.478	APBD
48	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	2	8	15	16.280.414.171	APBD
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	12	31	37.997.197.048	APBD
49	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3	12	31	37.997.197.048	APBD
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	13	52	111.790.539.544	APBD
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6	13	52	111.790.539.544	APBD
J U M L A H ( Sementara 30 OPD )		379	1236	3432	5.588.425.185.166	APBD

Sumber Data : Perangkat Daerah 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah sementara program sebanyak 379 kegiatan 1236 sub kegiatan 3432 dengan besaran pagu belanja sebesar Rp. 5.588.425.185.166,- yang di Kelola oleh 50 perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Berjalan

Aktivitas Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antara lain bertujuan untuk mengetahui konsistensi APBD Tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024, sehingga perlu diketahui perbandingan antara anggaran, program dan kegiatan, yang tercantum dalam RKPD dan yang tercantum dalam dokumen APBD.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II akan di sampaikan berdasarkan urusan yang dilaksanakan sebagaimana berikut :

2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

2.2.1.1 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Hasil Evaluasi terhadap capaian RKPD Dinas Pendidikan  
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	850.362.334.362	423.042.778.539	Indeks	186,72	51	27,31
Pengelolaan Pendidikan	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	468.108.325.132	113.160.751.084	%	68,35		0
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus	1.195.119.950	954.644.422	%	77,35		0
		1.319.665.779.444	537.158.174.045				

Sumber : Data RKPD Dinas Pendidikan Tahun 2024 (diolah)

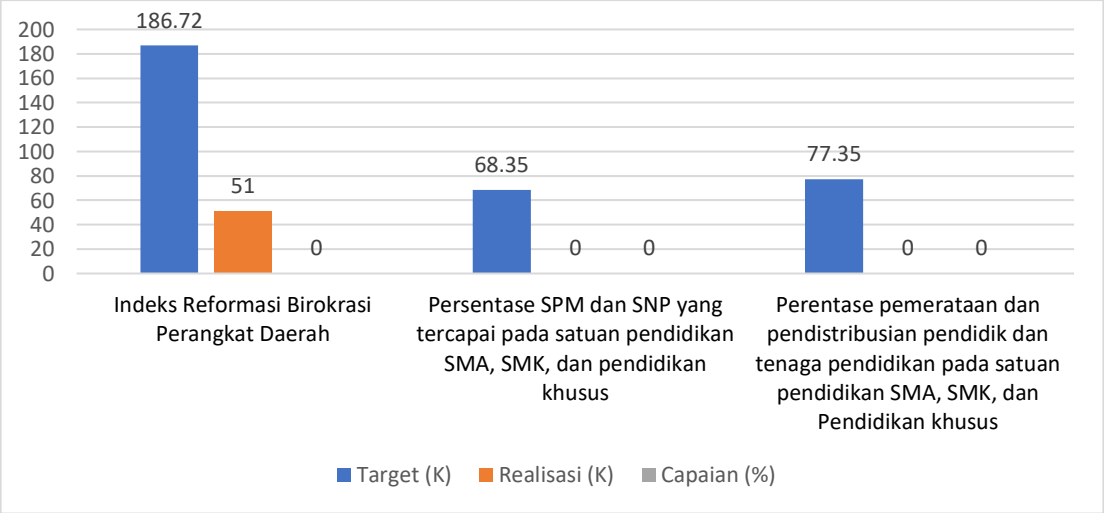
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 186,72 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 51, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 27,31 persen masih Sangat Rendah. Program Pengelolaan Pendidikan

dengan indikator kinerja Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus dengan target kinerja (K) 68,35 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja Perentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus dengan target kinerja (K) 77,35 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.2  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Pendidikan Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.2 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4  
Hasil Evaluasi terhadap capaian RKPD Dinas Kesehatan  
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Kesehatan dan Layanan Kesehatan Perorangan serta Kesehatan Masyarakat	53.381.898.842	12.320.914.992	%	100	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	559.998.700	0	%	100	0	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Pengawasan Sarana dan Prasarana Kefarmasian dan Obat Tradisional	2.810.021.625	80.151.150	%	100	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peran Serta Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	6.787.141.875	123.415.800	%	100	0	0
		62.979.062.342	12.524.481.942				0

Sumber : Data RKPD Dinas Kesehatan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Kesehatan dan Layanan Kesehatan Perorangan serta Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih Sangat Rendah.

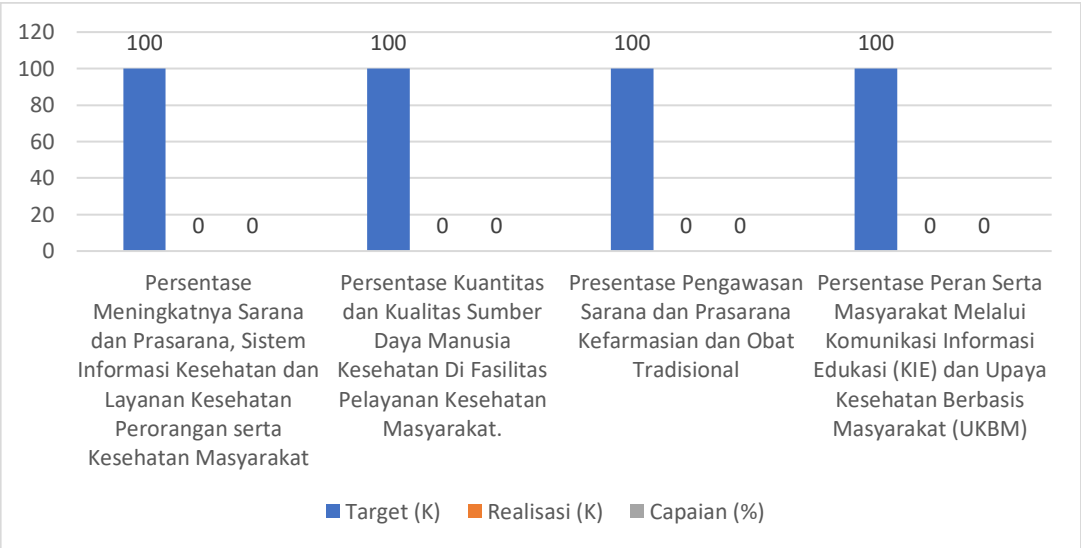
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan indikator kinerja Presentase Pengawasan Sarana dan Prasarana Kefarmasian dan Obat Tradisional dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II kategori masih Sangat Rendah sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.3  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Kesehatan Tahun 2024 (diolah)

2.1.1.3 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5  
Hasil Evaluasi terhadap capaian RKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	43.598.696.011	9.230.612.488	Indeks	64,00	66,89	104,52

Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	376.148.755.245	121.731.215.303	Persen	66,03	65,04	98,50
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik			Persen	36,69	29,16	79,48
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk			Rasio	0,53	0,52	98,11
	Persentasi Jumlah Ruas Jalan Provinsi Yang Telah Memiliki Sertifikat Uji Laik			Persen	65,15	57,5	88,26
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	1.612.829.450	167.391.916	Persen	45,32%	38,52	8499,98
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentasi Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang	1.635.354.125	100.444.316	Persen	30,00	0	0,00
	Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang			Persen	70,14	42,5	60,59
	Persentase Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang			Persen	40	0	0,00
		<b>422.995.634.831</b>	<b>131.229.664.023</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 64,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 66,89, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 104,52 kategori Sangat Tinggi.

Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan Jalan Provinsi dengan target kinerja (K) 66,03 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 65,04 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 98,50 Sangat Tinggi. indikator kinerja Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja (K) 36,69 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 29,16 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 79,48 kategori Sedang, indikator kinerja Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk dengan target kinerja (K) 0,53 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,52 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 98,11 persen kategori



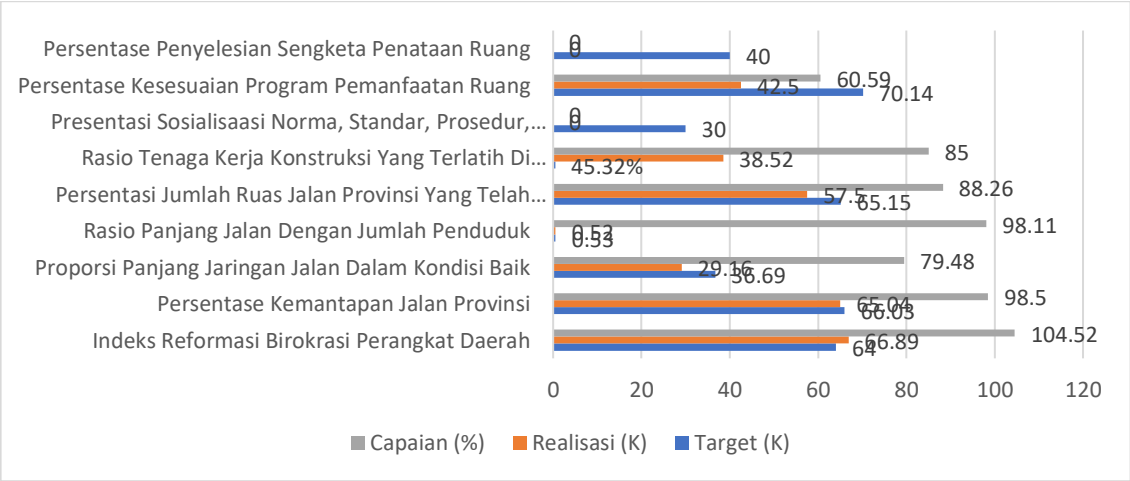
Sangat Tinggi, indikator kinerja Persentasi Jumlah Ruas Jalan Provinsi Yang Telah Memiliki Sertifikat Uji Laik dengan target kinerja (K) 65,15 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 57,5 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 88,26 persen kategori Tinggi.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli dengan target kinerja (K) 45,32 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 38,52 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 85,00 persen kategori Tinggi.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Presentasi Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang dengan target kinerja (K) 30,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen kategori masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dengan target kinerja (K) 70,14 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 42,5 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 60,59 persen kategori Sedang, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dengan target kinerja (K) 40 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen kategori masih Sangat Rendah,

Secara keseluruhan capaian target Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Gambar 2.4  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.4 Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	989.643.850	98.454.695	Nilai Sakip	76,00	80,00	105,26
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Customer/Stakeholder)	7.694.292.197	2.850.847.716	IKM	79,00	85,00	107,59
	Persentase Realisasi Anggaran	23.941.402.714	14.279.016.309	Persentase	98,68	89,32	90,51
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	45.181.225.820	1.038.277.900	Persentase	35,12	0,81	2,30
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir	21.592.966.951	101.525.000	Persentase	25,14	0,12	0,47
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Provinsi	23.216.520.793	64.530.000	Persentase	13,91	0,04	0,28
	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Baku Di WS Kewenangan Provinsi	644.360.600	-	Persentase	4,99	0,00	0,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase (%) Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota.	9.264.069.050	42.266.800	Persentase	45,42	0,21	0,46
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	-	-	-	15,53	0,00	0,00

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah	-	-		0,23	0,00	0,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Oleh Spal Regional	3.194.153.400	68.513.649	Perse n	17,05	0,37	2,14
	Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	184.923.567	73.230.550	Perse n	0,09	0,04	39,60
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Daerah Genangan Yang Tertangani	3.000.000.000	60.898.875	Perse n	4,07	0,08	2,03
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Provinsi)	6.451.876.075	60.898.875	Perse n	0,05	0,00	0,94
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penanganan Infrastruktur Di Kawasan Strategis Permukiman	26.891.597.250	16.605.206.000	Perse n	0,24	0,15	61,75
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Strategis Provinsi Yang Dilakukan Penataan	160.065.923.400	201.812.673	Perse n	0,27	0,00	0,13
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Strategis Provinsi Serta Penataan Lingkungan Di KSP	2.989.143.575	68.043.218	Perse n	0,2	0,12	61,67
		<b>335.302.099.242</b>	<b>35.613.522.260</b>				<b>27,95</b>

Sumber : Data RKPD Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air dengan target kinerja (K) 76,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 80,00, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 105,26 kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan capaian target Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (Customer/Stakeholder) dengan target kinerja (K) 79,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 85,00, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 107,59 kategori Sangat Tinggi, indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran dengan target kinerja (K) 98,68 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi

sebesar 89,32 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 90,51 persen kategori Sangat Tinggi.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi dengan target kinerja (K) 35,12 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,81 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 2,30 persen kategori masih Sangat Rendah, indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendali Banjir dengan target kinerja (K) 25,14 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,12 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0,47 persen kategori masih Sangat Rendah. Indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Provinsi dengan target kinerja (K) 13,91 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,04 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0,28 persen kategori masih Sangat Rendah, indikator kinerja Presentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Baku Di WS Kewenangan Provinsi dengan target kinerja (K) 4,99 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen kategori masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja Persentase (%) Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota dengan target kinerja (K) 45,42 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,21 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0,46 persen kategori masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase Penduduk Berakses Air Minum dengan target kinerja (K) 15,53 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen kategori masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator kinerja Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah dengan target kinerja (K) 0,23 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan

tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator kinerja Rasio Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Oleh Spal Regional dengan target kinerja (K) 17,05 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,37 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 2,14 persen masih Sangat Rendah, indikator kinerja Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi dengan target kinerja (K) 0,09 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,04 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 39,60 persen masih Sangat Rendah. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja Persentase Luas Daerah Genangan Yang Tertangani dengan target kinerja (K) 4,07 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,08 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 2,03 persen kategori masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Provinsi) dengan target kinerja (K) 0,05 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen kategori masih Sangat Rendah.

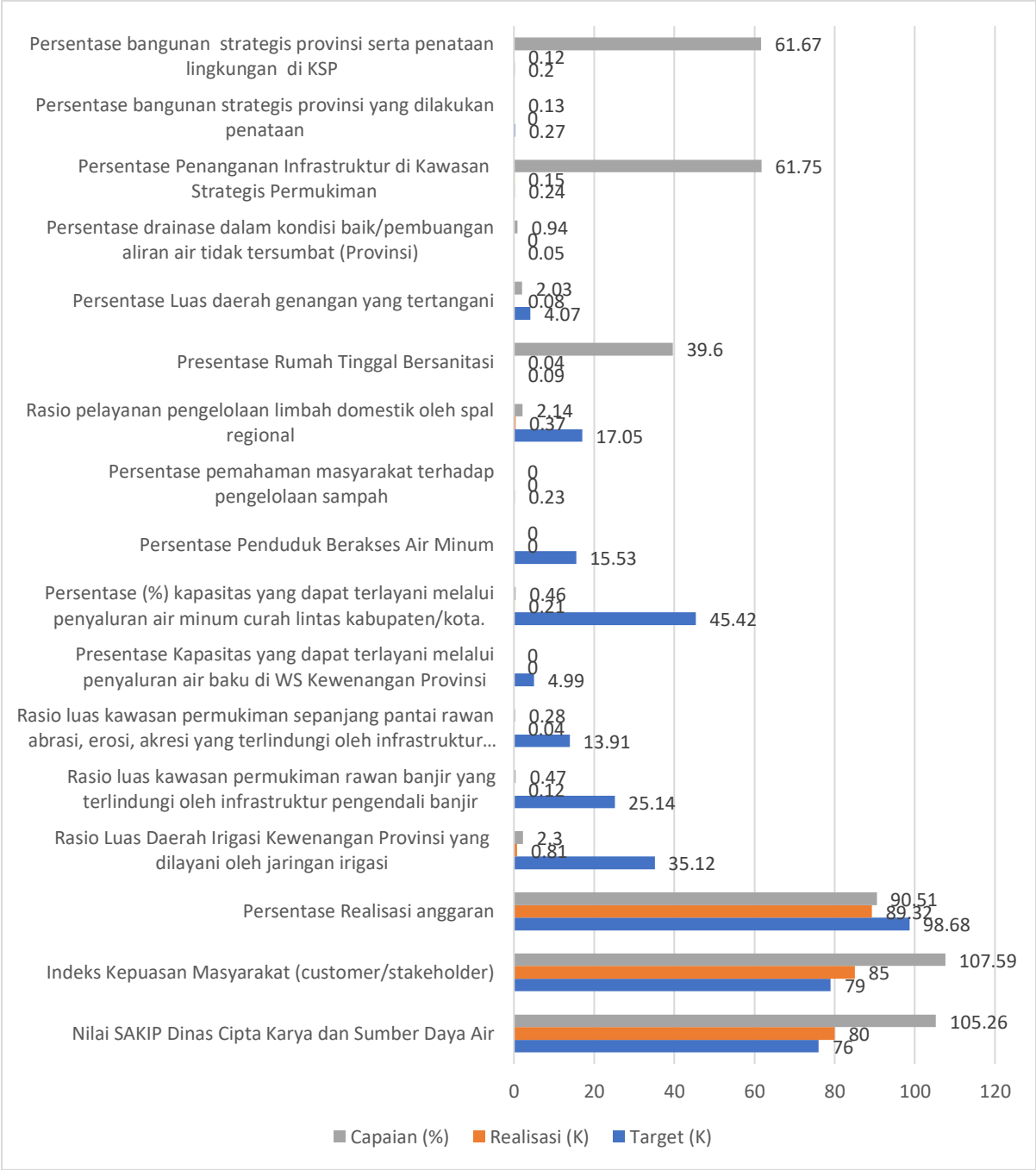
Program Pengembangan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Infrastruktur Di Kawasan Strategis Permukiman dengan target kinerja (K) 0,24 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,15 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 61,75 persen kategori masih Sangat Rendah. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Provinsi Yang Dilakukan Penataan dengan target kinerja (K) 0,27 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0,13 persen kategori masih Sangat Rendah.

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan indikator kinerja Persentase Bangunan Strategis Provinsi Serta Penataan Lingkungan Di KSP dengan target kinerja (K) 0,2 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,12 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 61,67 persen masih Sangat Rendah.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan triwulan II Target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air rata-rata target kinerja yang tercapai sebesar 27,95 persen dengan kategori capaian masih Sangat Rendah sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.5

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	terlaksanya administrasi perkantoran yang baik	15.276.066.862	4.892.356.202	%	100,00	32,03	32,03
Program Pengembangan Perumahan	persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	9.309.333.216	217.791.689	%	69,54	0	0,00
Program Kawasan Permukiman	persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	31.637.269.946	8.735.182.060	%	10,55	0	0,00
Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum	persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	46.936.152.807	6.148.582.840	%	13,78	0	0,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persentase penyelesaian sengketa tanah	117.043.200	27.500.650	%	25,53	0	0,00
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	148.870.200	35.118.665	%	76,64	0	0,00
Program Penatagunaan Tanah	persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	68.304.700	16.290.000	%	76,64	0	0,00
		103.493.040.931	20.072.822.106				

Sumber : Data RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Dan Dukungan Teknis BPBD Prov Sulteng	14.038.670.067	3.103.810.495	%	100,00	0	0
Program Penanggulangan Bencana	Tercapainya Penanganan Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah	57.651.642.690	46.643.143.783	Kab/Kota	0,00	0	0
		<b>71.690.312.757</b>	<b>49.746.954.278</b>				

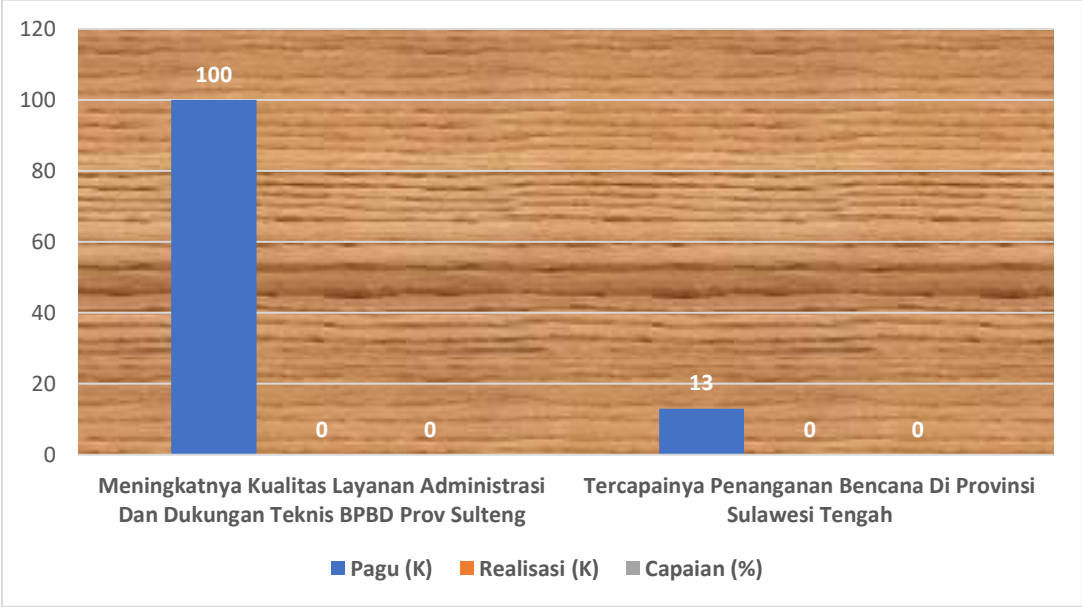
Sumber : Data RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Dan Dukungan Teknis BPBD Prov Sulteng dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 10,35 persen dan masih dalam kategori sangat rendah.

Program Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Tercapainya Penanganan Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah dengan target kinerja (K) 0 Kabupaten sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut ialah 0 persen dan termasuk kategori sangat rendah. Secara keseluruhan capaian target Badan Penanggulanagan Bencana Daerah sampai dengan triwulan II ialah 5,18 persen dengan kategori masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.



Gambar 2.6  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Badan Penggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.7 Dinas Sosial

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9  
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Biroksasi Perangkat Daerah	22.121.244.591	6.721.404.249	Indeks	68,50	0	0
Pemberdayaan Sosial	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	596.810.000	125.689.000	%	10,00	5	50
	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial			%	7,00	0	0
	Persentase SDM Kesos yang Profesional			%	18,00	0	0
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	10.000.000	-	%	16,00	0	0

Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3.239.685.170	1.191.848.200	%	17,00	0	0
	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		25.150.000	%	15,00	0	0
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.914.283.045	9.573.634.930	%	49,00	0	0
	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		-	%	85,00	0	0
Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	362.912.830	64.381.600	%	21,00	0	0
	Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan			%	30,00	0	0
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	126.990.000	18.200.000	%	21,00	0	0
		<b>40.371.925.636</b>	<b>17.720.307.979</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Sosial Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Biroksasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 68,50 Indeks sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut ialah 0 persen dan termasuk kategori Sangat Rendah.

Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan dengan target kinerja (K) 10 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 5 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 50 persen yang berarti masih dalam kategori Sangat

Rendah, indikator program Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial dengan target kinerja (K) 7 Persen mempunyai realisasi sampai dengan triwulan II ialah 0 persen dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen yang berarti masih dalam kategori Sangat Rendah, indikator program Persentase SDM Kesos yang Profesional dengan target kinerja (K) 18 Persen mempunyai realisasi sampai dengan triwulan II ialah 0 persen dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen yang berarti masih dalam kategori Sangat Rendah. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan indikator kinerja Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani dengan target kinerja (K) 16 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen dan masih dalam kategori Sangat Rendah.

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan target kinerja (K) 17 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 persen dengan kategori masih Sangat Rendah, indikator selanjutnya ialah Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dengan target kinerja (K) 15 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen dan termasuk kategori masih Sangat Rendah.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target kinerja (K) 49 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen dan termasuk kategori masih Sangat Rendah. Indikator selanjutnya ialah Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dengan target kinerja (K) 85 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut ialah 0 persen dan termasuk kategori kinerja masih Sangat Rendah.

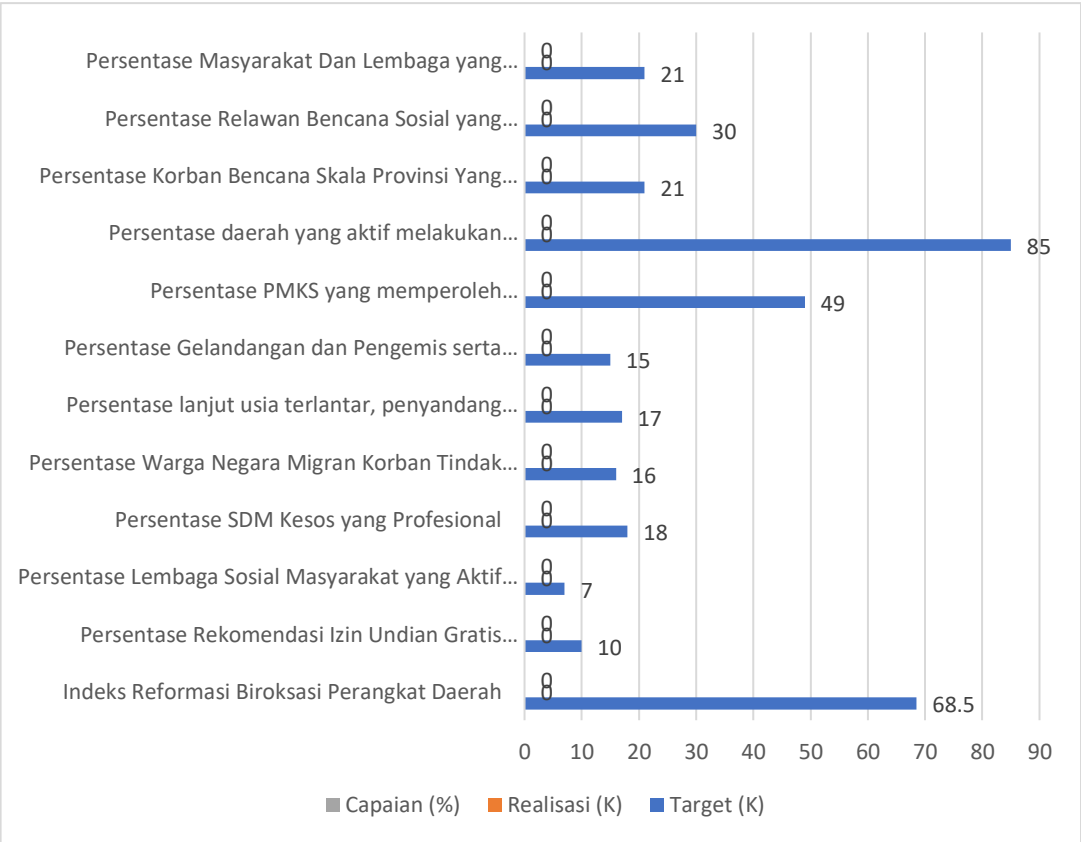
Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial dengan target kinerja (K) 21 Persen sampai dengan

triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 persen dengan kategori kinerja Sangat Rendah. Indikator selanjutnya ialah Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukakan pelayanan psikosial dan penanganan kelompok rentan dengan target kinerja (K) 30 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 persen dengan kategori kinerja Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dengan target kinerja (K) 21 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 perseb dan termasuk kategori kinerja Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Sosial sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.7  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Sosial Tahun 2024 (diolah)

2.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan

desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pada Tahun 2024 sebagaimana berikut.

2.2.2.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10  
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Sulawesi Tengah Sampai Dengan Triwulan II  
Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	34.279.347.249	8.013.620.359	%	80,00	19,00	23,75
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	70.000.000	-	%	100,00	0,00	0,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	1.469.454.124	110.874.230	%	70,00	6,00	8,57
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya	10.735.535.565	210.305.750	%	100,00	24,00	24,00
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)	1.096.927.850	219.800.350	%	79,00	16,00	20,25
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	1.324.259.810	243.968.900	%	68,00	15,00	22,06
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi							
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Yang Tersusun	902.667.475	164.766.000	%	75,00	20,00	26,67
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman / Kawasan Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya	2.440.801.799	150.766.000	%	75,00	4,00	5,33

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi	729.410.250	158.712.870	%	75,00	10,00	13,33
		<b>53.048.404.122</b>	<b>9.272.814.459</b>				<b>16,00</b>

*Sumber : Data RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 80 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 19 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 23,75 persen dan mempunyai kategori masih Sangat Rendah.

Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 Persen dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi dengan target kinerja (K) 70 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 6 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 8,57 Persen dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah.

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya dengan target kinerja (K) 100 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 24 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 24 Persen dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah.

Program Hubungan Industrial dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) dengan target kinerja (K) 79 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 16 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 20,25 Persen dan Kategori masih Sangat Rendah.

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator kinerja Persentase jumlah perusahaan yang diawasi dengan target kinerja (K) 68 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 15

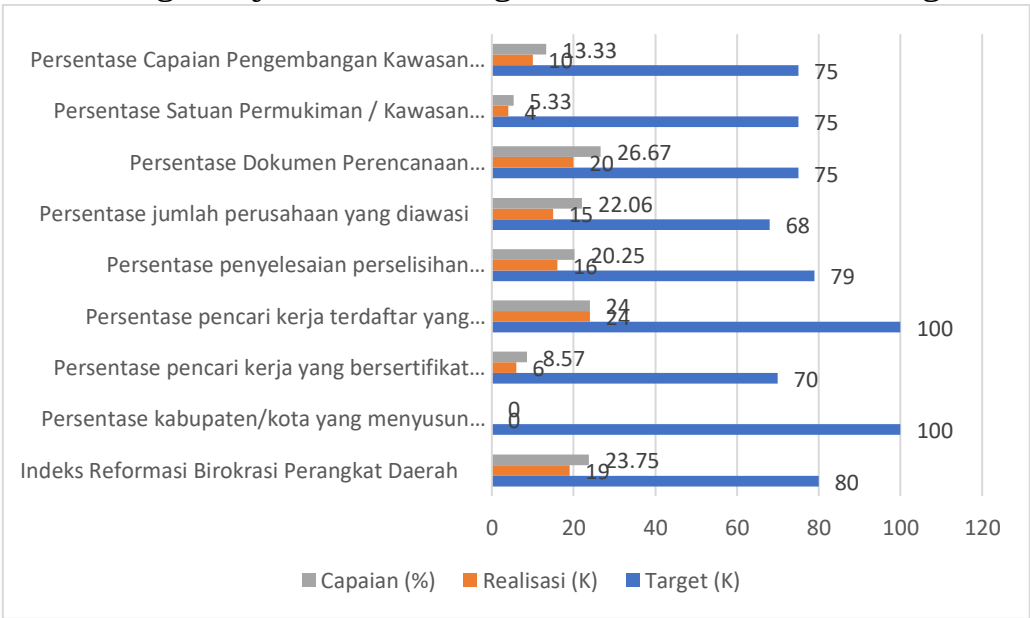
persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 22,05 dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah.

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Yang Tersusun dengan target kinerja (K) 75 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 20 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 26,67 Persen dan masih dalam Kategori masih Sangat Rendah.

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase Satuan Permukiman / Kawasan Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunannya dengan target kinerja (K) 75 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 4 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 5,33 Persen dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target kinerja (K) 75 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 10 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 13,33 Persen dan termasuk Kategori masih Sangat Rendah. Secara keseluruhan rata-rata capaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Gambar 2.8  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.2 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Pangan  
Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	5.336.004.181	68.234.000	Kab/Kota			
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	9.265.024.585	398.732.200	Skor			
	Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton			%			
	Presentase Ketersediaan Pangan Utama			%			
	Energi Perkapita/hari			kkal/kap/hari			
	Protein Perkapita/hari			kkal/kap/hari			
Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	4.539.839.799	27.599.000				
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	13.922.797.883	4.413.976.548				
	Jumlah Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD						
	Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi		3.878.839.957				
		33.063.666.448	8.787.381.705				

Sumber : Data RKPD Dinas Pangan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut



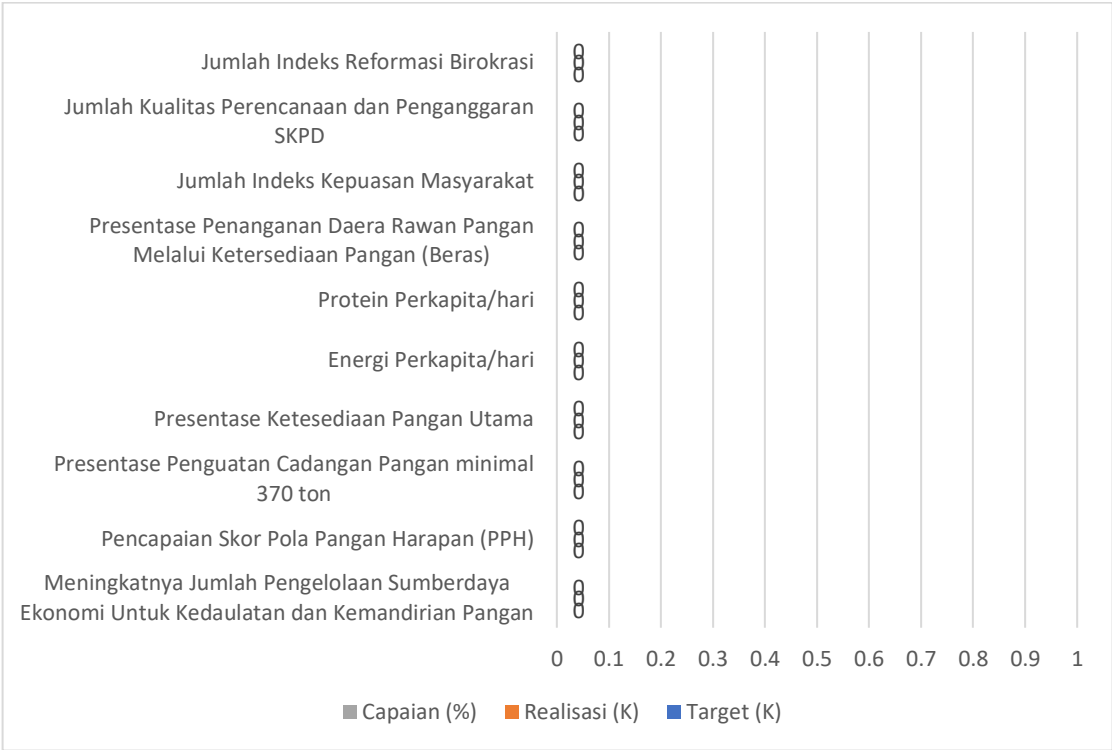
masih sangat rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Pangan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator Presentase Ketersediaan Pangan Utama dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator Energi Perkapita/hari dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator Protein Perkapita/hari target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator kinerja Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras) dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator kinerja Jumlah Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Indikator kinerja Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Secara keseluruhan rata-rata capaian Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah, sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.9  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12.947.150.967	1.675.210.031	Indeks	-	-	-
Penataan Desa	presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2.820.522.580	7.240.000	%	3,257	-	-
Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	345.000.050	57.314.980	%	0,380	-	-
Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	2.484.320.537	235.623.637	%	10,858	-	-

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6.934.171.827	32.991.960	%	1,810	-	-
		<b>25.531.165.961</b>	<b>2.008.380.608</b>				

Sumber : Data RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Penataan Desa dengan indikator kinerja presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar dengan target kinerja (K) 3,257 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 persen dan termasuk kategori Sangat Rendah.

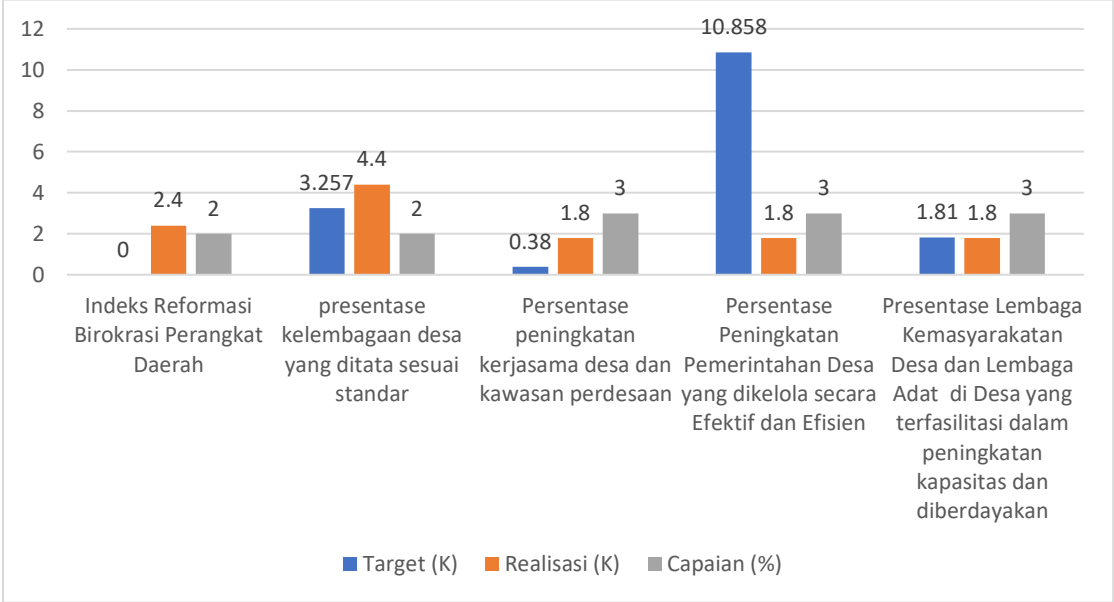
Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan dengan target kinerja (K) 0,380 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 Persen dan termasuk kategori Sangat Rendah.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien dengan target kinerja (K) 10,858 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih 0 Persen dan termasuk kategori kinerja Sangat Rendah.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dengan indikator kinerja Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dengan target kinerja (K) 1,810 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut 0 persen dan termasuk dalam kategori kinerja masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah, Sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.10  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12.565.290.346	5.364.126.221	Indeks	64,00	0	0
Pengendalian Penduduk	Presentase Capaian Pengendalian Penduduk	48.580.619	171.683.524	%	100,00	0	0
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )	680.000.000	237.855.808	%	100,00	0	0
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.195.042.500	283.030.900	%	100,00	0	0
		14.488.913.465	6.056.696.453				

Sumber : Data RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 64,00

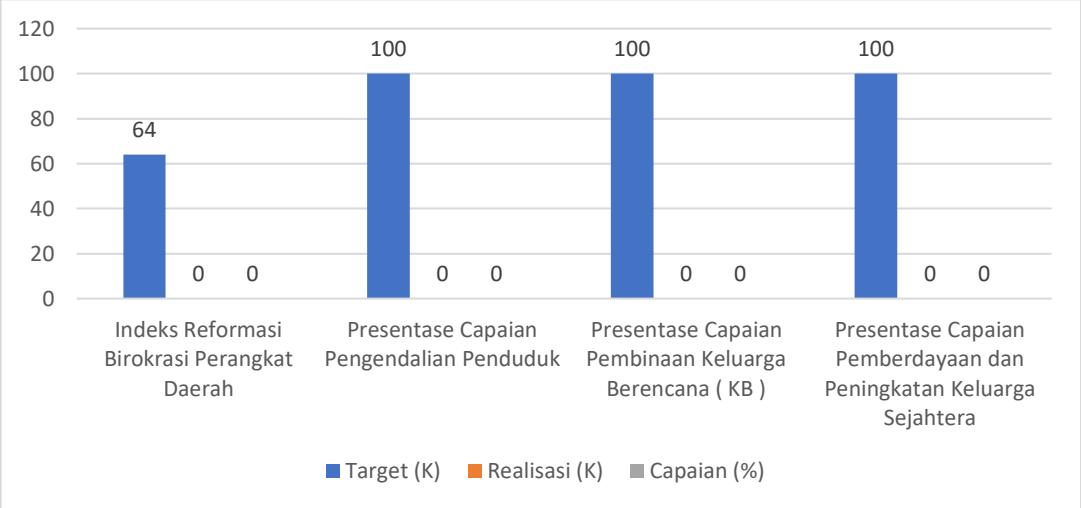
sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja Presentase Capaian Pengendalian Penduduk dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator kinerja Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana ( KB ) dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator kinerja Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.11  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Tahun 2024 (diolah)

#### 2.2.2.5 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14  
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi  
Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	15.340.516.651	5.988.222.932	Indeks	100,00	39,04	39,04
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Presentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.829.257.150	592.767.578	%	70,00	13,19	18,85
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Yang Dikelola	25.107.982.015	107.819.260	%	100	0,43	0,43
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Pengelolaan Perkeretaapian	14.999.000	-	%	100		
		<b>44.292.754.816</b>	<b>6.688.809.770</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan target kinerja (K) 100 Indeks sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 39,04 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 39,04 persen dan termasuk kategori masih Sangat Rendah.

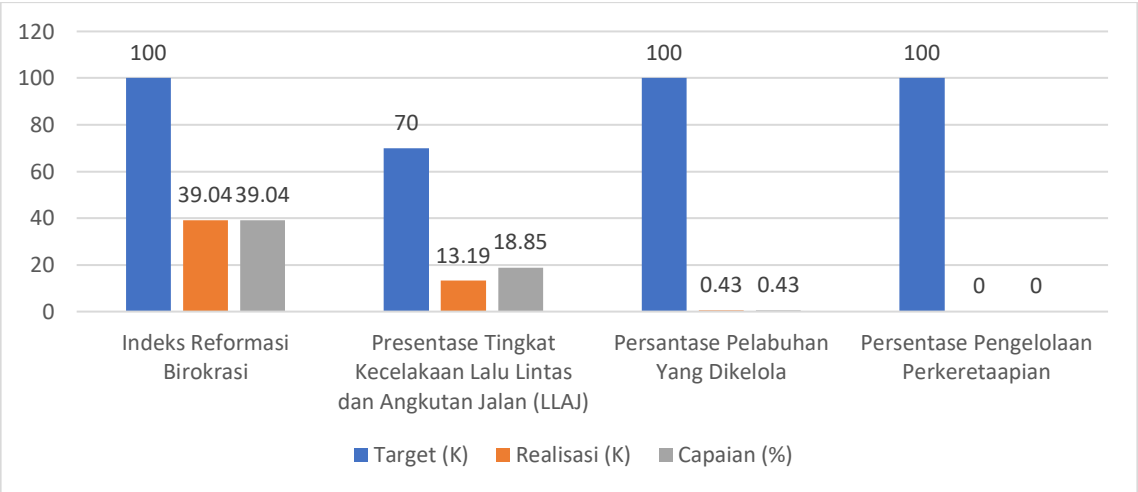
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) dengan indikator kinerja Presentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja (K) 70 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 13,19 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 18,85 persen dan termasuk kategori masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator kinerja Persentase Pelabuhan Yang Dikelola dengan target kinerja (K) 100 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,43 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0,43 persen dan termasuk kategori Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Perkeretaapian dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0. persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 0 persen dan termasuk kategori masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Gambar 2.12  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.6 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	13.270.260.964	10.729.481.322	Indeks	66,00	0,00	0,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan	5.196.557.700	3.244.536.168	%	80,00	23,00	28,75
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			%	0,013	0,00	0,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	5.240.303.750	2.365.812.922	%	100	100,00	100,00

	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			%	100	100	100,00
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan			%	30	46,67	155,56
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral	681.310.900	127.145.720	%	20	0	0,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	600.413.900	106.180.380	%	60	0	0,00
		<b>24.988.847.214</b>	<b>16.573.156.512</b>				

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 66,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan dengan target kinerja (K) 80,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 23,00 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan target kinerja (K) 0,013 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Tinggi, indikator kinerja Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat

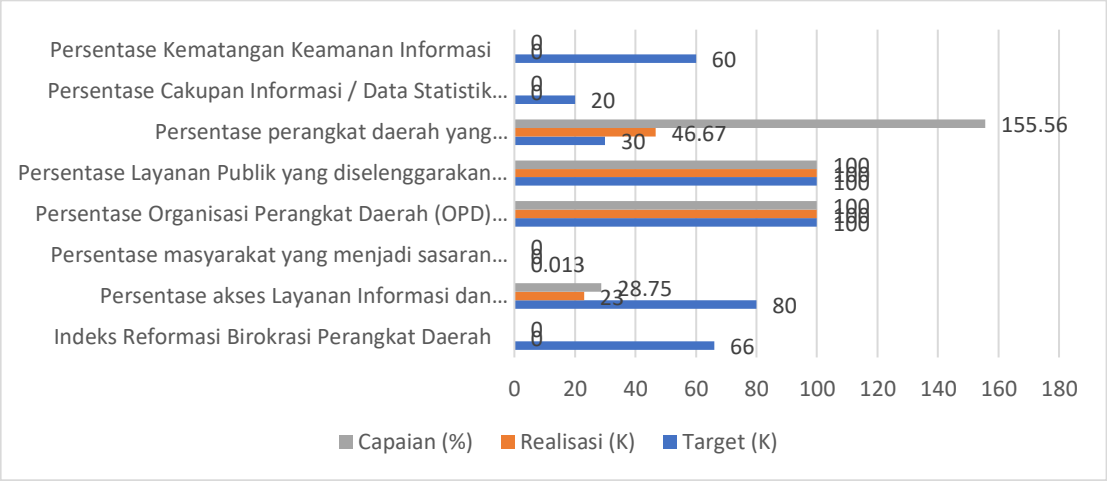


Tinggi, indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dengan target kinerja (K) 30 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 46,67 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Tinggi.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral dengan target kinerja (K) 20 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja Persentase Kematangan Keamanan Informasi dengan target kinerja (K) 60 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Gambar 2.13  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi DPMPTSP	14.334.351.848	2.904.312.642	Nilai	66,00		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insetif investor	675.100.150	54.454.642	%	92,00%		
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya	601.522.535	19.856.050	%	76,00%		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target Pemerintah Pusat	1.405.925.500	29.880.000	%	100,00%		
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data penanaman modal dan perizinana - non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem informasi penanaman modal	267.973.220	28.567.542	%	92,00%		
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan indeks kepuasan masyarakat	810.123.715	54.945.000	%	95,00%		
		18.094.996.968	3.092.015.876				

Sumber : Data RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi DPMPTSP dengan target kinerja (K) 66,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insetif investor dengan target kinerja (K) 92,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

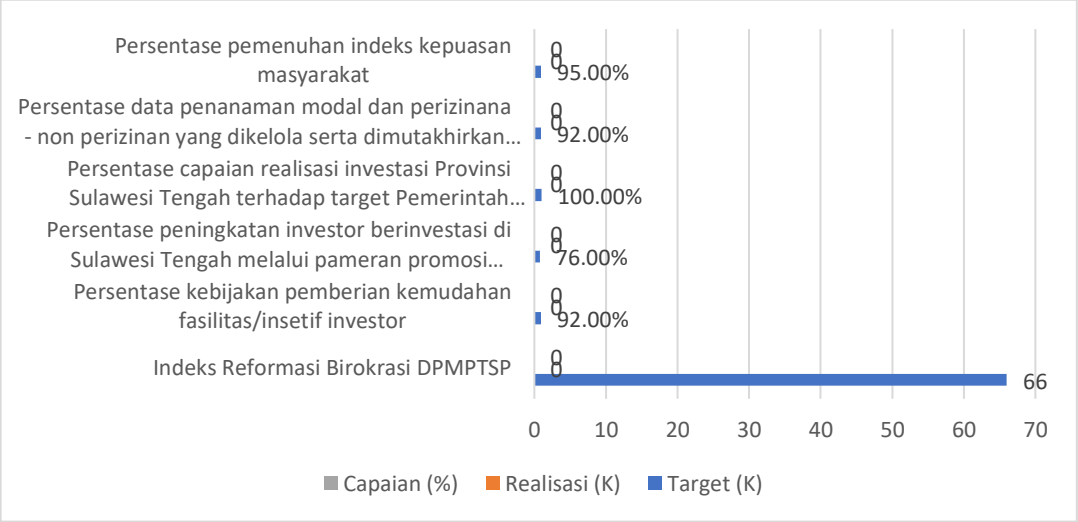
Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya dengan target kinerja (K) 76,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target Pemerintah Pusat dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase data penanaman modal dan perizinana - non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem informasi penanaman modal dengan target kinerja (K) 92,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan indeks kepuasan masyarakat dengan target kinerja (K) 95,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.14  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.8 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12.885.179.881	2.294.425.305	persen	66,00		0
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.146.140.628	-	Persen	1,69		0
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda)			-			
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri			-			
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	27.861.998.536	32.000.000	Orang	15		0
	Jumlah Atlet Berprestasi			Orang	12		0
	Gelanggan/ balai remaja (selain milik swasta)			Gelanggan	20		0
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	270.000.000	0	Persen	100		0
		42.163.319.045	2.326.425.305				

Sumber : Data RKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 66,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan target kinerja (K) 1,69 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) dengan target kinerja (K)

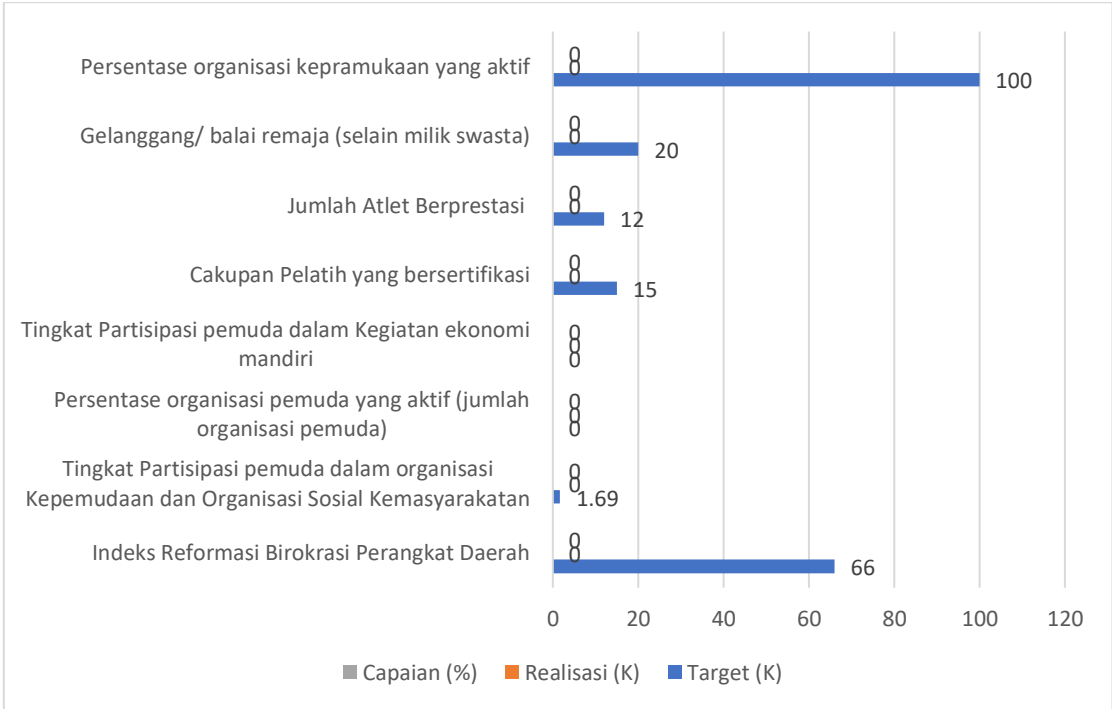
0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan indikator kinerja Cakupan Pelatih yang bersertifikasi dengan target kinerja (K) 15 orang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi dengan target kinerja (K) 12 orang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dengan target kinerja (K) 20 gelanggang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator kinerja Persentase organisasi kepramukaan yang aktif dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.15  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.9 Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Kebudayaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18  
Rekapitulasi Capaian Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.150.477.966	875.613.000	%			27,67%
Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tenaga dan Lembaga budaya Yang Dikembangkan , Persentase Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan	2.566.554.269	-	%			0
Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengelolaan Kesenian Tradisional	143.619.250	-	%			0
Pembinaan Sejarah	Persentase Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah	217.950.000	-	%			0
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya	Persentase pelestarian Cagar Budaya	1.126.571.500	-	%			0
		16.205.172.985	875.613.000				5,53%

Sumber : Data RKPD Dinas Kebudayaan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Kebudayaan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator kinerja Persentase Tenaga dan Lembaga budaya Yang Dikembangkan, Persentase Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

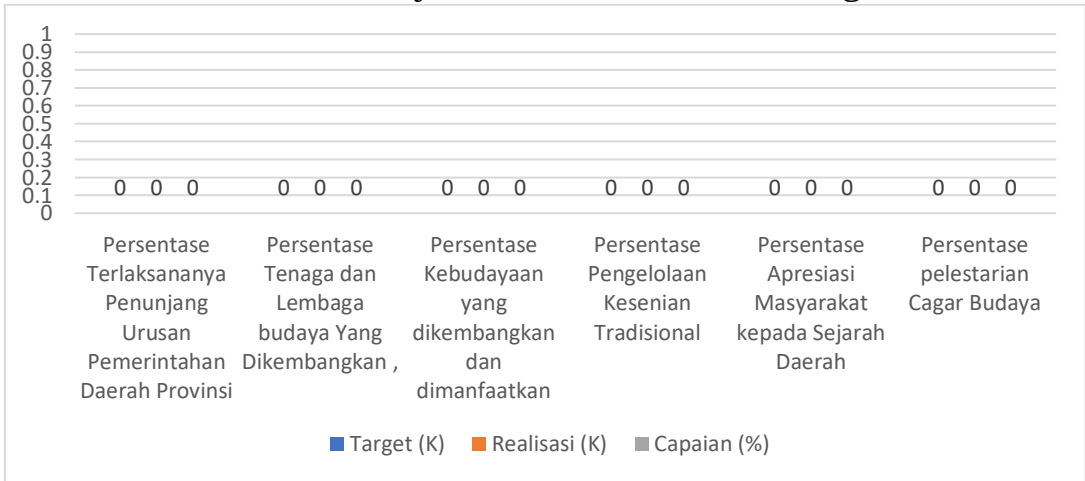
Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Kesenian Tradisional dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pembinaan Sejarah dengan indikator kinerja Persentase Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya dengan indikator kinerja Persentase pelestarian Cagar Budaya dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan triwulan II Target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan belum ada target kinerja yang tercapai. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.16  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 (diolah)

2.2.2.10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.19  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II  
Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
<b>Perpustakaan</b>							
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.150.477.966	875.613.000	Indeks	100,00 %	19,15	
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1.428.759.988	322.201.525	%	65,00%		
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	454.249.780	18.219.850	Indeks	13		
<b>Kearsipan</b>							
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik”	799.483.100	135.846.300	%	1		
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	150.656.748	18.470.000	%	30,00%		
		<b>14.983.627.582</b>	<b>1.370.350.675</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk Urusan Perpustakaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 19,15 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dengan target kinerja (K) 65 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target kinerja (K) 13 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.



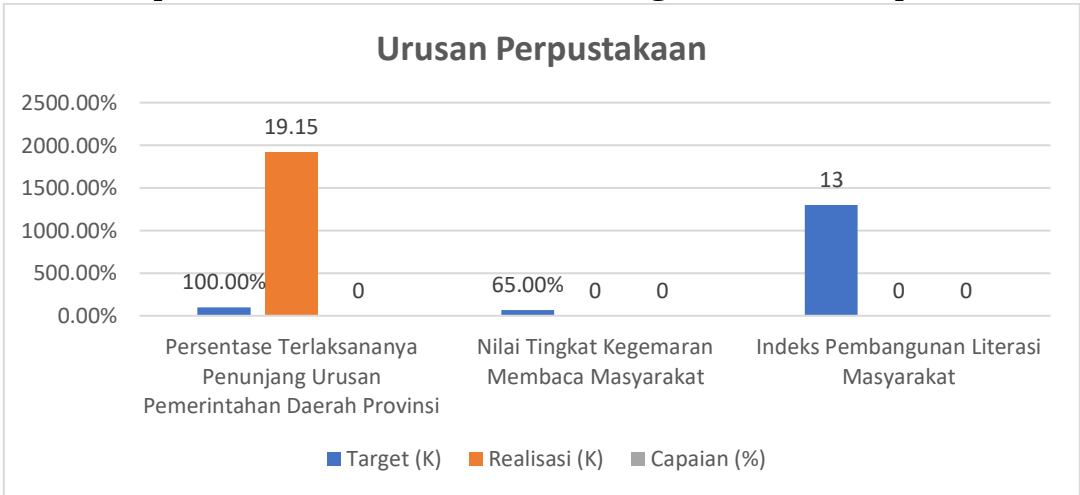
Untuk Urusan Kearsipan program Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” dengan target kinerja (K) 1 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan indikator kinerja Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi dengan target kinerja (K) 30,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Untuk urusan perpustakaan capaian kinerja sebagaimana Grafik di bawah ini.

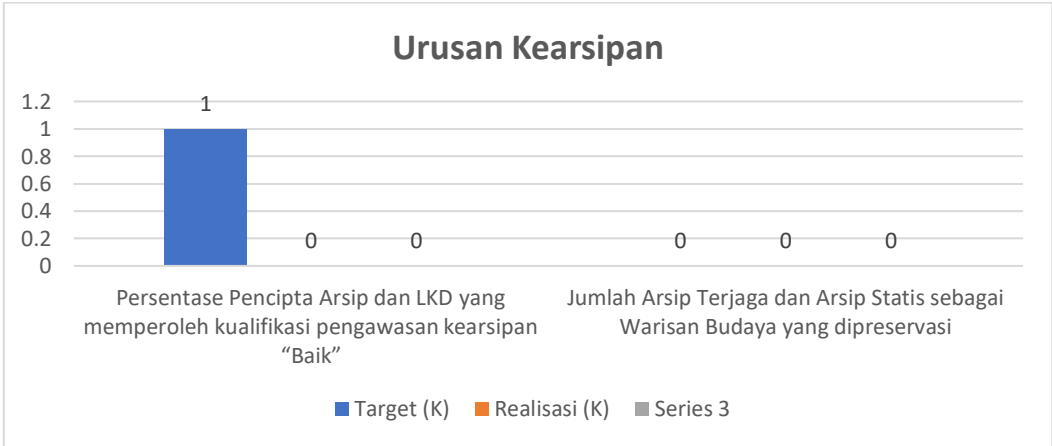
Gambar 2.17  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Urusan Perpustakaan



Sumber : Data RKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 (diolah)

Untuk urusan kearsipan capaian kinerja sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.18  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Urusan Kearsipan



Sumber : Data RKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.3 Urusan Pilihan

2.2.3.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi PD	27.794.888.075	9.329.048.017	Nilai	66	67,44	102,18
Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	1.641.600.000	183.854.000	%	100	0	-
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangakp (ton)	22.140.663.165	109.961.520	Ton	253.199	33376,3	13,18
	Nilai Tukar Nelayan			Nilai	103	93,75	91,02
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	7.044.277.319	92.539.200	Ton	801.698	122293,95	15,25
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan			Nilai	101	92,65	91,73
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana	3.638.293.500	154.652.813	%	40	36	90,00
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan Olahan	1.446.964.420	79.394.547	Kg	6.862.748	2.092.437	30,49
		62.259.722.059	9.870.055.550				54,23

Sumber : Data RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi PD dengan target kinerja (K) 66 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 67,44 persen, dengan tingkatan

capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Program Pengelolaan Ruang Laut dengan indikator kinerja Persentase Capaian Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Produksi Perikanan tangkap (ton) dengan target kinerja (K) 253.199 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 33376,3 ton, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan dengan target kinerja (K) 103 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 93,75 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Tinggi.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Produksi Perikanan Budidaya (ton) dengan target kinerja (K) 801.698 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 122293,95 ton, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dengan target kinerja (K) 101 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 92,65 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Tinggi.

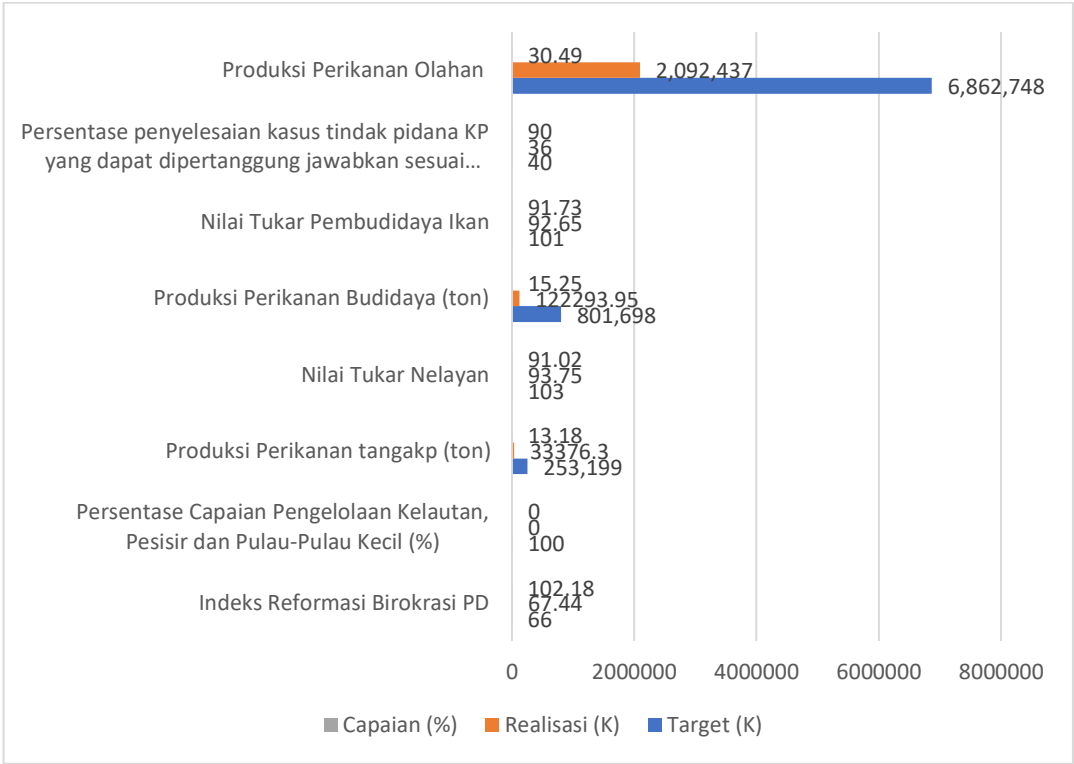
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalaui penerapan sanksi administasi dan sanksi pidana dengan target kinerja (K) 40 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 36 Persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Tinggi.

Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja Produksi Perikanan Olahan dengan target kinerja (K) 6.862.748 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 2.092.437 Persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Untuk capaian kinerja dinas kelautan dan perikanan sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.19  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.3.2 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi  
Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu		Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	12.240.851.040		2.452.458.320	Indeks	0,60		0
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daerah Tujuan Wisata Yang Berskala Nasional dan Terstandar Pengelolaannya	2.611.633.676		44.071.750	Hari	4,00		0
Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan	1.358.846.800		71.346.117	Orang	1.926.769		0
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan	1.070.780.000		616.125.000	Pelaku Kreasi	105		0

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	700.000.000	14.433.572	Orang	210	0
		17.982.111.516	3.198.434.759			

Sumber : Data RKPD Dinas Pariwisata Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan target kinerja (K) 0,60 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator kinerja Daerah Tujuan Wisata Yang Berskala Nasional dan Terstandar Pengelolaannya dengan target kinerja (K) 4 hari sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

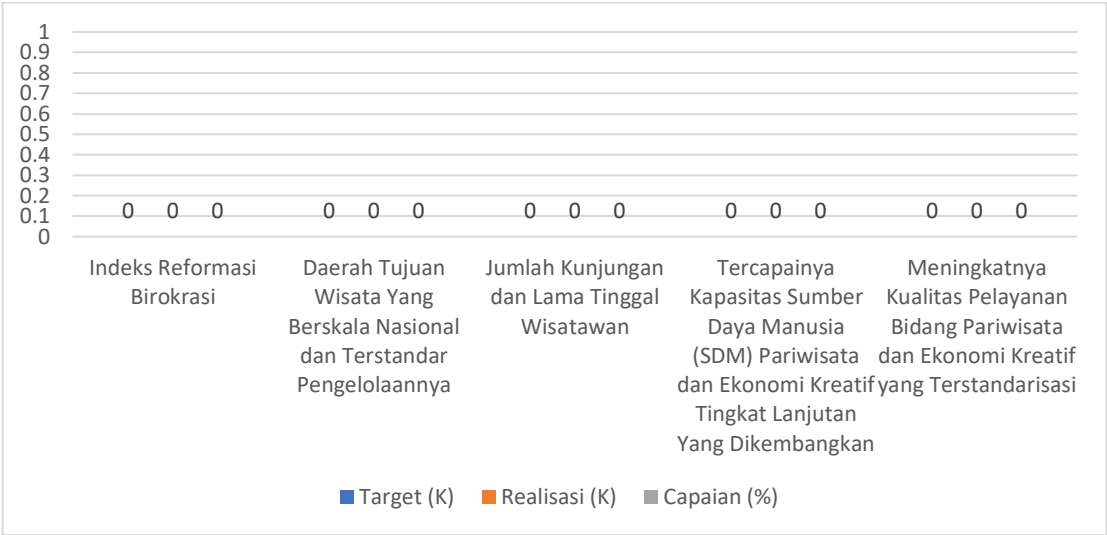
Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator kinerja Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan dengan target kinerja (K) 1.926.769 orang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator kinerja Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan dengan target kinerja (K) 105 pelaku usaha sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi dengan target kinerja (K) 210 orang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Untuk capaian kinerja Dinas Pariwisata sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.20  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Pariwisata Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Kehutanan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Targe t (K)	Realisas i (K)	Capaia n (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	60.676.460.891	15.855.568.989	Nilai			
	Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Persentase Realisasi Anggaran						
Program Pengelolaan Hutan	Persentase jumlah data dan informasi Pengelolaan Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE, dan Pengelolaan DAS dan RHL	1.522.016.675	270.767.920	Ha			
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase data dan informasi pada Kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoistemnya	164.112.725	19.190.000	%			
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaa n Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase data dan informasi bidang penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat	557.431.000	37.550.000	Ha			

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase data dan informasi di pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Provinsi Sulawesi Tengah	150.000.000	11.570.000	%			
		<b>63.070.021.291</b>	<b>16.465.414.829</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Kehutanan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Hutan dengan indikator kinerja Persentase jumlah data dan informasi Pengelolaan Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan dan KSDAE, dan Pengelolaan DAS dan RHL dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

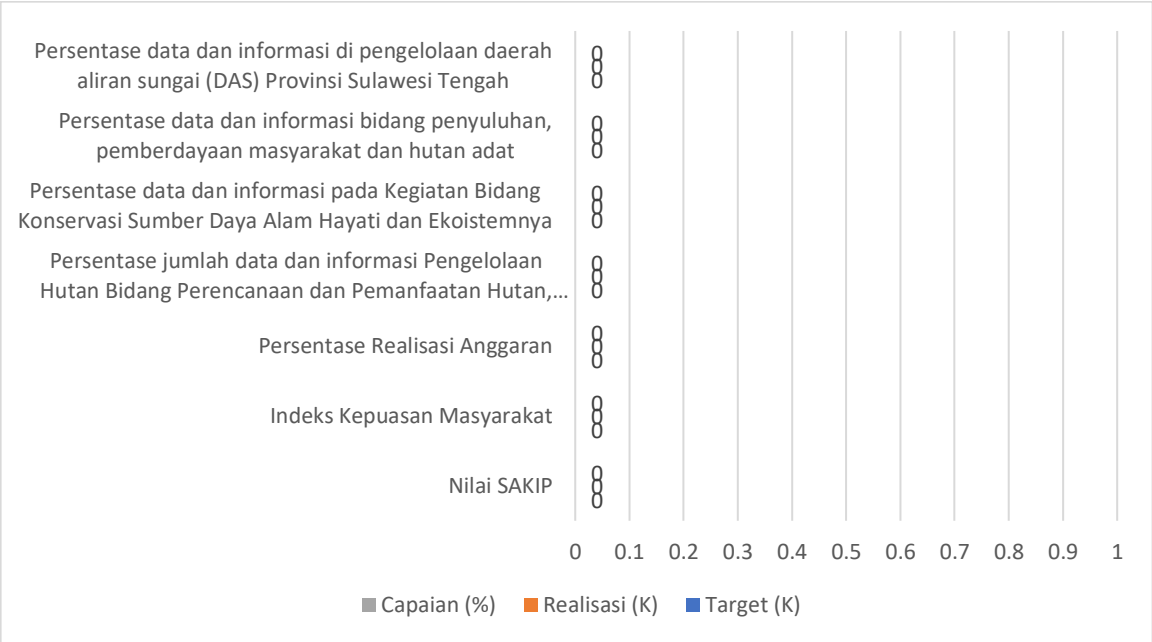
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan indikator kinerja Persentase data dan informasi pada Kegiatan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoistemnya dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan indikator kinerja Persentase data dan informasi bidang penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) dengan indikator kinerja Persentase data dan informasi di pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Provinsi Sulawesi Tengah dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.21  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Per Triwulan II  
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data RKPD Dinas Kehtanan Tahun 2024 (diolah)

2.2.3.4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.23  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	14.522.354.403	3.709.832.922	Indeks	88,50		
	Persentase Realisasi Anggaran			Nilai	85,00		
	Indeks Kepuasan Masyarakat			%	97,00		
Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi	491.422.150,00	38.375.339,00	%	3,75	0	
Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	449.999.900,00	36.806.489,00	%	50	4	



Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase pembangunan EBT	3.461.609.870,00	59.802.163,00	%	6	0	
Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	3.524.999.930,00	38.268.753,00	rasio	99,44	1	
		<b>22.450.386.253</b>	<b>3.883.085.666</b>				

Sumber : Data RKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 (diolah)

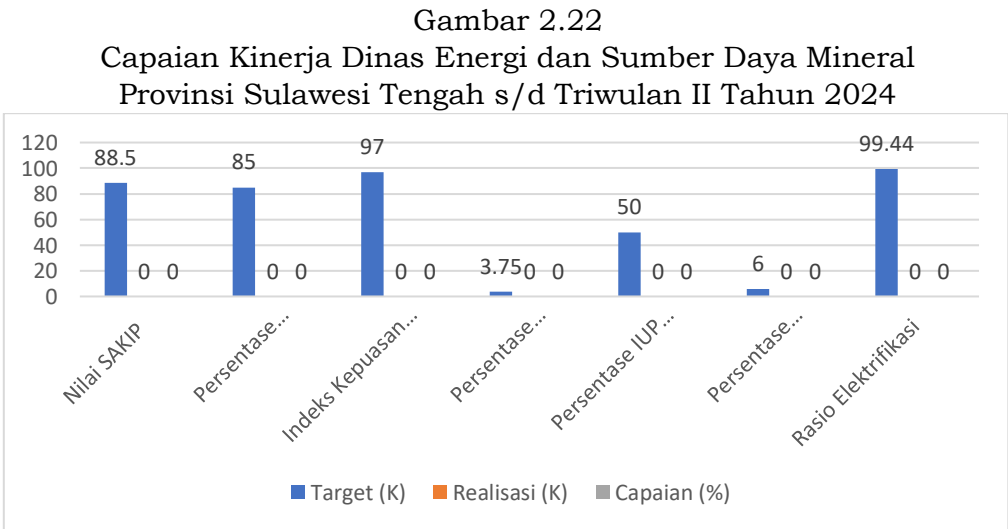
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi dengan target kinerja (K) 3,75 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan indikator kinerja Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dengan target kinerja (K) 50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 4 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan indikator kinerja Persentase pembangunan EBT dengan target kinerja (K) 6 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target kinerja (K) 99,44 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 1 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah

Secara keseluruhan capaian target Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.



Sumber : Data RKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 (diolah)

2.2.3.5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	17.001.172.143	3.908.260.372				
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C	72.809.000	-				
	Persentase penerbitan SKA	266.500.900	596.440				
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	145.461.700	8.636.400				
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	1.855.458.850	240.336.800				
Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	737.239.900	837.930				
Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	251.553.750	8.636.400				
Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	2.108.368.200	106.695.250				
Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	247.829.900	101.127.265				
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	187.048.500	3.620.000				
		22.873.442.843	4.378.746.857				

Sumber : Data RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah. Secara keseluruhan capaian target Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase penerbitan SKA dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator kinerja Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Nilai ekspor dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator kinerja Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

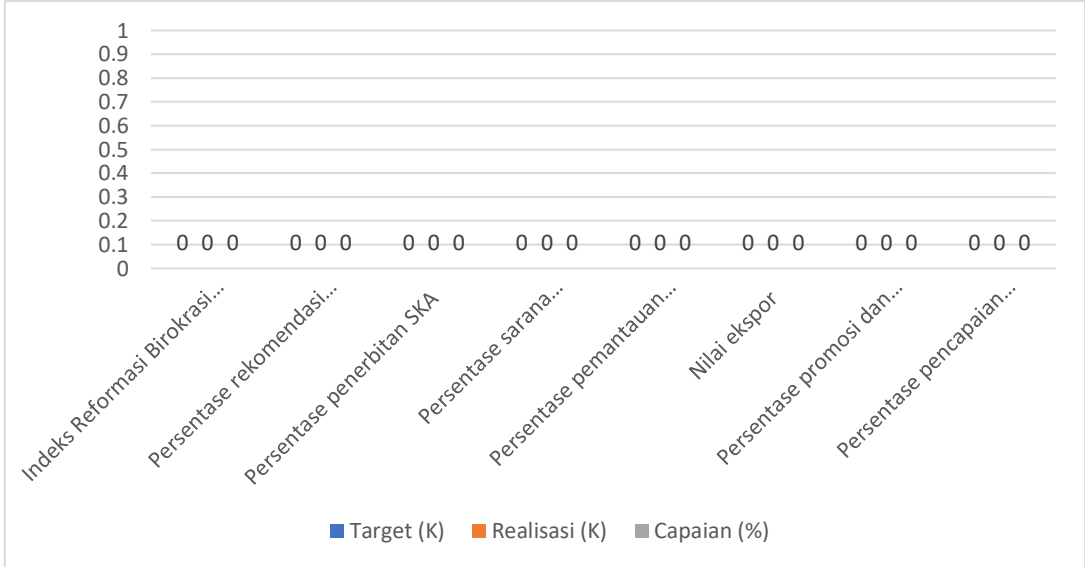
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP dengan target kinerja (K) 0. sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator kinerja Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis dengan target kinerja (K) 0. sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator kinerja Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas dengan target kinerja (K) 0. sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0. persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian terhadap target kinerja (K) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.23  
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 (diolah)

2.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.4.1 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Biro Organisasi Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II  
Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Targe t (K)	Realisas i (K)	Capaia n (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	1.597.441.280		Indeks	88,50		0

Penataan Organisasi	Nilai Pelaporan Kinerja	1.952.558.375		Nilai	100		0
	Tingkat Imlementasi Penyerderhanaan Birokrasi			%			#DIV/0!
	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai			%			#DIV/0!
	Indeks Ber-AKHLAK Pemda			indeks			#DIV/0!
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai RB Minimal "B"			%			#DIV/0!
	Indeks Pelayanan Publik			indeks			#DIV/0!
		3.549.999.655					

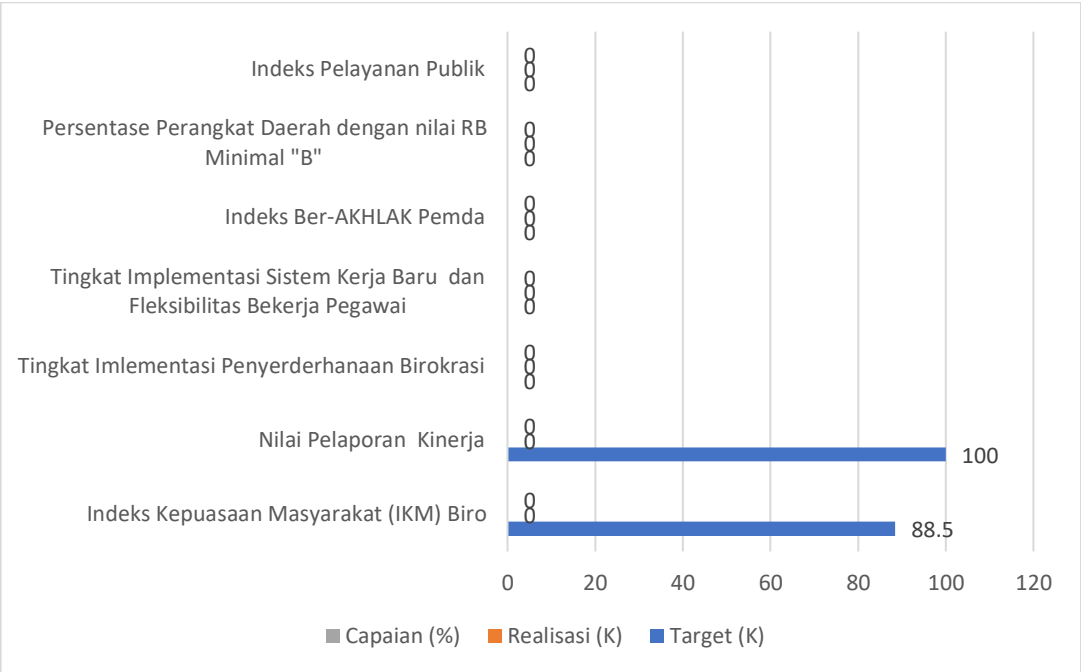
Sumber : Data RKPD Biro Organisasi Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro dengan target kinerja (K) 88,50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah.

Program Penataan Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Pelaporan Kinerja dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Tingkat Imlementasi Penyerderhanaan Birokrasi dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Indeks Ber-AKHLAK Pemda dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih Sangat Rendah, indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan nilai RB Minimal "B" dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target Biro Organisasi sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.24  
Capaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Biro Organisasi Tahun 2024 (diolah)

2.2.4.2 Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Biro Kesejahteraan Masyarakat  
Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.323.590.800	540.498.500	Indeks	68,50	15,93	
	Nilai SAKIP	1.952.558.375		Nilai	80,00		
	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks	88,50		
Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	42.984.808.900	629.650.000	Persen	3		
				Persen	8		
	Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan			Persen	100		

	Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan			Perse n	100		
	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi						
	Persentase kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi						
		47.260.958.075	1.170.148.500				

Sumber : Data RKPD Biro Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 (diolah)

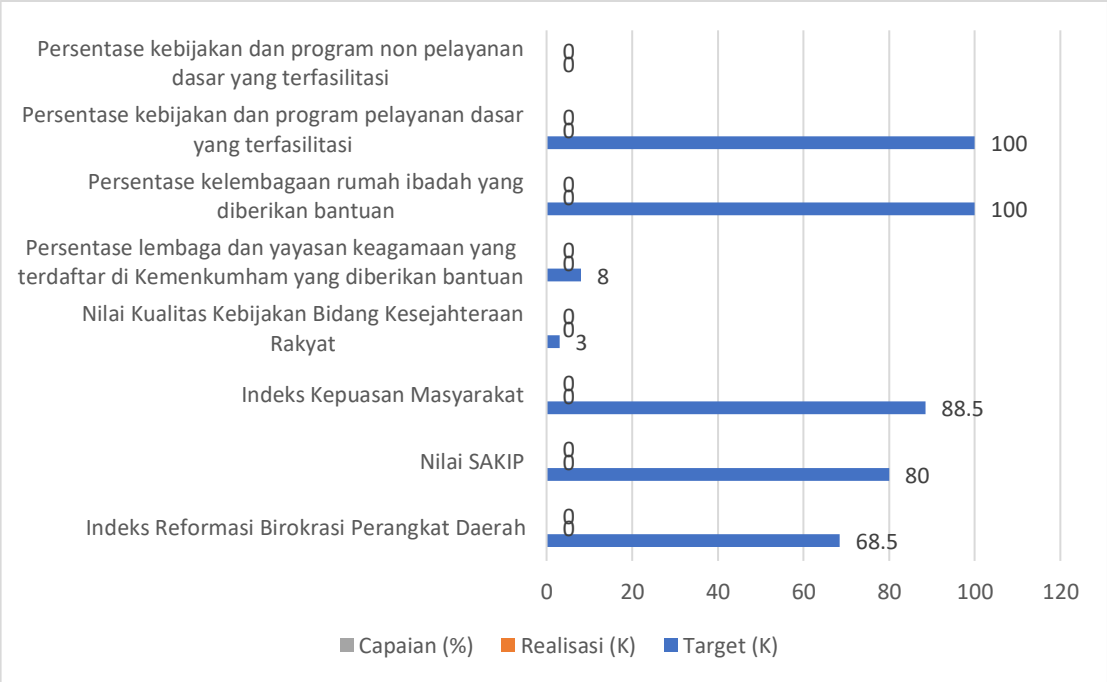
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 68,50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 15,93 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja nilai sakisip dengan target kinerja (K) memperoleh nilai 80 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja indeks kepuasan Masyarakat dengan target kinerja (K) 88,50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja (K) 3 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi dengan target kinerja (K) 0 sampai dengan triwulan II

Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target Biro Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.25  
Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 (diolah)

2.2.4.3 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.417.016.464	1.035.580.730	%	100	42,85%	42,85%
Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.997.983.536	198.165.872	%	100	9,92%	9,92%
		4.415.000.000	1.233.746.602				26,38%

Sumber : Data RKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024 (diolah)

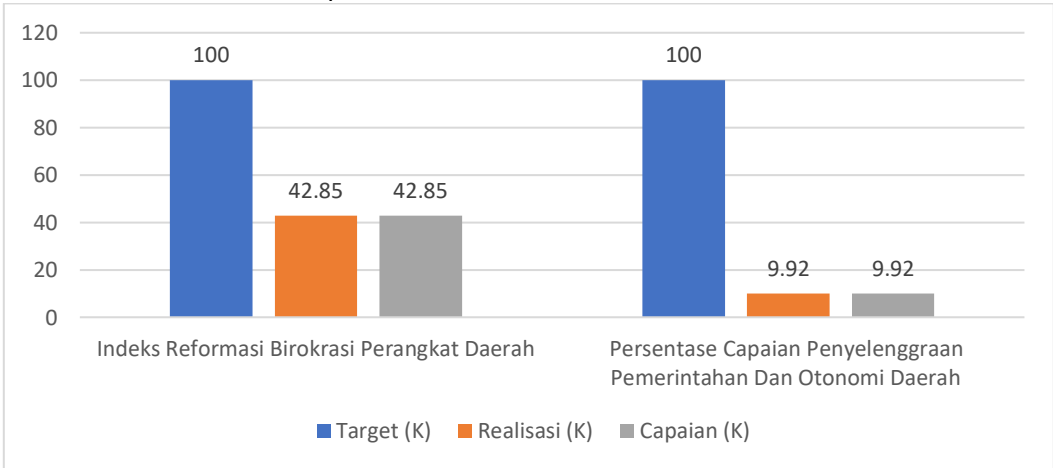


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 42,85 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program sebesar 42,85 persen kategori tersebut masih sangat rendah.

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelenggraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 9,92 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program sebesar 9,92 persen kategori tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah.

Grafik 2.26  
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.4.4 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi  
Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Targe t (K)	Realisas i (K)	Capaia n (%)
Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	93.865.258.063	10.684.955.747	Indeks	82		0
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase PERDA yang di hasilkan	65.350.609.030	3.852.620.000	%	80		

	Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif			Keputusa n	30		
		159.215.867.093	14.537.575.747				

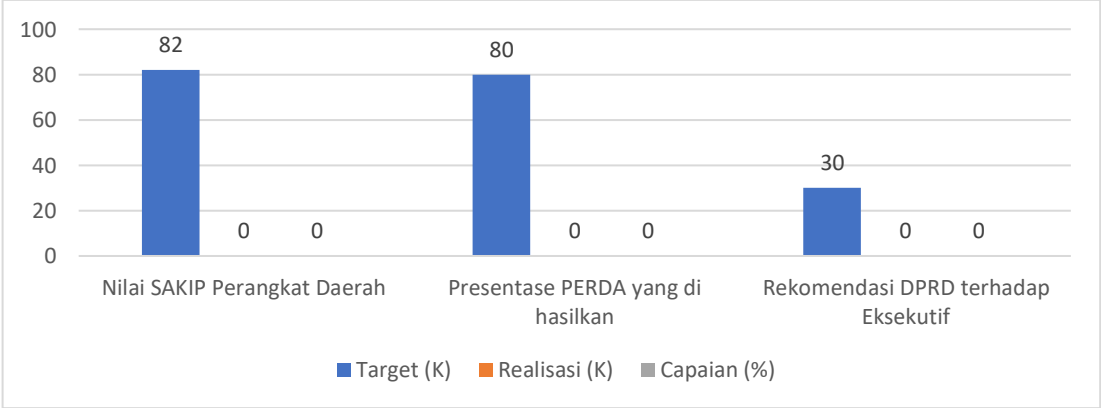
Sumber : Data RKPD Sekretariat DPRD Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 82 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Presentase PERDA yang di hasilkan dengan target kinerja (K) 80 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif dengan target kinerja (K) 30 keputusan yang dihasilkan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini:

Gambar 2.27  
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data Sekretariat Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.29  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan  
II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang tepat dan data laporan barang milik daerah	33.139.317.306	7.336.559.155	Dokumen / Laporan	100		0
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi perencanaan bidang pembangunan daerah	5.996.698.412	547.653.302	Dokumen / Laporan	100		0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi pembangunan daerah bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan SDA serta bidang infrastruktur dan kewilayahan	7.919.118.560	784.518.983	Dokumen / Laporan	100		0
		47.055.134.278	8.668.731.440				

Sumber : Data RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 (diolah)

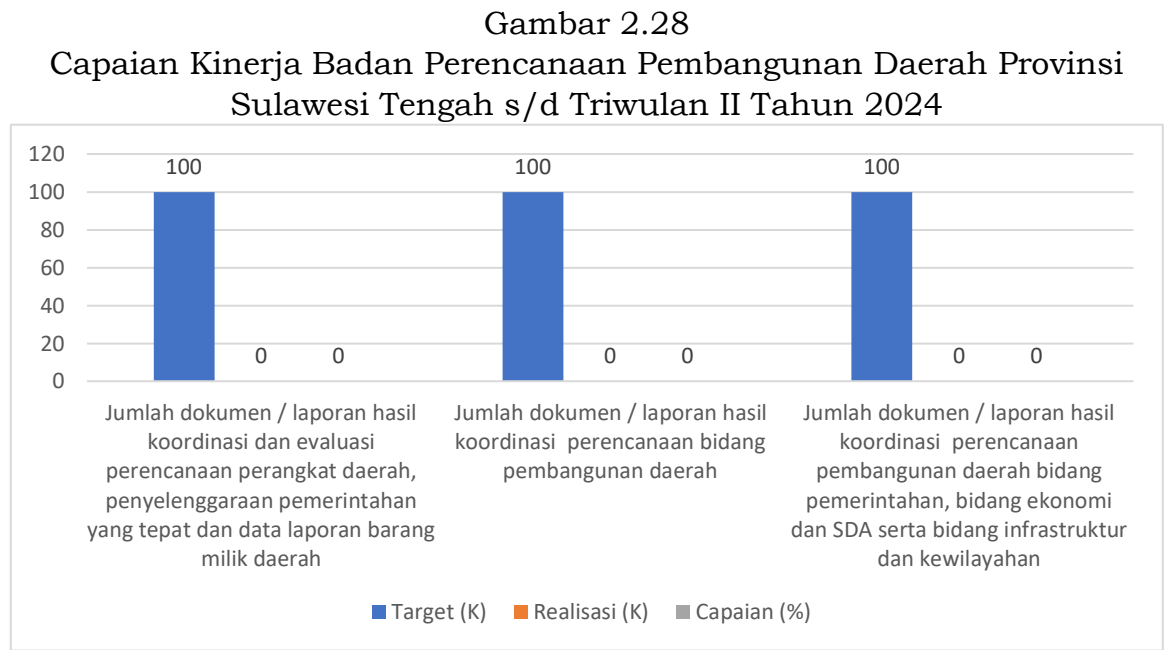
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang tepat dan data laporan barang milik daerah dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi perencanaan bidang pembangunan daerah dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen / laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan,

bidang ekonomi dan SDA serta bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.



Sumber : Data RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.5.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.30**  
**Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024**

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	394.035.081.511		Nilai	75		0
	Persentase Realisasi Anggaran			%	85		0
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Nilai	80		0
Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	750.293.407.434		%	100		0
	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan			%	100		0

	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi			%	100		0
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan BMD	4.249.699.750		%	100		0
		<b>1.148.578.188.695</b>					

Sumber : Data RKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024 (diolah)

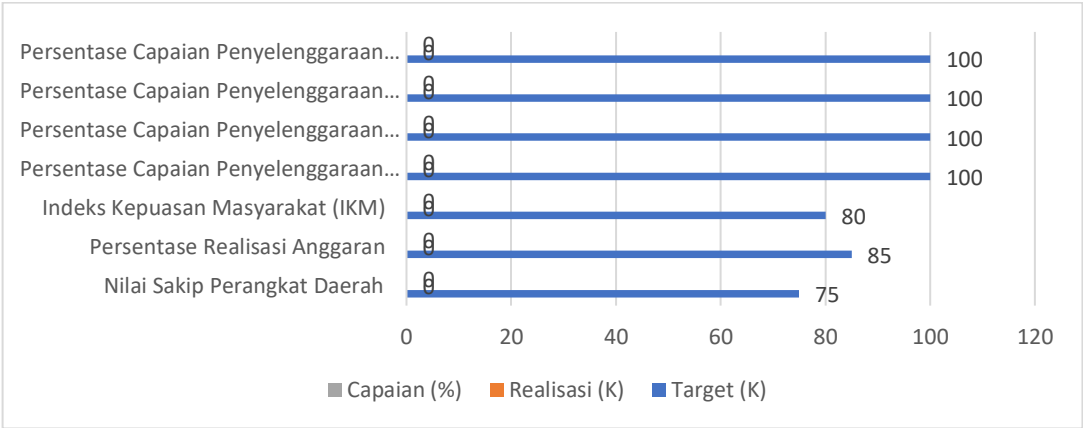
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 75 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran dengan target kinerja (K) 85 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja (K) 80 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indicator program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan BMD dengan target kinerja (K) 100 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target yang telah di tetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan triwulan II kategori masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.29  
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.5.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	15.414.104.727	5.332.999.476	Indeks	68,50	64,50	94,16
Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian	1.090.835.269	454.043.223	%	100	-	0,00
	Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian	832.129.913	138.053.320	%	100	0	0,00
	Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja	2.926.784.914	371.118.188	%	100	0	0,00
	Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN	990.872.900	235.847.168	%	100	0	0,00
UPT.							
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52.514.762	11.185.000	Indeks	66,50		0,00
Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN	620.713.335	46.721.288	%	100		0,00
		21.927.955.820	6.589.967.663				

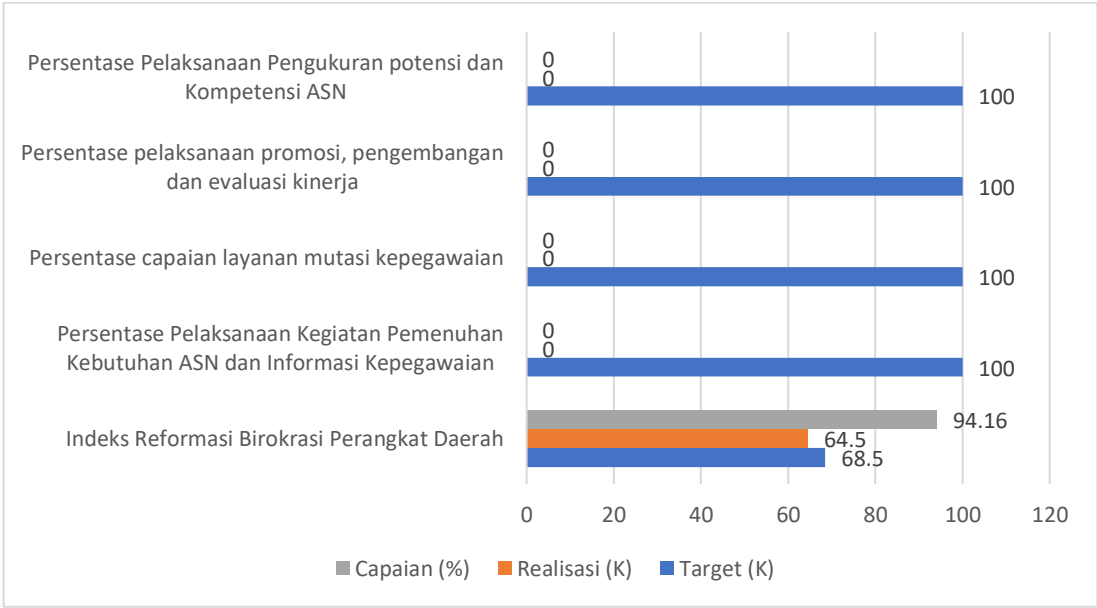
Sumber : Data RKPD Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 68,50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 64,50 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 94,16 kategori tinggi.

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah. indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah, indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN dengan target kinerja (K) 100 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan II Sangat Tinggi. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.30  
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.5.5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Realisasi Keuangan	8.498.922.664	3.628.434.530	%	96,50	19,61	20,33
	Indeks Kepuasan Masyarakat			Poin	75	0	0
	Nilai AKIP BPSDM			Poin	80	0	0
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah	9.739.485.650	429.764.100	%	100,00	4,41	4,41
		28.238.408.314	4.058.198.630				6,18

Sumber : Data RKPD BPSDM Tahun 2024 (di olah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Realisasi Keuangan perangkat daerah dengan target kinerja (K) 96,50 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 19,61 dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 20.33 persen

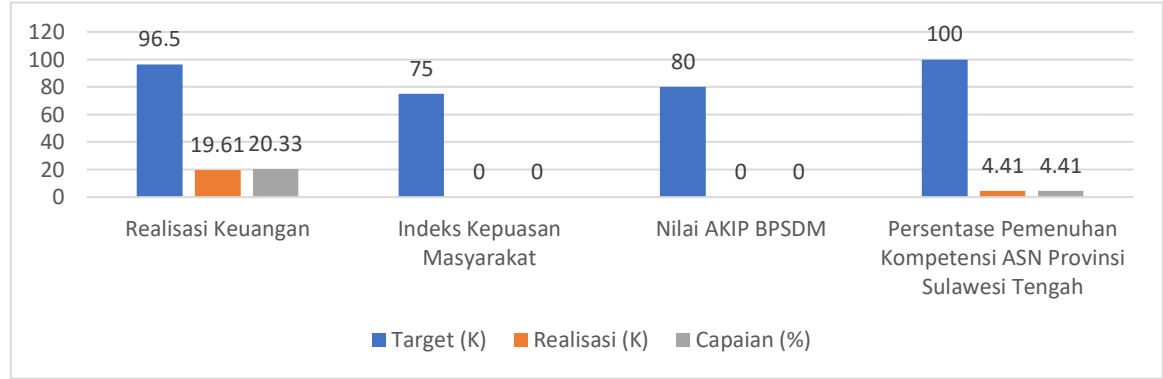


kategori sangat rendah, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja (K) mencapai 75 poin sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen dengan kategori sangat rendah, indikator kinerja Nilai Sakip BPSDM dengan target kinerja (K) mencapai 80 poin sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen dengan kategori sangat rendah.

Program Pengembangan Sumber Daya dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah dengan target kinerja (K) 100,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 4,41 dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 4.41 persen kategori sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II sebesar 6,18 persen masih kategori Sangat Rendah. Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana grafik di bawah ini :

Gambar 2.31  
Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 (diolah)

2.2.5.6 Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.33  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II  
Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)	Bobot Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16.613.700.391	6.369.560.966	desk	1			

Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Terselanggaranya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	679.999.950	200.042.252	<del>40%</del>	15	29%	29%	
		17.293.700.341	6.569.603.218					

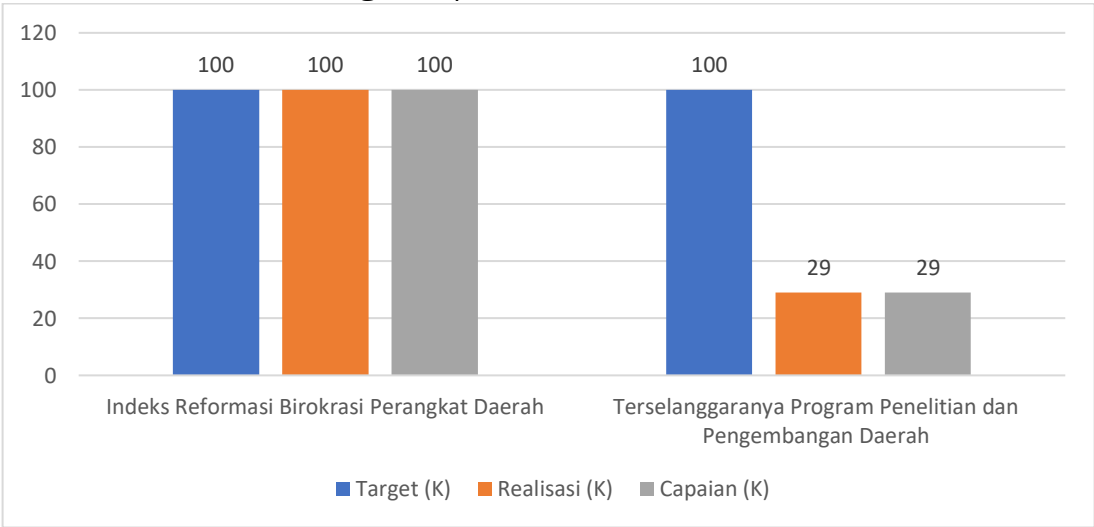
Sumber : Data RKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja (K) 1 Dokumen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 100 persen termasuk kategori Tinggi.

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Terselanggaranya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan target kinerja (K) 15 Dokumen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 29 persen, dengan tingkatan capaian untuk indikator program tersebut sebesar 29 persen termasuk kategori Sangat Rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sampai dengan triwulan II sebesar 50,15 persen masih kategori Rendah. Capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana grafik di bawah ini.

Gambar 2.32  
Capaian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.2.5.7 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Penghubung sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.34  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	9.409.584.928	2.630.247.208	%	66	0	0
Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat (customer/stakeholder)	6.870.829.243	1.920.046.385	%	80	0	0
		16.280.414.171	4.550.293.593				

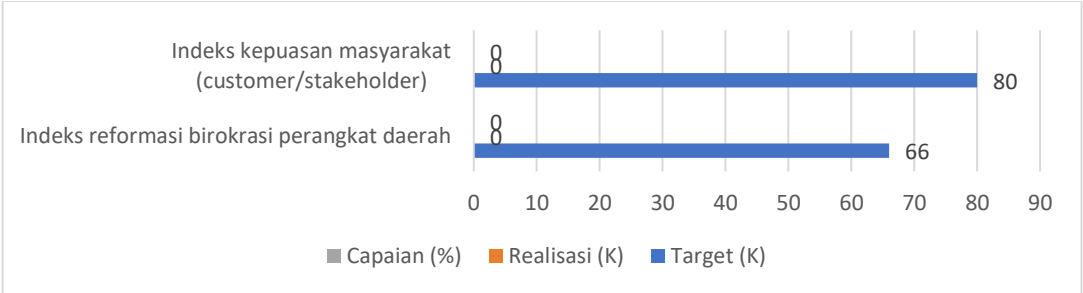
Sumber : Data RKPD Badan Penghubung Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja (K) 66 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Program Pelayanan Penghubung dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (customer/stakeholder) dengan target kinerja (K) 80 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian target kinerja (K) yang telah ditetapkan oleh Badan Penghubung sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.33  
Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Penghubung Tahun 2024 (diolah)

2.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.6.1 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Penghubung sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.35  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Program	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)	Bobot Capaian (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28.545.865.548	4.399.899.760	Nilai	80,00	-		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	88,50	-		
	Persentase Realisasi Anggaran			%	98,00	26,22	26,76	
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	8.406.480.000	1.849.706.000	%	77,00	0		
	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri			%	88,00	0		
	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat			%	80,00	0		
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan			%	64,10	0		
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	1.044.851.500	24.912.422	Level	3	3		
		37.997.197.048	6.274.518.182					

Sumber : Data RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target kinerja (K) 80,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja (K) 88,50 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah. indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran dengan target kinerja (K) 98.00 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 26,22 persen,

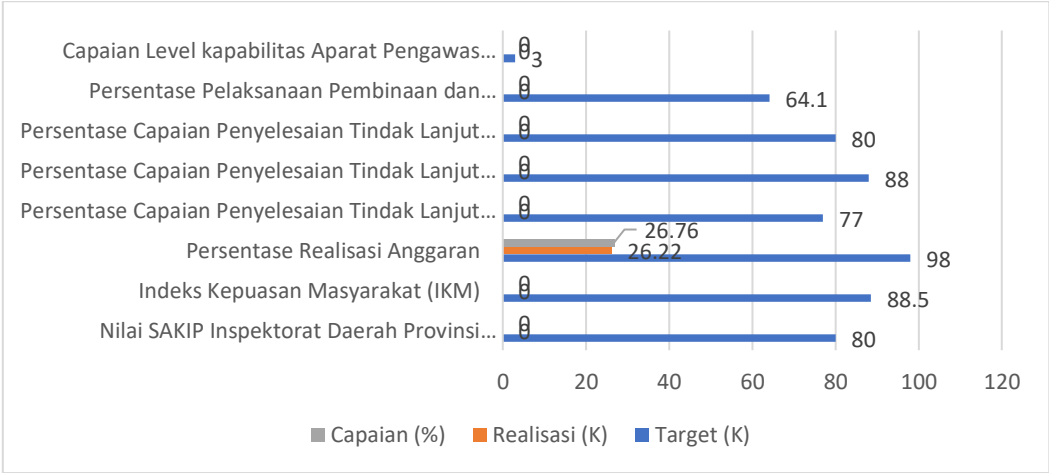
dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 26,76 persen kategori masih sangat rendah.

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan target kinerja (K) 77,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah. dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dengan target kinerja (K) 88,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah. dengan indikator kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan target kinerja (K) 80,00 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah. indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dengan target kinerja (K) 64,10 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut kategori masih sangat rendah.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja Capaian Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan target kinerja (K) mencapai level 3 sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi ke level 3, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masuk kategori sangat tinggi.

Secara keseluruhan capaian terhadap target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan II masih Sangat Rendah. Capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagaimana Grafik di bawah ini.

Gambar 2.34  
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Inspektorat Tahun 2024 (diolah)

2.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

2.2.7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36  
Rekapitulasi capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

	Indikator Program	Pagu	Realisasi Per 30 April (Rp)	Satuan	Target (K)	Realisasi (K)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	11.658.346.217	2.294.462.027	Indeks	140	28	20,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.665.727.925	355.501.754	%	289	146	50,52
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	63.502.566.450	60.703.760.510	%	165	217	131,52
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	30.906.847.327	543.976.000	%	164	35	21,34
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	435.083.625	25.157.800	%	124	5	4,03
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah	1.621.968.000	236.977.240	%	292	81	27,74
		111.790.539.544	64.159.835.331				

Sumber : Data RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja (K) 140

sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 28, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 20.00 persen atau masih sangat rendah.

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja (K) 289 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 146 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut masih sebesar 50,52 persen sangat rendah.

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target kinerja (K) 165 Persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 217 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 131,52 persen kategori sangat tinggi.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan target kinerja (K) 164 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 35 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 21,34 persen kategori masih sangat rendah.

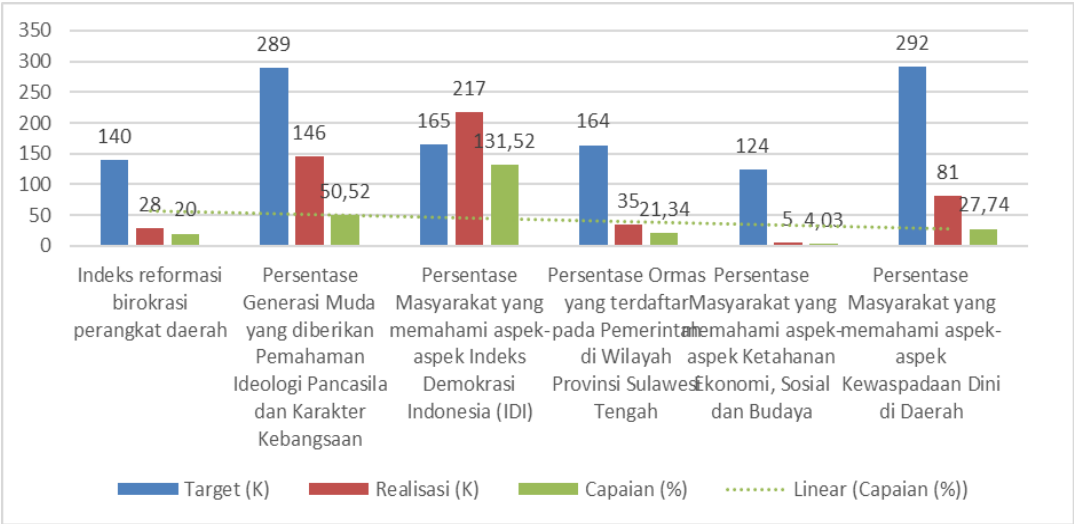
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target kinerja (K) 124 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 5 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 4,03 persen kategori masih sangat rendah.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kuantitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di Daerah dengan target kinerja (K) 292 persen sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 81 persen, dengan tingkatan capaian untuk program tersebut sebesar 27,74 persen kategori masih sangat rendah.

Secara keseluruhan capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2024

sampai dengan triwulan II sebesar 59,81 persen kategori masih Rendah. Capaian kinerja sebagaimana dijelaskan pada Grafik di bawah ini:

Gambar 2.35  
Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah s/d Triwulan II Tahun 2024



Sumber : Data RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2024 (diolah)

2.3 Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat diketahui untuk capaian kinerja setiap perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah secara umum masih dalam kategori sangat rendah dengan nilai < 50 persen capaian yang mana hal ini disebabkan oleh tidak terisinya kolom target kinerja (K) dan realisasi kinerja (K) oleh beberapa perangkat daerah sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara keseluruhan.



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

##### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dan juga memperlihatkan struktur perekonomian regional.

Pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi yang diwujudkan melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah dari sektor ekonomi primer ke sektor ekonomi sekunder dan tersier yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

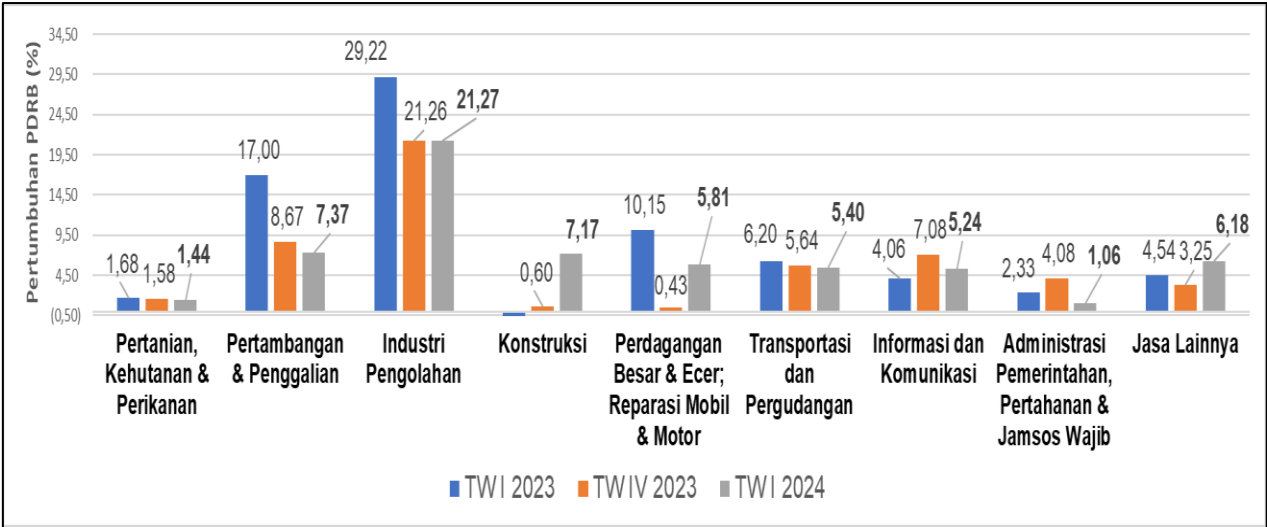
Ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49 persen, menempati posisi tertinggi ketiga setelah Provinsi Papua dan Maluku Utara. Dalam konteks *q-to-q (quarter-to-quarter)*, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 4,65 persen dari kuartal IV tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan yang impresif tersebut mampu mendongkrak kontribusi perekonomian Sulawesi Tengah terhadap perekonomian Nasional sebesar *share* 1,64 persen pada kuartal I tahun 2024, dan juga *share* sebesar 23,87 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi.

Capaian pertumbuhan yang tinggi ini menjadi modal kuat dalam mencapai target sasaran pembangunan tahun 2024, khususnya target

pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada kisaran 13,70 persen s.d 15,30 persen persen sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan tema **“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan yang di dukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”**.

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 10,49 persen (*y-on-y*), relatif stabil terhadap pertumbuhan triwulan 1 tahun 2023 sebesar 13,18 persen (*y-on-y*). Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan yang tumbuh lebih tinggi sebesar 21,27 persen dan masih menjadi pendorong utama perekonomian di Sulawesi Tengah (Gambar 3.1). Selain industri pengolahan, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 7,37 persen dan 1,44 persen memberikan andil yang kuat. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 70,79 persen.

Gambar 3.1  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*y-on-y*) ( persen)



Sumber : BPS Sulteng, 2024

Impresifnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor Sulawesi Tengah periode Maret tercatat sebesar US\$6,67 miliar (naik 314,9 persen *y-o-y*). Mayoritas ekspor didominasi oleh ekspor komoditas besi dan baja dengan valuasi sebesar 1,05 miliar USD dan berat total komoditas sekitar 929,2 juta ton. Sementara itu, impor ke Sulawesi Tengah pada Maret 2024 tercatat senilai USD 454 juta (turun 37,6 persen *y-o-y* atau 24,2 persen *m-o-m*). Secara agregat, impor di Sulawesi Tengah mencapai sekitar US\$1,41 miliar selama triwulan I tahun 2024. Kinerja perekonomian yang kuat juga selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi

yang terus terjaga, ditandai dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Tengah tahun 2023.

Sulawesi Tengah, menjadi provinsi dengan sumber pertumbuhan tertinggi bagi pertumbuhan regional Pulau Sulawesi. Distribusi pertumbuhan regional Sulawesi dari Sulawesi Tengah pada TW I tahun 2024 tercatat 2,54 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan hanya 2,28 persen. Tingginya angka kontribusi Sulawesi Tengah tersebut, sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada TW I tahun 2024 ini. Kinerja perekonomian Sulawesi Tengah tumbuh kuat di kuartal I Tahun 2024 sebesar 10,49 persen (*y-on-y*), seiring dengan inflasi yang terkendali, peningkatan produksi pertanian, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, pertumbuhan kinerja fiskal dan peningkatan kinerja beberapa sektor lapangan usaha lainnya. Angka pertumbuhan tersebut, menjadikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah konsisten berada pada pertumbuhan dua digit selama 9 kuartal berturut-turut (Laporan KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng, 2024).

Adapun secara lengkap laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha untuk Triwulan I tahun 2024 terhadap Triwulan IV tahun 2023 (*q-to-q*), Triwulan I tahun 2024 terhadap Triwulan I tahun 2023 (*y-on-y*) dan sumber pertumbuhan ( persen) untuk Triwulan I tahun 2024 terhadap Triwulan I tahun 2023 (*y-on-y*), disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha ( persen)\*

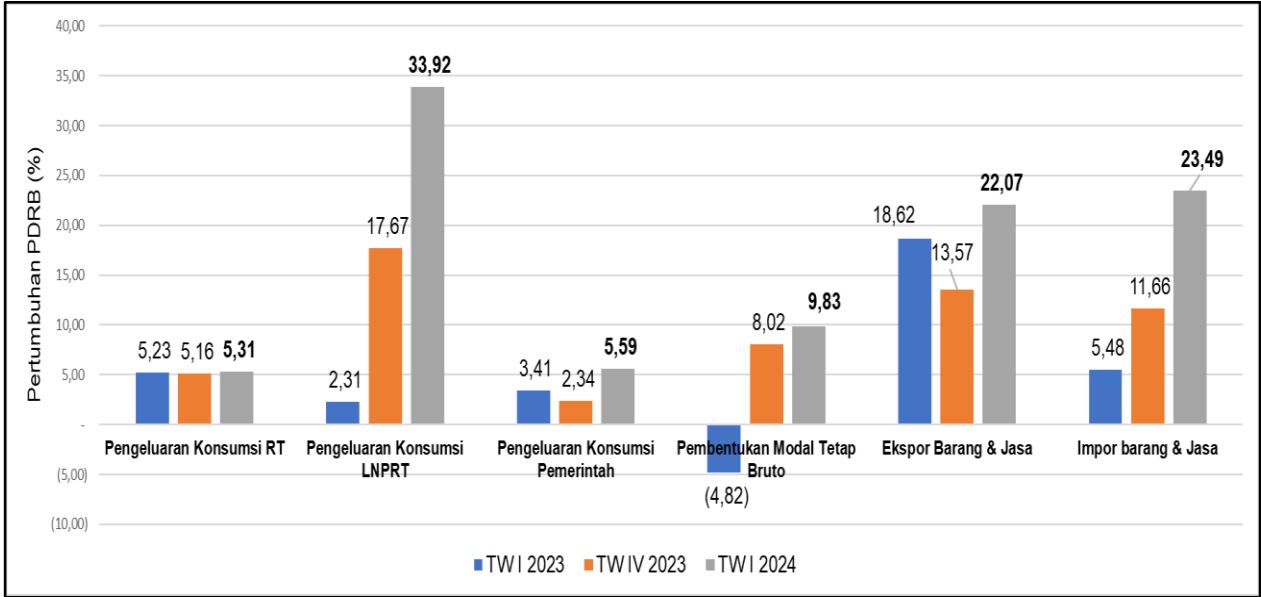
No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ( persen)		Sumber Pertumbuhan (persen)
		Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 ( <i>q-to-q</i> )	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 ( <i>y-on-y</i> )	Triw I-2022 Terhadap Triw I- 2022 ( <i>q-to-q</i> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A,	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,28	1,44	0,26
B,	Pertambangan dan Penggalian	-4,70	7,37	1,30
C,	Industri Pengolahan	-4,61	21,27	7,20
D,	Pengadaan Listrik dan Gas	1,35	8,23	0,00
E,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,10	0,00
F,	Konstruksi	-5,83	7,17	0,60
G,	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,49	5,81	0,37
H,	Transportasi dan Pergudangan	-0,90	5,40	0,12
I,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,95	10,20	0,04

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ( persen)		Sumber Pertumbuhan (persen)
		Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q)	Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y)	Triw I-2022 Terhadap Triw I- 2022 (q-to-q)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J,	Informasi dan Komunikasi	0,19	5,24	0,17
K,	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,33	12,60	0,19
L,	Real Estat	-0,75	5,20	0,06
M,N,	Jasa Perusahaan	-2,39	5,34	0,01
O,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-31,44	1,06	0,03
P,	Jasa Pendidikan	-4,83	4,18	0,09
Q,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,91	3,84	0,04
R,S,T, U,	Jasa Lainnya	0,07	1,63	0,01
	<b>PDRB</b>	<b>-4,65</b>	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>

\*Sumber : BPS Sulteng, 2024

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 tumbuh sebesar 10,49 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 33,92 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,07 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,83 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,59 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 5,31 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 23,49 persen (BPS Sulteng, 2024) (Gambar 3.2).

Gambar 3.2  
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) ( persen)



Sumber : BPS Sulteng, 2024

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 106,51 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 42,95 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 29,49 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,91 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,55 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 86,15 persen.

Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 22,62 persen (Tabel 3.2). Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan-I 2024, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar yaitu komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 25,53 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,35 persen dan Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,62 persen. Sedangkan komponen lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Perubahan Inventori memiliki sumbangsih di bawah satu persen.

Tabel 3.2  
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah  
Menurut Komponen Pengeluaran (persen)\*

No.	Komponen	Laju Pertumbuhan ( persen)		Sumber Pertumbuhan ( persen)
		Triw I-2024 Terhadap Triw IV-2023 (q-to-q)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)	Triw I-2024 Terhadap Triw I-2023 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,05	5,31	1,62
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,32	33,92	0,39
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-46,38	5,59	0,27
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,66	9,83	4,35
5.	Perubahan Inventori	-	-	-
6.	Ekspor Barang dan Jasa	0,78	22,07	25,53
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-4,08	23,49	22,62
	Produk Domestik Bruto (PDB)	-4,65	10,49	10,49

\*Sumber : BPS Sulteng, 2024

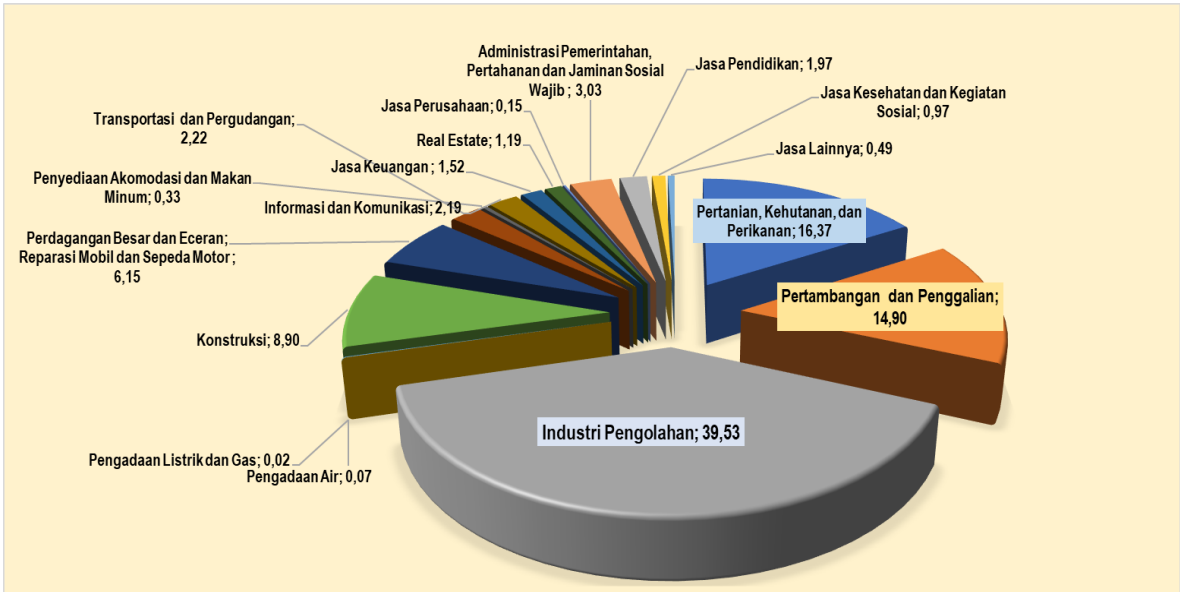
Memasuki awal tahun 2024, dunia secara global dan Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tengah kembali diperhadapkan dengan imbas dari konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, lebih khusus bagi Indonesia adalah dampak naiknya harga BBM dan memberikan beban subsidi kepada APBN selanjutnya berefek pada kemampuan penyaluran Dana Transfer ke daerah. Selain itu, kenaikan komoditas impor gandum sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan dan makanan lain yang bersumber gandum. Dengan adanya pemilu tahun 2024, permintaan produk makanan berbahan dasar tepung terigu diperkirakan akan meningkat. Konsumsi gandum pada tahun 2023-2024 diperkirakan mencapai 8,6 juta ton setara gandum.

Selain itu, gandum juga banyak dikonsumsi di Indonesia sebagai bahan pakan. Asosiasi pabrik pakan memperkirakan produksi pakan pada tahun 2024 akan meningkat sebesar 5 persen menjadi 22,4 juta ton dari 21,3 juta ton yang diproduksi pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena pabrik pakan terus memasukkan gandum sebagai salah satu sumber energi dalam formulasi pakan. Konsumsi gandum untuk pakan pada tahun 2024 diperkirakan meningkat menjadi 1,2 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,1 juta ton. Menurut data BPS tahun 2023 impor gandum Indonesia terbesar berasal dari Ukraina sebagai Negara pengimpor tertinggi ke Indonesia. Permasalahan khusus yang masih dihadapi oleh Sulawesi Tengah yaitu tingginya angka kemiskinan ekstrem, tingginya daerah rawan pangan dan masih rendahnya Nilai Indeks Modal Manusia (IMM).

Pada awal tahun 2024 persebaran lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan industri pertambangan dan penggalian. Adapun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pergeseran karena beralihnya sebagian pekerja petani dan pekebun ke sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian yang diakibatkan oleh bencana iklim El-Nino di musim-musim kemarau yang dampaknya terasa hingga Bulan Pebruari tahun 2024 (Gambar 3.3). Fenomena El-Nino yang ditandai dengan naiknya suhu dan penurunan kuantitas curah hujan mempengaruhi hasil panen, musim tanam yang terganggu, penurunan kualitas tanaman, ketidakstabilan pasar, mengganggu produksi padi dan lainnya.

Sedikit melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I 2024 hanya disebabkan oleh pemulihan pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga. Target realisasi investasi untuk tahun 2024 sebesar 111.68 triliun, yang mana target ini telah naik lebih dari 2 (dua) kali lipat dari target realisasi investasi tahun 2022 yang sebesar 53.09 triliun Tetapi target investasi tersebut dapat dicapai dengan realisasi investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 111,98 Triliun.

Gambar 3.3  
Struktur PDRB Sulawesi Tengah Menurut  
Lapangan Usaha Triwulan 1 2024 ( persen)



\*Sumber : BPS Sulteng, 2024

Angka tersebut menjadikan Sulawesi Tengah sebagai lokasi investasi terbesar ke-empat di Indonesia pada periode TW I tahun 2024, dibawah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Investasi Sulawesi Tengah tersebut tumbuh menguat didorong oleh tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi. Hal ini dapat diwujudkan karena semua Stakeholder terkait bekerja Bersama untuk menciptakan iklim investasi yang baik agar pelaku usaha bisa merealisasikan investasinya dan diharapkan dapat terwujud Sulawesi tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mampu tumbuh sebesar 5,31 persen (y-on-y), menguat tipis dibandingkan TW I tahun 2023 yang sebesar 5,30 persen. Kondisi setahun lalu, belum banyak peningkatan yang signifikan terutama pada konsumsi Restoran dan Hotel yang tercermin dari pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel, dimana pada periode Januari – Maret 2024, TPK hotel mampu tumbuh setiap bulannya jika dibandingkan periode Januari – Maret 2023. Selain itu adanya momen libur panjang Iedul Fitri 1445 H atau 2024 Masehi juga menjadi pendorong dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman. Bertumbuhnya konsumsi rumah tangga ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Sulawesi Tengah masih terjaga, dimana hal tersebut tidak terlepas dari stabilitas harga di Sulawesi Tengah serta membaiknya pendapatan masyarakat seiring perbaikan pada kondisi ketenagakerjaan. Peran serta pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait penanganan Inflasi mampu meredam tekanan inflasi yang terjadi dan mampu mendorong penguatan aktivitas ekonomi.

Upaya pemulihan dan peningkatan diberbagai sektor ekonomi masih akan terus berlanjut meskipun terdapat ketidakpastian global khususnya konflik Rusia dengan Ukraina, pemulihan panen akibat kemarau El-Nino, disamping kondisi menghadapi pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan masih relatif stabil dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan seperti pada tahun 2023 atau lebih meningkat lagi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 terutama akan ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi serta terus positifnya kinerja ekspor. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, penyumbang terbesar pertumbuhan diperkirakan berasal dari sektor industri pengolahan, pertambangan dan sektor konstruksi.

Melihat trend kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 diatas, maka diperkirakan sampai dengan triwulan IV-2024, sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industri serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi diatas, dan optimisme usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tidak mengindahkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang semula pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar 13,70 persen-15,30 persen mengalami perubahan menjadi 11,00 persen-12,00 persen pada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

#### B. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termaksud swasta (BPS, 2024).

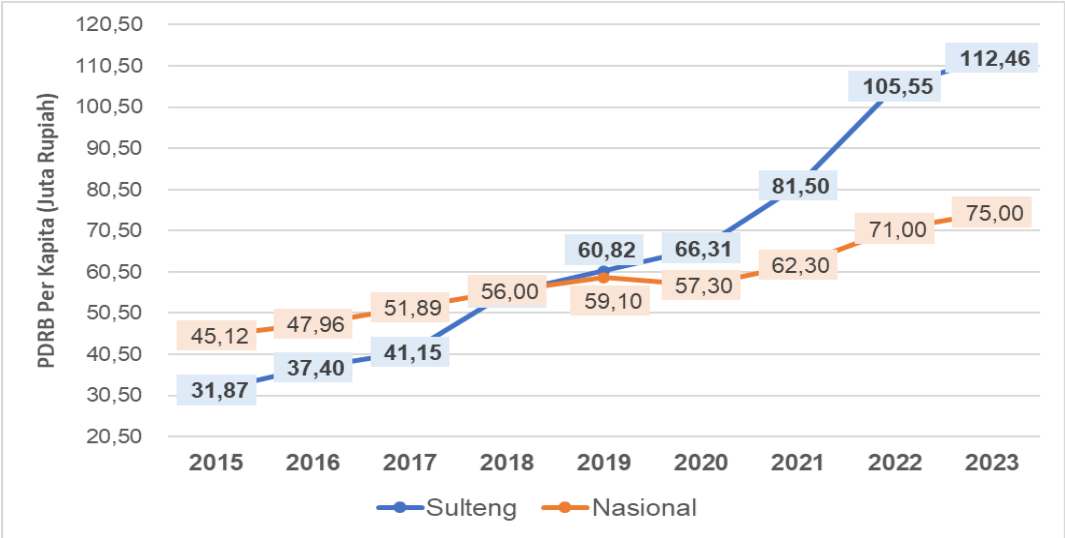
PDRB perkapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu wilayah, maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai



pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi.

Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB Nasional, maka PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015-2022 juga menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp.105,55 juta, meningkat 24,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dikarenakan pembangunan dan operasi perusahaan smelter Nikel di Sulawesi Tengah yang merekrut tenaga kerja asing dan lokal serta seiring dengan adanya kenaikan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup tinggi sebesar 15,17 persen (Gambar 3.4).

Gambar 3.4  
Perkembangan PDB dan PDRB Perkapita ADHB  
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Periode 2015-2023  
(dalam Juta Rupiah)



\*Sumber : BPS RI dan BPS Sulteng (2024)

Dalam dua tahun terakhir PDRB perkapita selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp. 75,00 juta. Jika dilihat tren perkembangannya selama 5 tahun terakhir, PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan mengalami peningkatan drastis sebesar 112,46 persen pada tahun 2023. Tren positif tersebut harus menjadi momentum dan pengingat bahwa ekonomi Sulawesi Tengah secara historis *resiliency-nya* cukup baik sehingga keyakinan adanya pertumbuhan ekonomi dapat dipelihara ditengah kondisi ekonomi yang sangat *volatile* dikarenakan adanya konflik 2 (dua) Negara Ukraina dan Rusia yang belum usai. Dan pada akhir tahun 2024 diperkirakan rata-rata PDRB Per Kapita Sulawesi Tengah akan mengalami peningkatan apabila konflik Ukraina-Rusia tidak memberikan dampak luas serta kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis pertalite. Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, PDRB perkapita Sulawesi Tengah yang

semula pada RKPD 2024 sebesar Rp.107,00 Juta perkapita/tahun akan mengalami perubahan menjadi Rp.112,46 – Rp.115,00 juta perkapita/tahun pada Perubahan RKPD 2024.

#### C. Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi

Pada bulan Juni 2024, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan (inflasi bulanan) dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,18 persen dari 107,07 pada bulan Mei 2024 menjadi 107,26 pada bulan Juni 2024. Kenaikan tersebut dipengaruhi adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,86 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,43 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,02 persen; kelompok transportasi sebesar 1,32 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,39 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,31 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada Juni 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,32 pada Juni 2023 menjadi 107,26 pada Juni 2024. Tingkat inflasi *m-to-m* dan tingkat inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 0,18 persen dan 1,38 persen (BPS Sulteng, 2024) (Tabel 3.3).

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Bulan Juni 2024, antara lain: beras, cabai rawit, Sigaret Kretek Mesin (SKM), emas perhiasan, kontrak rumah, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, Sigaret Kretek Tangan (SKT), kue basah, gula pasir, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sepeda motor, tarif parkir, telur ayam ras, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan ayam goreng. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Mei 2024, antara lain: ikan cakalang, bahan bakar rumah tangga, ikan lajang, daging ayam ras, ikan malalugis/ikan sorihi, ikan teri, ikan ekor kuning, jeruk nipis/limau, ikan deho, kopi bubuk, baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria, telepon seluler, ikan bubara, ikan lolosi, shampoo dan ikan bandeng.

Tabel 3.3  
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah  
Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100) Juni 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2023	IHK Desember 2023	IHK Juni 2024	Tingkat Inflasi <i>m-to-m</i> Juni 2024 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi <i>y-to-d</i> Juni 2024 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi <i>y-on-y</i> Juni 2024 <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi <i>m-to-m</i> Juni 2024 (%)	Andil Inflasi <i>y-on-y</i> Juni 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum ( <i>Headline</i> )	104,32	105,80	107,26	0,18	1,38	2,82	0,18	2,82
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,88	111,63	115,28	0,34	3,27	6,86	0,11	2,07
Pakaian dan Alas Kaki	100,54	100,71	100,85	0,10	0,14	0,31	0,01	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,44	103,14	102,66	0,05	-0,47	0,21	0,01	0,03
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,97	100,85	100,63	-0,02	-0,22	-0,34	~0	-0,02
Kesehatan	100,66	100,74	100,45	0,11	-0,29	-0,21	~0	~0
Transportasi	109,03	109,78	110,47	0,24	0,63	1,32	0,03	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,03	100,04	99,95	-0,01	-0,09	-0,08	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,80	102,81	102,52	-0,01	-0,28	-0,27	~0	~0
Pendidikan	100,46	100,57	100,85	0,08	0,28	0,39	~0	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,46	103,74	105,55	0,03	1,74	3,02	~0	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,18	103,15	106,71	0,26	3,45	4,43	0,02	0,31

Ket :  
1) Perubahan IHK bulan Mei 2024 terhadap IHK Desember 2023  
2) Perubahan IHK bulan Mei 2024 terhadap IHK bulan Desember 2023  
3) Perubahan IHK bulan Juni 2024 terhadap IHK bulan Juni 2023  
4) ~0: Data sangat kecil/mendekati nol  
5) Sumber : BPS Sulteng (2024)

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2024, antara lain: ikan cakalang, cabai merah, ikan selar, cabai rawit, sepeda motor, emas perhiasan, ikan kembung, minyak goreng, wortel, Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan ekor kuning, dan ikan lajang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: beras, tomat, bawang merah, telur ayam ras, tempe, kangkung, ikan katamba, angkutan udara, bawang putih, udang basah, dan ikan Malalugis/ ikan Sorihi.

Pada Bulan Juni Tahun 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,07 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,31 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen serta kelompok

pendidikan sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan kelompok kesehatan tidak memberikan andil/ sumbangan yang signifikan terhadap inflasi *y-on-y* provinsi.

Perbandingan inflasi antar tahun di Bulan Juni 2024 (*y-on-y*) Sulawesi Tengah sebesar 2,82 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,38 persen, sedangkan tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,18 persen (Tabel 3.4).

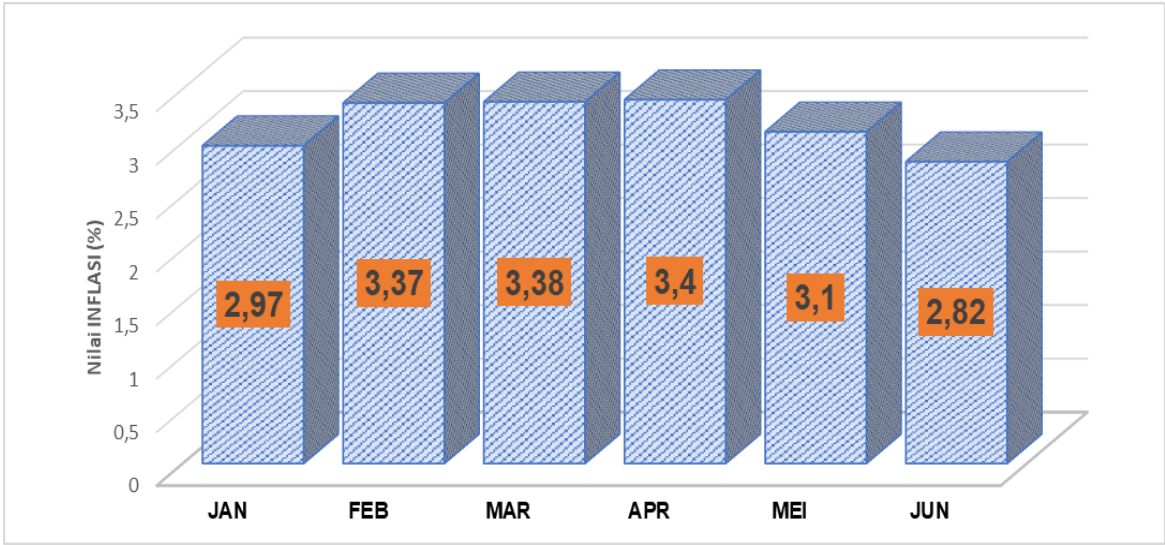
Tabel 3.4  
Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Sulawesi Tengah bulan Juni, 2024 (Persen)

Tingkat Inflasi		2024
(1)	(2)	
<i>Month to Month (m-to-m)</i>	0,18	
<i>Year to Date (y-to-d)</i>	1,38	
<i>Year on Year (y-on-y)</i>	2,82	

Sumber : BPS Sulteng (2024)

Adapun perkembangan tingkat inflasi year on year (*y-on-y*) Sulawesi Tengah pada Bulan Juni 2024 (persen) disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5  
Tingkat Inflasi Year on Year (*y-on-y*)  
Provinsi Sulawesi Tengah bulan Juni 2024 (Persen)



Sumber : BPS Sulteng (2024)

Pada Juni 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 4 kabupaten/ kota mengalami inflasi *y-on-y*. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 4,51 persen dengan IHK sebesar 112,48 dan terendah terjadi di Kota Palu sebesar 2,28 persen dengan IHK sebesar 105,76. (lihat Tabel 3.5).

Tabel 3.5  
Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Juni 2024 Kabupaten/Kota di  
Provinsi Sulawesi Tengah (2022=100)

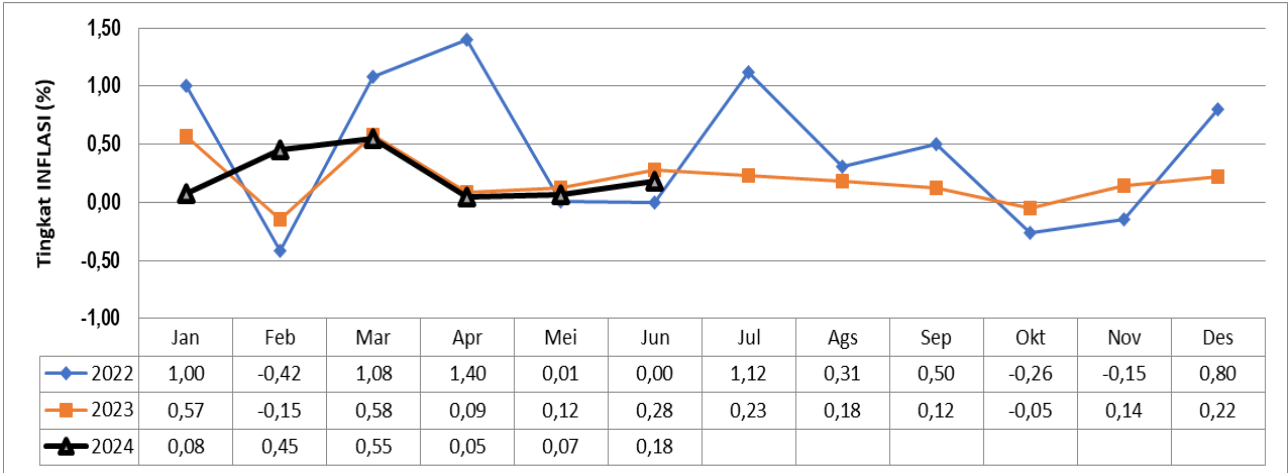
KOTA	Bulan Juni 2024		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Luwuk	107,93	3,06	0,29
Kabupaten Morowali	107,78	3,09	-0,20
Kabupaten Toli-Toli	112,48	4,51	0,48
Kota Palu	105,76	2,28	0,18
PROVINSI	107,26	2,82	0,18

Sumber : BPS Sulteng (2023)

Tingkat inflasi kalender Sulawesi Tengah mengalami angka yang fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2024. Ber-fluktuatif disebabkan oleh dampak global akibat perubahan iklim seperti bencana El-Nino yang berdampak pada gagal panen dan masih terpengaruhnya dengan konflik antar 2 (dua) negara Ukraina-Rusia yang memberikan dampak pada perubahan harga BBM dan pangan asal gandum. Adapun tingkat inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami trend kenaikan akibat akumulasi dampak bencana alam, gagal panen dan kenaikan harga barang-barang pokok tertentu dan terus berlanjut hingga pada awal tahun 2024 inflasi sebesar 2,35 persen (*y-on-y*). Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah, hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

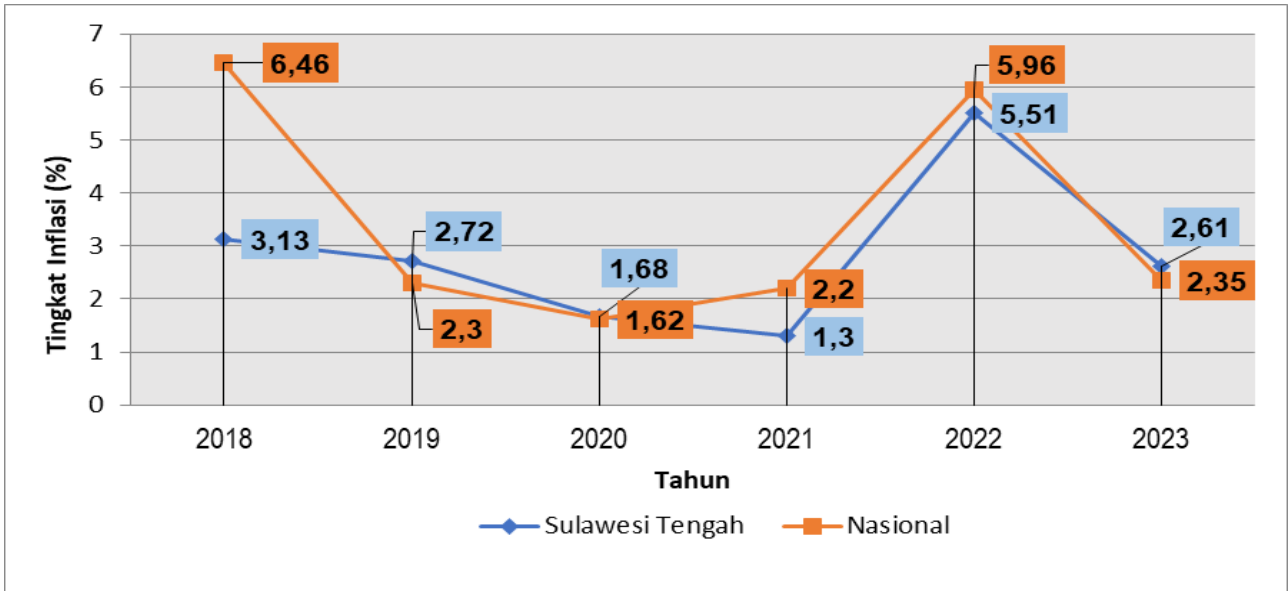
Terkendalinya tingkat inflasi di Sulawesi Tengah baru dirasakan pada bulan Januari tahun 2024 sebesar 0,08 persen (*m-to-m*), keberhasilan ini dikarenakan pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah berhasil menjaga dan memenuhi ketersediaan komoditas utama untuk kebutuhan masyarakat melalui langkah koordinasi dan sinergitas antar instansi selain langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan stok komoditas utama. Tingkat inflasi kalender Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar 3.6 dan tingkat inflasi tahunan Sulawesi Tengah berbanding Nasional pada Gambar 3.6 berikut ini:

Gambar 3.6  
Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalender Gabungan 2 Kota  
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Sulteng (2023)

Gambar 3.7  
Perkembangan Tingkat Inflasi (persen) Sulawesi Tengah Berbanding  
Nasional Tahun 2018-2023



Keterangan : Semenjak tahun 2020 perhitungan Inflasi gabungan dilakukan pada 2 kota.  
Sumber : BPS Sulteng (2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diproyeksikan inflasi pada RKPD tahun 2024 yang berkisar sebesar 2,18 persen akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 0,05 – 0,07 persen.

D. TPT dan TPAK

Pada bulan Februari tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah sebesar 3,15 persen. Angka ini menurun sebesar 0,35 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 1.575,28 ribu orang, turun 23,00 ribu orang dibanding Februari 2023. Penurunan jumlah angkatan kerja berbanding lurus dengan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang turun sebesar 1,66 persen poin.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 1.525,66 ribu orang penduduk yang bekerja dan 49,62 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan kondisi Februari 2023, jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 23,00 ribu orang. Penduduk bekerja menurun sebanyak 16,82 ribu



orang dan pengangguran menurun sebanyak 6,18 ribu orang. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 2.298,59 ribu orang, naik sebanyak 21,49 ribu orang jika dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.575,28 ribu orang (68,53 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK mengalami penurunan dibanding Februari 2023. TPAK pada Februari 2024 sebesar 68,53 persen, turun sebesar 1,66 persen poin dibanding Februari 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,92 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,17 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 3,96 persen poin.

Tabel 3.6  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja  
Februari 2022-Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.237,78	2.277,10	2.298,59	39,32	1,76	21,49	0,94
Angkatan Kerja	1.585,68	1.598,28	1.575,28	12,60	0,79	-23,00	-1,44
- Bekerja	1.527,43	1.542,48	1.525,66	15,05	0,99	-16,82	-1,09
- Pengangguran	58,26	55,80	49,62	-2,46	-4,22	-6,18	-11,08
Bukan Angkatan Kerja	652,10	678,82	723,31	26,72	4,10	44,49	6,55
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,86	70,19	68,53	-0,67		-1,66	
- Laki-Laki	85,91	85,43	85,92	-0,48		0,49	
- Perempuan	54,96	54,13	50,17	-0,83		-3,96	

Sumber : BPS Sulteng (2024)

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 40,97 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,86 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,74 persen. Dominasi lapangan pekerjaan hampir sama baik untuk Februari 2023 maupun Februari 2024 (BPS Sulteng, 2024).

Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,35 ribu orang); Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (6,37 ribu orang); dan Aktivitas Profesional dan Perusahaan (5,67 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Aktivitas Jasa Lainnya (21,94 ribu orang); Jasa Pendidikan (14,49 ribu orang); dan Perdagangan Besar dan Eceran (13,55 ribu orang) (BPS Sulteng, 2024).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 3,15 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 2,14 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,98 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,80 persen poin dibandingkan Februari 2023, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Februari 2023. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 4,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan 2,25 persen. TPT perkotaan dan pedesaan memiliki pola yang sama dengan TPT nasional, yaitu turun dibandingkan Februari 2023, masing-masing sebesar 0,36 persen poin dan 0,48 persen poin.

Tabel 3.7  
Karakteristik Pengangguran Sulawesi Tengah  
Februari 2022-Februari 2023

Karakteristik Pengangguran	Perubahan				
	Februari 2022 (%)	Februari 2023 (%)	Februari 2024 (%)	Feb 2022- Feb 2023	Feb 2023- Feb 2024
				(% poin)	(% poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,67	3,49	3,15	-0,18	-0,34
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	3,35	2,94	2,14	-0,41	-0,8
- Perempuan	4,21	4,4	4,98	0,19	0,58
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	5,23	5,17	4,81	-0,06	-0,36
- Pedesaan	3,03	2,73	2,25	-0,3	-0,48

Sumber : BPS Sulteng (2024)

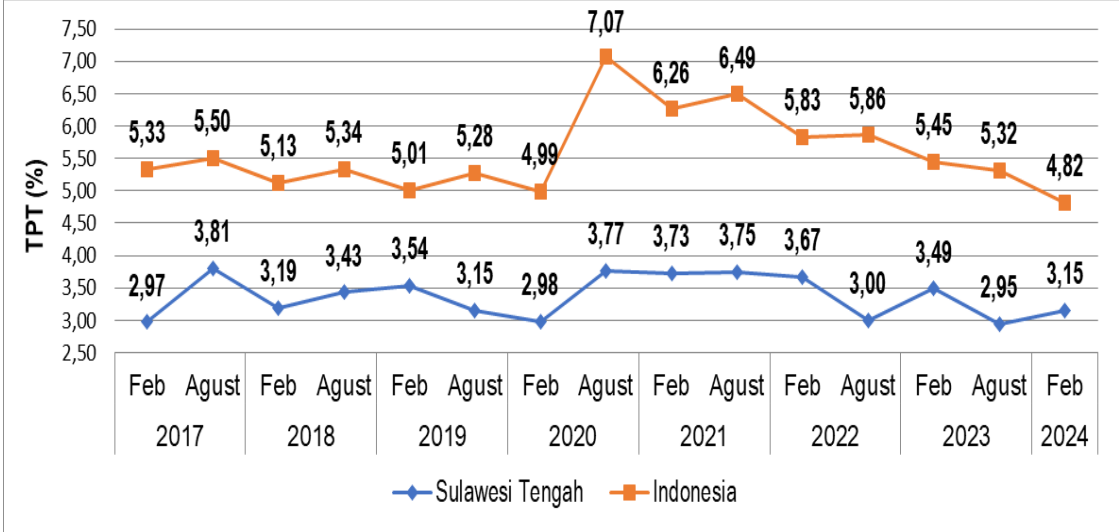
Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang



pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,84 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 1,83 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPT kategori pendidikan SD ke bawah, SMA, dan Diploma mengalami penurunan TPT masing-masing sebesar 0,21 persen poin, 2,06 persen poin, dan 1,45 persen poin. Sementara itu, tingkat pendidikan SMP, SMK, dan universitas mengalami kenaikan TPT, dengan kenaikan terbesar adalah tingkat pendidikan SMK sebanyak 1,27 persen poin.

Adapun perkembangan TPT Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan *trend* yang fluktuatif tetapi angka TPT Sulawesi Tengah masih cukup baik karena berada di bawah rata-rata Nasional (Gambar 3.8).

Gambar 3.8  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Feb 2017 – Feb 2024



Sumber : BPS Sulteng, 2024

Berdasarkan asumsi diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya pada RKPD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 2,61-2,84 akan mengalami perubahan menjadi 2,61 – 3,10 persen pada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

E. Kemiskinan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,77 persen atau sebanyak 379,76 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 8,9 persen, turun menjadi 8,61 persen pada Maret 2024. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2023 sebesar 14,09 persen, turun menjadi 13,33 persen pada Maret 2024. Jika dibandingkan dengan Bulan Maret tahun 2023, jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret Tahun 2024 di daerah perkotaan turun sebanyak 0,2 ribu orang (dari 92,11 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 91,92 ribu orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin

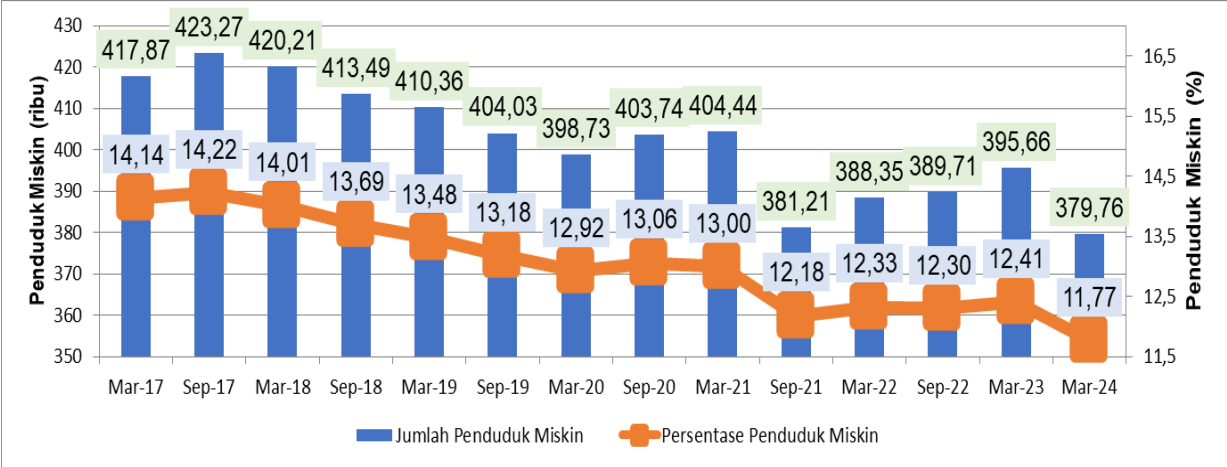
di daerah perdesaan turun sebanyak 15,7 ribu orang (dari 303,55 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 287,84 ribu orang pada Maret 2024).

Secara umum, pada periode Maret 2017-Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, walaupun pada periode Maret 2017 hingga September 2017 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan. Kemiskinan Maret 2024 sebesar 11,77 persen menjadi sejarah baru dimana kemiskinan Sulawesi Tengah pertama kali berada di bawah angka 12 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan Maret 2024 ditunjukkan oleh Gambar 3.10.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2024 mencapai 379,76 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 15,9 ribu orang dibandingkan Maret 2023, dan jika dibandingkan keadaan September 2022 jumlah penduduk miskin tersebut juga turun sebanyak 9,95 ribu orang . Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,77 persen, menurun sebesar 0,64 persen poin terhadap Maret 2023 dan 0,53 persen poin terhadap September 2022 (Gambar 3.9).

Jika dilihat dari tempat tinggal, pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,2 ribu orang, dan di daerah perdesaan turun sebesar 15,7 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,9 persen menjadi 8,61 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 14,09 persen menjadi 13,33 persen (tabel 3.8).

Gambar 3.9  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan  
Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2017–Maret 2024



Sumber : BPS Sulteng, 2024

Tabel 3.8  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
September 2022 - Maret 2024

Daerah	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
	September 2022	92,93	9,13
	Maret 2023	92,11	8,90
	Maret 2024	91,92	8,61
Pedesaan			
	September 2022	296,77	13,79
	Maret 2023	303,55	14,09
	Maret 2024	287,84	13,33
Total			
	September 2022	389,71	12,30
	Maret 2023	395,66	12,41
	Maret 2024	379,76	11,77

Sumber : BPS Sulteng, 2024

Perbandingan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin diantara provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, maka secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 379,76 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan pedesaan. Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 11,77 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 8,61 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk pedesaan sebesar 13,33 persen merupakan tertinggi ketiga setelah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara (Tabel 3.9).

Tabel 3.9  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi,  
Maret 2024

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	67,89	118,97	186,85	4,75	10,35	7,25
Sulawesi Tengah	91,92	287,94	379,76	8,61	13,33	11,77
Sulawesi Selatan	219,65	516,83	736,48	5,08	10,74	8,06
Sulawesi Tenggara	82,61	237,10	319,71	7,45	13,60	11,21
Gorontalo	25,46	152,53	177,99	4,57	22,97	14,57
Sulawesi Barat	27,24	134,95	162,19	9,29	11,70	11,21
Indonesia	11.637,37	13.581,84	25219,20	7,09	11,79	9,03

Sumber : BPS Sulteng, 2024

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024. Selama periode Maret 2023 – Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,74 persen, yaitu dari Rp568.248,- per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp600.872,- per kapita per bulan pada Maret 2024. Sementara pada periode September 2022 - Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,84 persen, yaitu dari Rp. 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022 menjadi Rp. 600.872,- per kapita per bulan pada Maret 2024. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 sebesar 75,46 persen.

Pada Maret 2024, komoditi makanan dan bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 23,27 persen di perkotaan dan 27,40 persen di perdesaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK, yakni sebesar 14,50 persen di perkotaan dan 14,68 persen di perdesaan. Komoditi makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah Tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (10,13 persen di perkotaan, dan 9,77 persen di perdesaan), diikuti bensin, pendidikan, listrik, dan perlengkapan mandi.

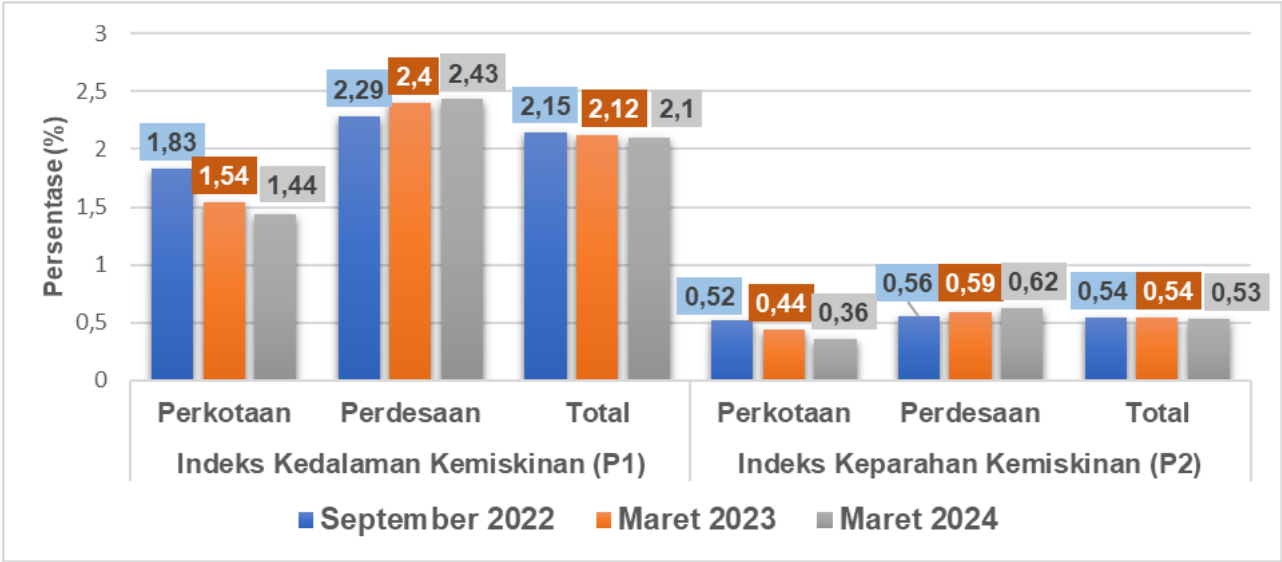
Perihal lain yang merupakan perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 adalah 2,117 turun menjadi 2,103 pada Maret 2024, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2023 adalah 0,544 turun menjadi 0,531 pada Maret 2024 (Gambar 3.10).

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,44 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,43. Sementara itu nilai Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,36, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,62.

Gambar 3.10  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  
Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2022-Maret 2024



Sumber : BPS Sulteng 2024

Berdasarkan pada angka presentase kemiskinan diatas, proyeksi angka kemiskinan Sulawesi Tengah yang semula pada RKPD tahun 2024 sebesar 10,30-12,26 persen akan mengalami perubahan menjadi 11,00 – 12,00 persen pada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Selanjutnya didasarkan pada data, informasi dan Analisa data-data tersebut di atas disimpulkan perubahan target indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Capaian, Target, RPJMD, RKPD 2024 dan Perubahan RKPD  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN (BPS)			TARGET RPJMD	TARGET RKPD 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
		2022	2023	SEMESTER I TAHUN 2024	2024		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	15,17	11,91	10,49 (Truwulan I-2024)	10,80	13,70 - 15,30	10,85 - 12,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,33 (Maret 2022)	12,41 (Maret 2023)	11,77 (Maret 2024)	9,65	10,30 – 12,26	11,00 – 12,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,67 (Feb 2022)	3,49 (Feb 2023)	3,15 (Feb 2024)	2,54	2,61 - 2,84	2,61 - 3,10
4	Indeks Gini	0,308 (Maret 2022)	0,304 (Maret 2023)	0,301 (Maret 2024)	0,19	0,302 – 0,303	0,300 – 0,301
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	71,01	71,66	-	70,00	71,27-71,39	71,66 - 72,15
6	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	105,55	112,46	-	73,79	107,00	112,46- 115,0

### 3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Perubahan Kerangka Pendapatan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 5.959.603.970.639,00 .- Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 2.059.942.177.139,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 171.719.035.000,00 ,- dari target semula menjadi Rp. 2.231.661.212.139,00,-. Kontribusi Pendapatan Transfer juga turut mengalami peningkatan sebesar Rp.637.826.265.000,00,- sehingga menjadi sebesar Rp. Rp 3.725.365.002.000,00,. dari target sebelumnya yang hanya sebesar Rp. Rp 3.087.538.737.000,00 ,-. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dengan jumlah sebesar Rp. 2.577.756.500,00 tidak mengalami kenaikan dari target semula.

Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11  
Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	TARGET RKPD TA 2024	TARGET APBD TA 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD TA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.988.452.858.664,55</b>	<b>2.059.942.177.139,00</b>	<b>2.231.661.212.139,00</b>	<b>171.719.035.000,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	<b>1.430.000.000.000,00</b>	<b>Rp 1.450.000.000.000,00</b>	<b>Rp 1.609.000.000.000,00</b>	<b>159.000.000.000,00</b>
	PKB		Rp 337.000.000.000,00	Rp 340.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	BBNKB		Rp 395.000.000.000,00	Rp 395.000.000.000,00	-
	PBBKB		Rp 395.000.000.000,00	Rp 550.000.000.000,00	155.000.000.000,00
	PAP		Rp 73.000.000.000,00	Rp 74.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	PAJAK ROKOK		Rp 250.000.000.000,00	Rp 250.000.000.000,00	-
1.1.2	Retribusi Daerah	<b>25.780.965.000,00</b>	<b>Rp 25.780.965.000,00</b>	<b>Rp 17.500.000.000,00</b>	<b>- 8.280.965.000,00</b>
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	<b>230.100.000.000,00</b>	<b>Rp 230.100.000.000,00</b>	<b>212.100.000.000,00</b>	<b>- 18.000.000.000,00</b>
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	<b>302.571.893.664,55</b>	<b>Rp 354.061.212.139,00</b>	<b>393.061.212.139,00</b>	<b>39.000.000.000,00</b>
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.875.175.785.000,00</b>	<b>Rp 3.087.538.737.000,00</b>	<b>Rp 3.725.365.002.000,00</b>	<b>Rp 637.826.265.000,00</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	<b>2.875.175.785.000,00</b>	<b>3.087.538.737.000,00</b>	<b>3.725.365.002.000,00</b>	<b>637.826.265.000,00</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	515.000.000.000,00	Rp 699.700.000.000,00	Rp 1.337.526.265.000,00	637.826.265.000,00
	Dana Alokasi Umum	1.547.264.182.000,00	Rp 1.638.594.346.000,00	Rp 1.638.594.346.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus	812.911.603.000,00	Rp 749.244.391.000,00	Rp 749.244.391.000,00	-
	Dana Insentif Daerah				
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>3.974.291.500,00</b>	<b>2.577.756.500,00</b>	<b>2.577.756.500,00</b>	<b>-</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya		-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.867.602.935.164,55</b>	<b>5.150.058.670.639,00</b>	<b>5.959.603.970.639,00</b>	<b>809.545.300.000,00</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024 (diolah).

### 3.2.2. Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang struktur Belanja Daerah yaitu:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp 479.455.977.948,33,- yaitu dari target semula sebesar Rp. 5.771.093.326.188,00,- menjadi Rp 6.250.549.304.136,33,-. Distribusi perubahan target Belanja Daerah Tahun 2024, disajikan pada tabel 3.12 berikut ini:



Tabel 3.12  
Rencana Perubahan Target Belanja Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

NO		URAIAN	TARGET RKPD TA 2024	TARGET APBD TA 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD TA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
a		<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp 3.741.702.039.138,14</b>	<b>Rp 4.026.575.510.640,00</b>	<b>Rp 4.261.521.150.132,33</b>	<b>234.945.639.492,33</b>
	1	Belanja Pegawai	Rp 1.856.272.837.457,43	Rp 2.076.590.534.363,00	Rp 2.072.184.601.047,00	- 4.405.933.316,00
	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.392.779.878.514,71	Rp 1.660.632.723.644,00	Rp 1.863.294.571.991,33	202.661.848.347,33
	4	Belanja Hibah	Rp 384.150.441.256,00	Rp 272.349.803.003,00	Rp 308.236.977.464,00	35.887.174.461,00
	5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 108.498.881.910,00	Rp 17.002.449.630,00	Rp 17.804.999.630,00	802.550.000,00
b		<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 941.694.724.382,00</b>	<b>Rp 1.007.276.988.358,00</b>	<b>Rp 1.148.892.726.514,00</b>	<b>141.615.738.156,00</b>
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp 147.272.198.311,00	147.272.198.311,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp 426.122.962.432,00	426.122.962.432,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			Rp 422.571.961.439,00	422.571.961.439,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			Rp 11.214.866.176,00	11.214.866.176,00
		Belanja Modal Aset Lainnya			Rp 95.000.000,00	95.000.000,00
c		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 2.194.600.300,00</b>	<b>- 7.805.399.700,00</b>
		Belanja Tidak Terduga	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 2.194.600.300,00	- 7.805.399.700,00
d		<b>Belanja Transfer</b>	<b>Rp 725.240.827.193,00</b>	<b>Rp 727.240.827.190,00</b>	<b>Rp 837.940.827.190,00</b>	<b>110.700.000.000,00</b>
		Belanja Bagi Hasil Pajak kepada				
	1)	Kabupaten/Kota	Rp 706.140.827.193,00	Rp 708.140.827.190,00	Rp 817.840.827.190,00	109.700.000.000,00
	2)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Rp 19.100.000.000,00	Rp 19.100.000.000,00	Rp 20.100.000.000,00	1.000.000.000,00
		<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>Rp 5.418.637.590.713,14</b>	<b>Rp 5.771.093.326.188,00</b>	<b>Rp 6.250.549.304.136,33</b>	<b>Rp 479.455.977.948,33</b>
		<b>Surplus Defisit</b>	<b>-Rp 551.034.655.548,59</b>	<b>-Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>-Rp 290.945.333.497,33</b>	<b>Rp 330.089.322.051,67</b>

Sumber: BPKAD, 2024 (diolah)

### 3.2.3. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah

Jumlah pembiayaan netto mengalami penurunan dari Rp. 621.034.655.549,00,- menjadi Rp. 290.945.333.497,33,- atau turun sebesar Rp. 330.089.322.051,67,-. penurunan ini disebabkan oleh target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang mengalami penurunan, sedangkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tidak dialokasikan. Uraian perubahan target pembiayaan daerah tahun 2024, disajikan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13  
Rencana Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	TARGET RKPD TA 2024	TARGET APBD TA 2024	PROYEKSI PERUBA RKPD TA 2024
3.1	Penerimaan pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	Rp 551.034.655.548,59	Rp 621.034.655.549,00	Rp 290.945.333.4
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 551.034.655.548,59</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 290.945.333.4</b>
3.2	Pengeluaran pembiayaan			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp 551.034.655.548,59</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 290.945.333.4</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp

Sumber: BPKAD, 2024 (diolah)

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 dimana periode 2020-2024 merupakan periode terakhir RPJPN 2020- 2025 yang selanjutnya diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Gambar 4.1  
Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dalam rangka pencapaian Visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, terdapat 5 arahan utama Presiden Joko Widodo terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



*Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.*

## 1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

## 2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

## 3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

## 4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

## 5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 4.2  
Arahan Presiden dalam Pelaksanaan Misi Nawacita  
dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045

#### 4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**, dengan serangkaian misi:

- a. meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- b. mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
- c. mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
- d. mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
- e. menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
- f. menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
- g. melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga;
- h. meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
- i. mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Visi pembangunan ini masih dapat merujuk pada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **"Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"**. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sendiri mengusung Tema pembangunan nasional yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Sedangkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, adalah **"Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing"**.

Sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;</b>	<b>Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayanan Kesehatan Dasar yang merata</b>		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,66 – 72,15
			Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,6987-0,6997
			Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,7617-0,7627
			Meningkatnya konsumsi perkapita	Indeks Pengeluaran perkapita	Indeks	0,6959-0,6969
			Meningkatnya konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita	Rp. (Ribu)	1,210
			Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budayalokal	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)	Indeks	49,71
2	<b>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;</b>	<b>Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>)</b>		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,67-64,52
				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,14

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Nilai SAKIP	Angka	81,00-82,50
				Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	baik
				Status Kinerja LPPD	Status	Tinggi
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	4.000
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,69
				Indeks profesionalitas ASN	Indeks (Interval)	71-80
			Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (Interval)	89-91
3	<b>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;</b>	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui produktivitas sektor unggulan daerah</b>		Pertumbuhan Ekonomi	%	10,85 – 12,00
			Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah	%	19,93
			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	24,90
			Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp (triliun)	37,75



Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	PAD terhadap total pendapatan	%	37,97
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,50
		<b>Menurunkan kemiskinan</b>		Persentase penduduk miskin	%	11,00 – 12,20
			Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	8,61
				Persentase penduduk miskin perdesaan	%	13,33
			Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa; Meningkatkan kemandirian PMKS	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.6872
				Persentase PMKS yang mandiri	%	0,21
			Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	46,994
		<b>Menurunkan pengangguran</b>		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,61 – 3,10
			Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio Penduduk Bekerja	%	0.9725

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah;</b>		Indeks Infrastruktur Daerah (IID)	Indeks	65,43
				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	73,32
				Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	50,96
				Persentase Desa Teraliri Listrik	%	100
				Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	Rasio konektivitas provinsi	0.604
5	<b>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;</b>	<b>Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan</b>		Indeks Williamson	Indeks	0,75
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,63
			Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,301 – 0,302
				Inflasi	%	2,18
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	78
	<b>Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama manusia sebagai</b>	<b>Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan</b>		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,48

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>wujud Pembangunan Berkelanjutan;</b>	<b>berkelanjutan, serta Tangguh terhadap bencana</b>				
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	22
			Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	0.38
				Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	90.59
				Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	87,06
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	72,81
				Emisi gas rumah kaca	Juta ton CO <sub>2</sub> eq	199.684,41
			Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,46
7	<b>Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga;</b>	<b>Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi</b>		Tingkat efektivitas kerja sama daerah	%	100
			Meningkatnya kerja sama antar daerah	MoU (Perjanjian kerja sama)	Angka (MoU)	14

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
8	<b>Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital;</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan perpustakaan</b>		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00
			Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks	95,81
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,50
9	<b>Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.</b>	<b>Mewujudkan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru</b>		Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100
			Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	Dokumen	2

Secara terperinci, pencapaian masing-masing misi melalui serangkaian tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan Tabel 4.1 terlihat melalui cascading yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Penjabaran indikator tujuan dan sasaran dari 9 misi tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

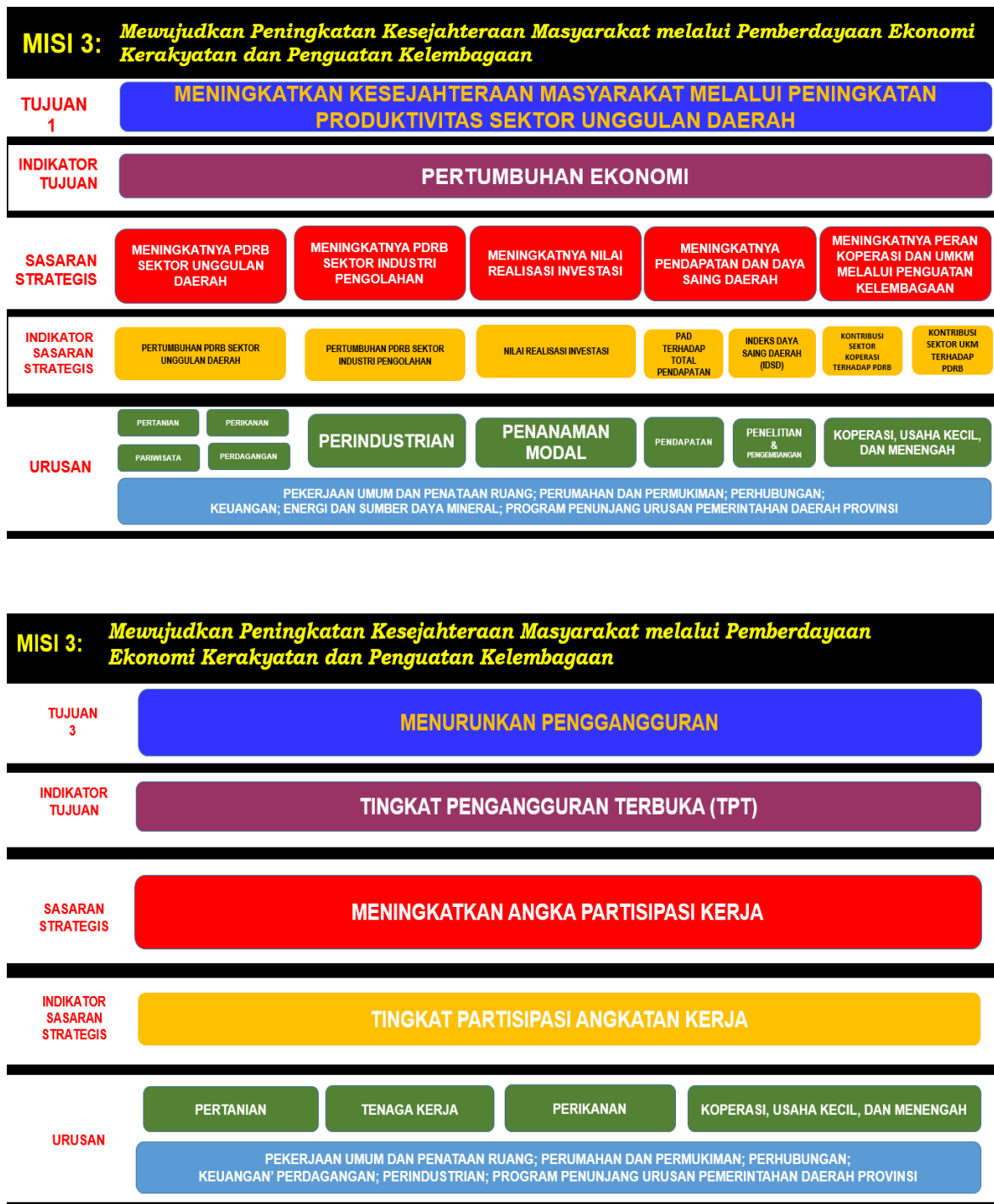
**Gambar 4.3**  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 1



**Gambar 4.4**  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 2



Gambar 4.5  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi  
3





**Gambar 4.6**  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 4



**Gambar 4.7**  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 5

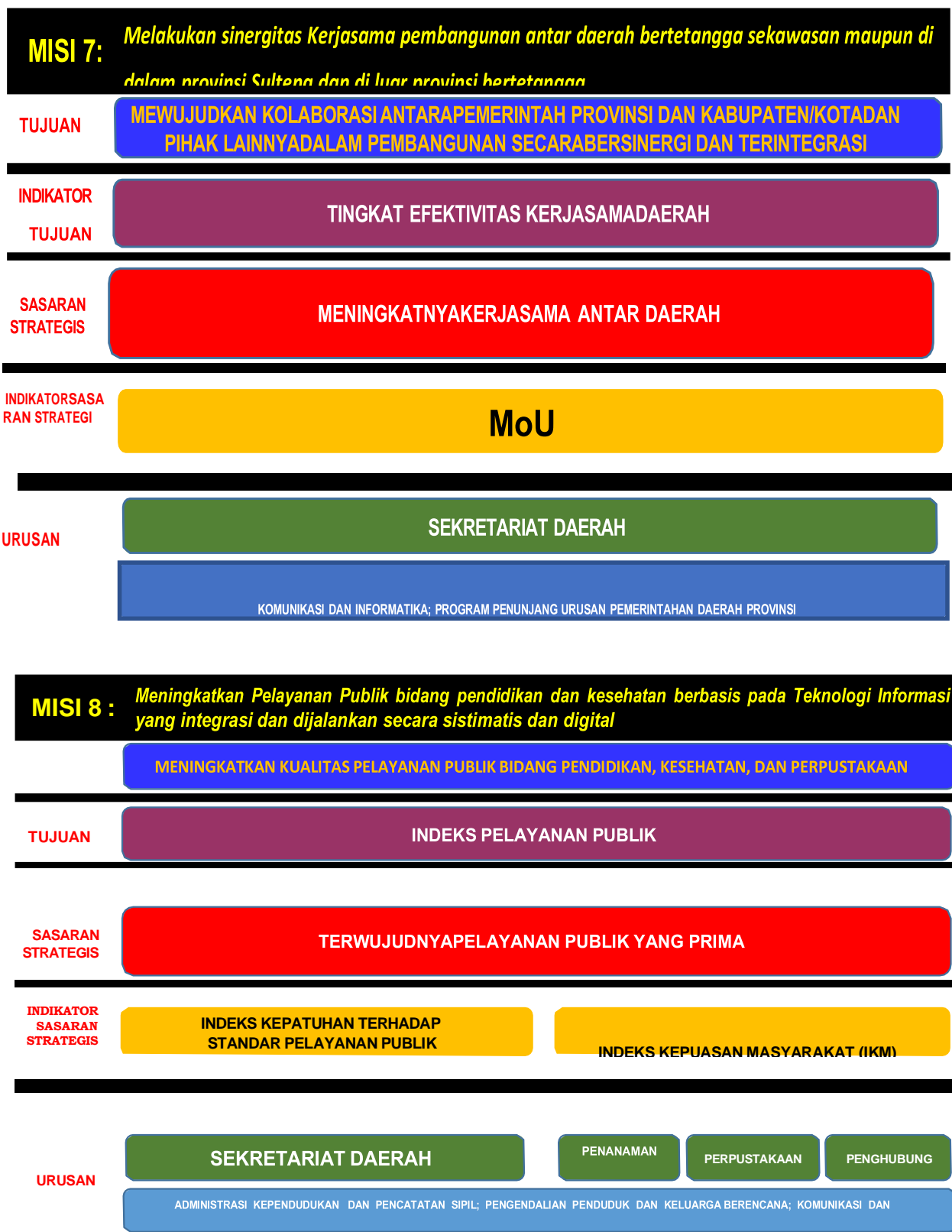


**Gambar 4.8**  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 6





Gambar 4.9  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 7



Gambar 4.10  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 8



Gambar 4.11  
Indikator Sasaran Strategis Pencapaian Misi 9

Berdasarkan analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) serta isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan pilihan strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026, strategi yang akan ditempuh dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 berdasarkan Misi disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026

**Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>		
<b>Tujuan 1.1</b> Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	<b>Sasaran 1.1.1</b> Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	<b>Strategi 1.1.1.1</b> Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum, kejuruan, Vokasi dan pendidikan khusus;
		<b>Strategi 1.1.1.2</b> Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		<b>Strategi 1.1.1.3</b> Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
	<b>Sasaran 1.1.2</b> Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	<b>Strategi 1.1.2.1</b> Meningkatkan status gizi masyarakat dan jaminan kesehatan ibu hamil dan balita
		<b>Strategi 1.1.2.2</b> Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		<b>Strategi 1.1.2.3</b> Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
		<b>Strategi 1.1.2.2</b> Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan pelaksanaan upaya kesehatan
	<b>Sasaran 1.1.3</b> Meningkatnya konsumsi perkapita	<b>Strategi 1.1.3.1</b> Meningkatkan nilai produksi lahan

	<b>Sasaran 1.1.4</b> Meningkatnya pelestarian nilai budaya lokal	<b>Strategi 1.1.4.1</b> Meningkatkan pelestarian nilai budaya lokal
	<b>Sasaran 1.1.5</b>	<b>Strategi 1.1.3.1</b> Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>		
	Meningkatnya peran pemuda dan daya saing olahraga	<b>Strategi 1.1.3.2</b> Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM</b>		
<b>Tujuan 2.1</b> Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	<b>Sasaran 2.1.1</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	<b>Strategi 2.1.1.1</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah
		<b>Strategi 2.1.1.2</b> Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
		<b>Strategi 2.1.1.3</b> Menerapkan pola karir ASN
		<b>Strategi 2.1.1.4</b> Memberikan reward and punishment terhadap ASN
	<b>Sasaran 2.1.2</b> Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	<b>Strategi 2.1.2.1</b> Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non-litigasi dan HAM

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</b>		
<b>Tujuan 3.1</b> Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	<b>Sasaran 3.1.1</b> Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	<b>Strategi 3.1.1.1</b> Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah
	<b>Sasaran 3.1.2</b> Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	<b>Strategi 3.1.2.1</b> Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
	<b>Sasaran 3.1.3</b> Meningkatnya nilai realisasi investasi	<b>Strategi 3.1.3.1</b> Meningkatkan Nilai realisasi investasi
	<b>Sasaran 3.1.4</b> Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	<b>Strategi 3.1.4.1</b> Meningkatkan PAD terhadap total pendapatan
		<b>Strategi 3.1.4.2</b> Meningkatkan Daya Saing Daerah
	<b>Sasaran 3.1.5</b> Meningkatnya peran koperasi dan UMKM	<b>Strategi 3.1.5.1</b> Meningkatkan Kontribusi Sektor Koperasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</b>		
	melalui penguatan kelembagaan	<b>Strategi 3.1.5.2</b> Meningkatkan Kontribusi SektorUKM
<b>Tujuan 3.2</b> Menurunk an kemiskina n	<b>Sasaran 3.2.1</b> Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	<b>Strategi 3.2.1.1</b> Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja
		<b>Strategi 3.2.1.2</b> Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi
	<b>Sasaran 3.2.2</b> Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	<b>Strategi 3.2.2.1</b> Meningkatkan kinerja pembangunan desa
	<b>Sasaran 3.2.3</b> Meningkatnya kemandirian PMKS	<b>Strategi 3.2.3.1</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomidan pemberdayaan
	<b>Sasaran 3.2.4</b> Menurunnya daerah rawan pangan	<b>Strategi 3.2.4.1</b> Meningkatkan ketersediaan pangan
<b>Tujuan 3.3</b> Menurunkan penganggura n	<b>Sasaran 3.3.1</b> Meningkatkan angkapartisipasi kerja	<b>Strategi 3.3.1.1</b> Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>		
<b>Tujuan 4.1</b> Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	<b>Sasaran 4.1.1</b> Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	<b>Strategi 4.1.1.1</b> Meningkatkan penyediaan jalandan jembatan yang berkualitas
		<b>Strategi 4.1.1.2</b> Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan keciptakarya
		<b>Strategi 4.1.1.3</b> Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi yang berkualitas
	<b>Sasaran 4.1.2</b> Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	<b>Strategi 4.1.2.1</b> Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat dan laut

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>		
		<b>Strategi 4.1.2.2</b> Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</b>		
<b>Tujuan 5.1</b> Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan	<b>Sasaran 5.1.1</b> Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	<b>Strategi 5.1.1.1</b> Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
		<b>Strategi 5.1.1.2</b> Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
	<b>Sasaran 5.1.2</b> Meningkatnya pemberdayaan perempuan	<b>Strategi 5.1.2.1</b> Menguatkan peran perempuan dalam kesetaraan gender

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan</b>		
<b>Tujuan 6.1</b> Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta Tangguh terhadap bencana	<b>Sasaran 6.1.1</b> Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	<b>Strategi 6.1.1.1</b> Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		<b>Strategi 6.1.1.2</b> Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas
	<b>Sasaran 6.1.2</b> Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	<b>Strategi 6.1.2.1</b> Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
		<b>Strategi 6.1.2.2</b> Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga</b>		
<b>Tujuan 7.1</b> Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi	<b>Sasaran 7.1.1</b> Meningkatnya kerjasama antar daerah	<b>Strategi 7.1.1.1</b> Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b><i>Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital</i></b>		
<b>Tujuan 8.1</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan perpustakaan	<b>Sasaran 8.1.1</b> Terwujudnya pelayanan publik yang prima	<b>Strategi 8.1.1.1</b> Meningkatkan standar pelayanan publik

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b><i>Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah</i></b>		
<b>Tujuan 9.1</b> Mewujudkan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru	<b>Sasaran 9.1.1</b> Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	<b>Strategi 9.1.1.1</b> Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerja sama daerah

Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yaitu:

- mengoptimalkan pengelolaan potensi Daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah;
- menjamin Kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah;
- meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pasca bencana;
- merwujudkan peningkatan pendapatan masyarakat;
- menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal;
- mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

## 4.2 **Prioritas Pembangunan Daerah**

### 4.2.1 **Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024**

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020- 2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan 8 arah kebijakan sebagai berikut:



**Gambar 4.12**  
Arah Kebijakan RKP Tahun 2020-2024

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) seperti disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 4.13  
Prioritas Nasional RKP Tahun 2020-2024

Berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 ditetapkan strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

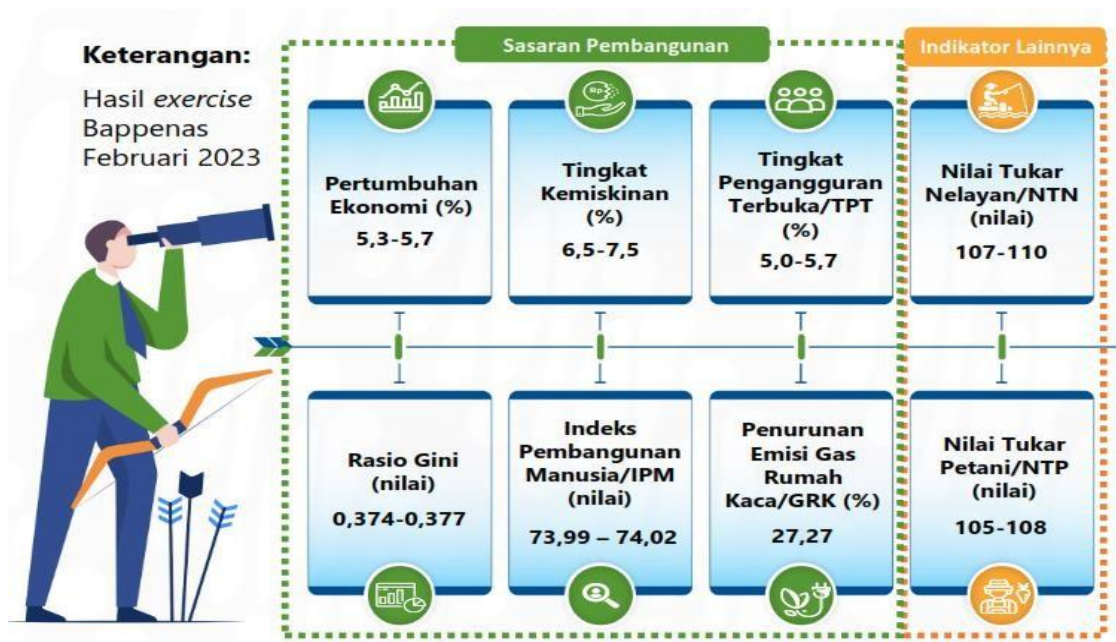
- (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, (b) reformasi sistem perlindungan sosial, (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta (b) optimalisasi pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset, inovasi dan teknologi.
- (4) Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) mewujudkan Investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif, (b) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, (c) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan, dan (d) meningkatkan tata kelola, nilai tambah dan kualitas pariwisata.
- (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon pada lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir), (b) konservasi lahan produktif, dan (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
- (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh, (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air, (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah, (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan). Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastruktur utama.

- (7) Pelaksanaan pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi:
- mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
  - meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
  - mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024; dan
  - mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai ditahun 2024 adalah sebagai berikut:

- pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 (%);
- tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 (%);
- tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0 – 5,7 (%);
- indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99–74,02 (nilai);
- Rasio Gini: 0,374-0,377 (nilai);
- Penurunan Emisi GRK: 27,27 (%);
- Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai): 107-110; dan
- Nilai Tukar Petani/NTP (nilai): 105-108.



Gambar 4.14  
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, tema pembangunan adalah **“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing”**. dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun

Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Sejahtera, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, dan Teknologi Pertanian, Padat Karya, dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024.

## 2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar

provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah hinterland, searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program:

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
  2. Program Pengelolaan Sumber daya Air;
  3. Program Pengembangan Perumahan;
  4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  5. Program Pengelolaan Pelayaran;
  6. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
  7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
3. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.
- Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:
- a. perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill*, *knowledge*, *attitude* dan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya Masyarakat;
  - b. pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan



kesehatan. Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan:

- a. SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin;
- b. Jaminan Kesehatan Gratis;
- c. Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- d. Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program:
  1. Program Pengelolaan Pendidikan;
  2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; dan
  3. Program Konvergensi OPD terkait;

#### 4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan likuifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di

Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan mencapai 14.821,92 ha atau mencapai 821.920 m<sup>2</sup>. Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang pembangunan yang lain guna mengutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya

mewujudkan Sulteng Tangguh, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan:

- a. kabupaten/kota tangguh bencana;
- b. percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas;
- c. peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah;
- d. pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- e. menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air.

Hal tersebut dilakukan melalui program:

- a. Program Penanggulangan Bencana;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Program Penyelenggara Penataan Ruang
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Program Pengelolaan DAS, dan;
- h. Program Pengelolaan Hutan.

Sulteng Sejahtera dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan:

- a. Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin;
- b. Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha, melalui Program :
  1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
  2. Program Pemberdayaan Sosial;
  3. Program Rehabilitasi Sosial;
  4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
  5. Program Pengelolaan SDA;
  6. Program Penyediaan Air Minum;
  7. Program Pengembangan Perumahan;
  8. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
  9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Jalan;
12. Program Pengelolaan DAS;
13. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera;
14. Program Pemberdayaan Sosial;
15. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
16. Program Pembinaan Perpustakaan;
17. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
20. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
21. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
22. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
25. Program Penyuluhan Pertanian;
26. Pengelolaan Pendidikan;
27. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
28. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
29. Pengelolaan Pendidikan;
30. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
31. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
32. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
33. Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
34. Program Pemasaran Pariwisata;
35. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
36. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
38. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
39. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
40. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;

41. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM);
43. Program perencanaan dan pembangunan industri;
44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

## 5. Percepatan Reformasi Birokrasi

Menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi:

- a. manajemen perubahan;
- b. deregulasi kebijakan;
- c. penataan organisasi;

- d. penataan Tatalaksana;
- e. penataan Sumber daya aparatur;
- f. penguatan akuntabilitas;
- g. penguatan pengawasan; dan
- h. peningkatan kualitas pelayanan public. Hal tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4.15  
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana di atas, sesungguhnya merupakan hasil dari analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah, yang kemudian disarikan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan Isu strategis daerah kemudian di rumuskan prioritas daerah sebagai upaya penyelesaian isu di maksud. Keterhubungan antara isu strategis, permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2024

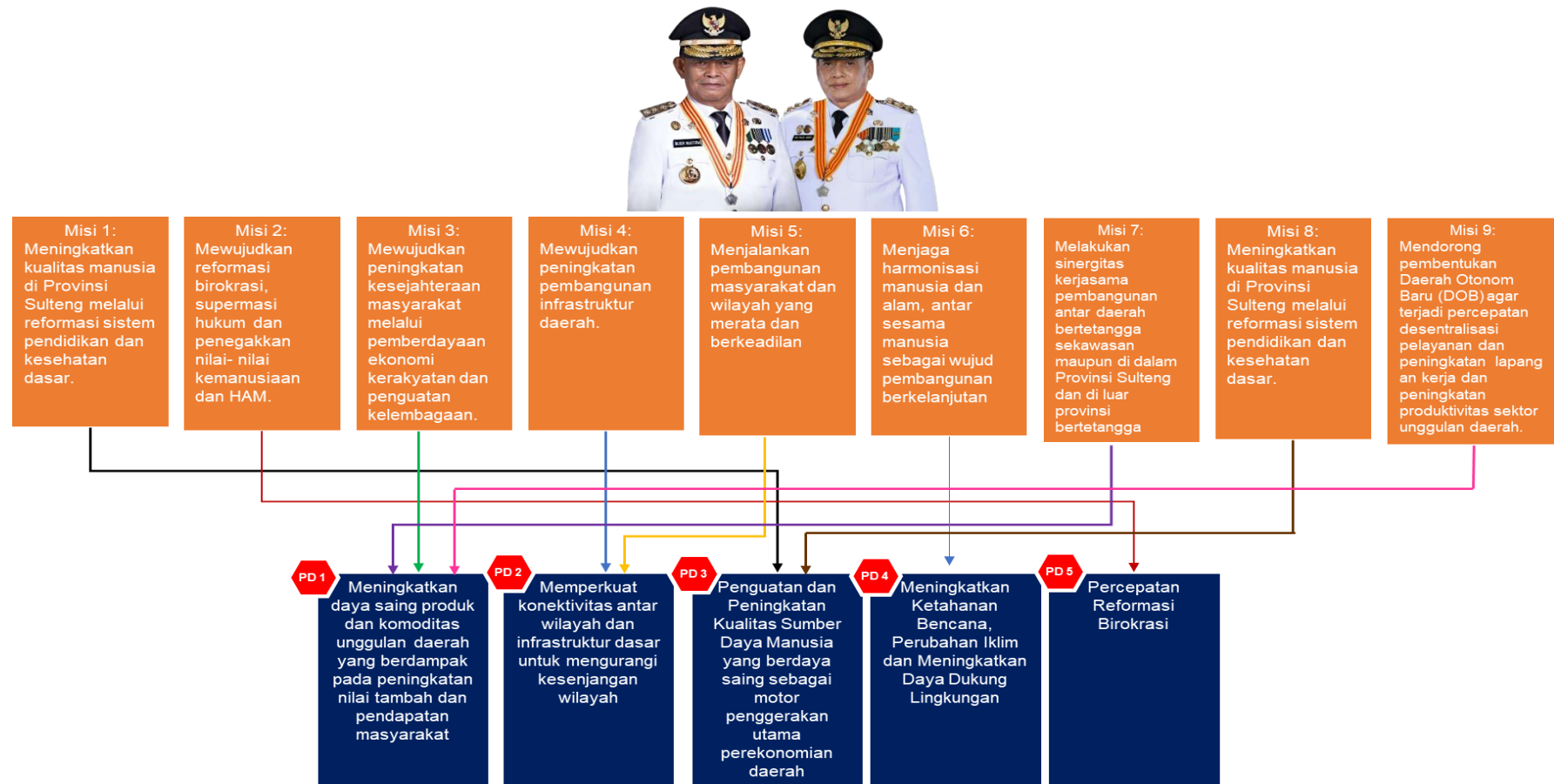
<b>Isu Strategis</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Pencapaian indikator rata-rata lama sekolah yang stagnan	Penguatan dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah
	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang masih kurang	
	Pencapaian Usia Harapan Hidup yang masih di bawah rata-rata nasional	
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	Program Penanggulangan Kemiskinan yang belum terintegrasi	Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat
	Penerima bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan tidak tepat sasaran	
	Rendahnya penyerapan lulusan sekolah vokasi oleh Dunia Industri	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

Stunting	Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang belum sepenuhnya dilaksanakan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.
	Rendahnya cakupan layanan esensial Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah
Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Masih rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Percepatan Reformasi Birokrasi
	Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang belum optimal	
	Kelembagaan Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran	
	Sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang belum optimal	
	Skor Indeks Inovasi Daerah secara relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya	



<b>Isu Strategis</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>
Kesenjangan Wilayah dan Keterbatasan Infrastruktur	Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah
	Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	
	Distribusi sarana pendidikan dan tenaga medis yang kurang merata	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.
Pemanfaatan Ruang	Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan
Ketahanan Pangan dan komoditas unggulan daerah	Produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat
	Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kelautan dan perikanan	
	Tingkat kerawanan pangan yang masih tinggi	

Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan upaya prioritas yang akan dilakukan dalam rangka menuntaskan pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021–2026. Sinkronisasi/keterhubungan antara Misi Kepala Daerah dengan Prioritas Daerah dimaksud sebagaimana pada diagram berikut:



Gambar 4.16  
Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021–2026  
dengan Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

4.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024

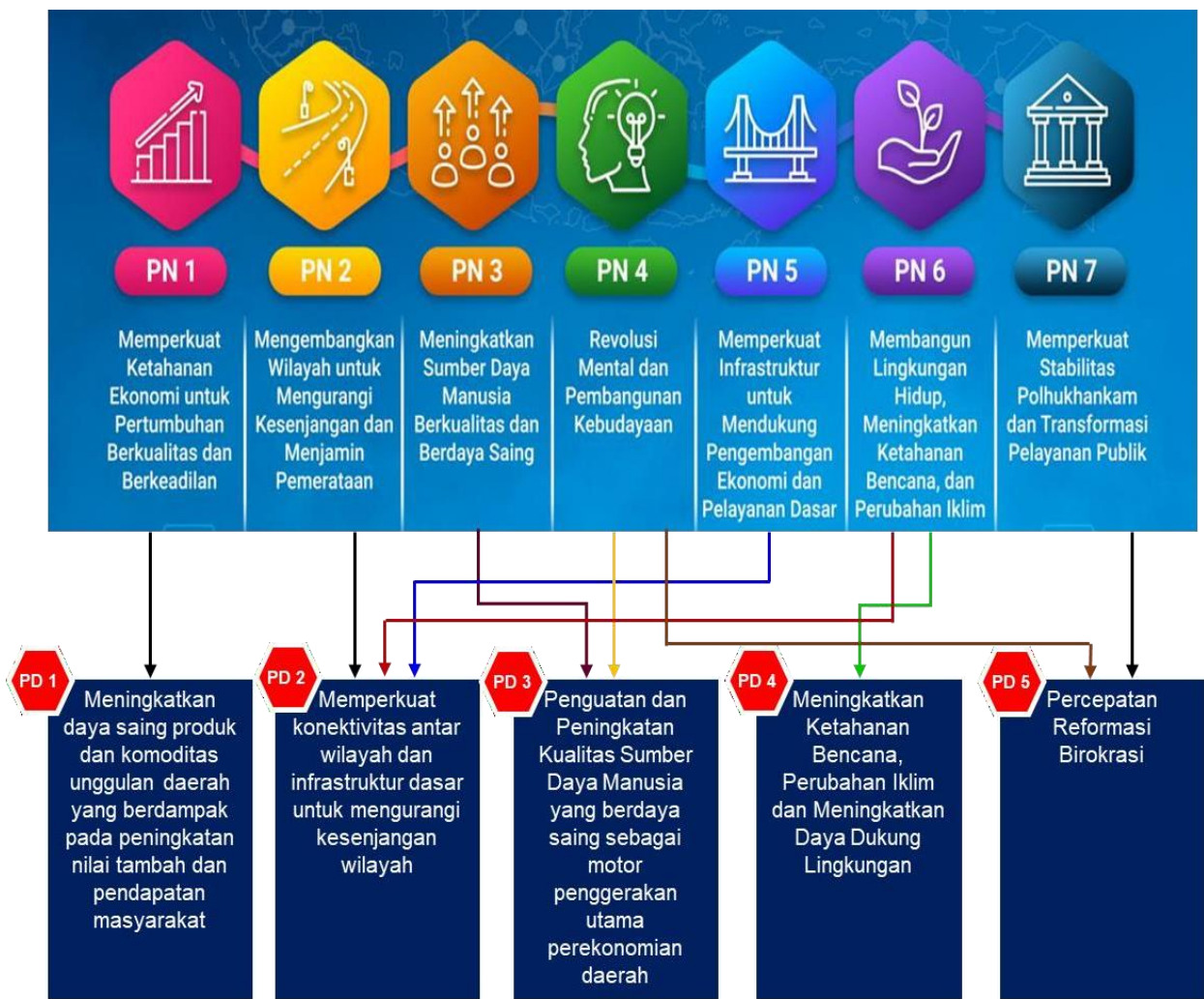
Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sasaran PN RKP Tahun 2024; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun 2024; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD  
Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untukPertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Daya Saing Produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampakpada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangikesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat konektivitas antar wilayah daninfrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah
3	Meningkatkan sumber daya manusiaberkualitas dan berdaya saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pengggerakan Utama Perekonomian Daerah
4	Revolusi mental dan pembangunankebudayaan	Penguatan dan Peningkatan Kualitas SumberDaya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pengggerakan Utama Perekonomian Daerah Percepatan Reformasi Birokrasi
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat konektivitas antar wilayah daninfrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah
6	Membangun lingkungan hidup meningkatkanketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan dayadukung lingkungan  Memperkuat konektivitas antar wilayah daninfrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah
7	Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	Percepatan Reformasi Birokrasi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagaimana di sajikan dalam gambar berikut :



Gambar 4.17  
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Setiap prioritas daerah ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Adapun sasaran daerah berdasarkan masing-masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel berikut :

Batas

Tabel 4.5  
Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Daya Saing Produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.			
	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah	%	19,93
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	24,90
	Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	8,61
		Persentase penduduk miskin perdesaan	%	13,33
	Meningkatnya konsumsi perkapita	Indeks Pengeluaran perkapita	Indeks	0,6959-0,6969
	Meningkatnya konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita	Rp. (Ribu)	1,210
	Meningkatnya peran pemudadan daya saing keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,67-64,52
2.	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	73,32
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	50,96
		Persentase Desa Teraliri Listrik	%	100
	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	Rasio konektivitas provinsi	Rasio	0.604
	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,301 – 0,302
3.	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Penggerak Utama Perekonomian Daerah			
	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,6987-0,6997
	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,7617-0,7627
4.	Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan			
	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	0.38

		Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	90.59
		Indeks kualitas tutupanlahan (IKTL)	Indeks	87,06
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	72,81
		Emisi gas rumah kaca	Juta ton CO <sub>2</sub> eq	199.684,41
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,46
5	Percepatan Reformasi Birokrasi			
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Nilai SAKIP	Angka	81,00-82,50
		Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	baik
		Status Kinerja LPPD	Status	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	4.000
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,69
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks (Interval)	71-80
	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (Interval)	89-91
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks	95,81
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,50



4.3.1 **Keterkaitan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun2024 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024**

Tabel 4.6  
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 denganSasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Sasaran Prioritas NasionalTahun 2024	Sasaran Prioritas Daerah Tahun2024
Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya PDRB Sektor Unggulalandaerah</li><li>- Meningkatnya PDRB Sektor IndustriPengolahan</li><li>- Meningkatnya nilai realisasi investasi</li><li>- Meningkatnya pendapatan dan daya saingdaerah</li><li>- Meningkatnya peran koperasi dan UMKMelalui penguatan kelembagaan</li><li>- Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB</li></ul>
Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya penduduk miskin perkotaan danperdesaan</li><li>- Meningkatnya Penataan AdministrasiPemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa</li><li>- Meningkatnya kemandirian PMKS</li><li>- Menurunnya daerah rawan pangan</li><li>- Terwujudnya pelayanan publik yang prima</li></ul>
Tingkat Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan angka partisipasi kerja</li><li>- Meningkatnya pemberdayaan perempuan</li></ul>
Rasio Gini	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan</li><li>- Meningkatnya pemberdayaan perempuan</li></ul>
Indeks Pembangunan Manusia Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya akses serta kuantitas dankualitas Pendidikan</li><li>- Meningkatnya akses serta kuantitas dankualitas Kesehatan masyarakat</li><li>- Meingkatnya konsumsi perkapita</li><li>- Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budayalokal</li><li>- Meningkatnya peran pemuda dan daya saingkeolahragaan</li></ul>
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terwujudnya keseimbangan pembangunanantar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan</li><li>- Meningkatnya kapasitas ketangguhanterhadap bencana</li></ul>
Nilai Tukar Petani ditargetkan mencapai 103-105sedangkan Nilai Tukar Nelayan 105-107.	<ul style="list-style-type: none"><li>- - Meningkatkan angka partisipasi kerja</li></ul>

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah 2023

Tabel 4.7  
Persandingan Indikator Sasaran PN Tahun 2024 dan  
Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Presentase penanganan daerah rawan pangan
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan(jumlah WPP)	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Rasio Penduduk Bekerja
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kontribusi PDB industri pengolahan(9.2.1*) (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar	Kontribusi Sektor UKM terhadap PDRB
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	Kontribusi Sektor UKM terhadap PDRB
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Nilai realisasi investasi
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Nilai realisasi investasi
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	Persentase Desa Teraliri Listrik
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)
Angka Kecukupan Protein (AKP)(gram/kapita/hari)	Presentase penanganan daerah rawan pangan
Konservasi Kawasan Kelautan(14.5.1*) (juta ha)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)*) (%)	Kontribusi Sektor UKM terhadap PDRB
Pertumbuhan wirausaha (%)	Rasio Penduduk Bekerja
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas(%)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Kontribusi Sektor UKM terhadap PDRB
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	Rasio Penduduk Bekerja
Jumlah tenaga kerja pariwisata(8.9.2*) (juta orang)	Rasio Penduduk Bekerja
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Rasio Penduduk Bekerja
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	Nilai realisasi investasi
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Nilai realisasi investasi
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	Pertumbuhan PDRB Sektor UnggulanNilai realisasi investasi



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	Pertumbuhan PDRB Sektor UnggulanNilai realisasi investasi
Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	Pertumbuhan PDRB Sektor UnggulanNilai realisasi investasi
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Pertumbuhan PDRB Sektor UnggulanNilai realisasi investasi
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Status Kinerja LPPD
Perkembangan status pembangunan desa	Persentase penduduk miskin perdesaanIndeks Desa Membangun (IDM)
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Persentase penduduk miskin perdesaanIndeks Desa Membangun (IDM)
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Indeks Desa Membangun (IDM)
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	Indeks Desa Membangun (IDM)
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Indeks Desa Membangun (IDM)
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayananpublik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) Indeks kepatuhan terhadap standar pelayananpublik
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	PAD terhadap total pendapatan
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayananpublik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayananpublik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaankebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	MoU (Perjanjian kerja sama)
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Indeks Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Indeks Kualitas Kebijakan
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	Indeks Kualitas Kebijakan
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun	Indeks Kesehatan
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks Kualitas Kebijakan
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminansosial (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Presentase PMKS yang mandiri

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)pada balita (%)	Indeks Kesehatan
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Indeks Kesehatan
Prevalensi obesitas pada pendudukumur > 18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	Indeks Kesehatan
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)Membaca (nilai) Sains (nilai)	Indeks Pendidikan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Indeks Pendidikan
Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)(%)	Presentase PMKS yang mandiri
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rasio Penduduk Bekerja
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Indeks Pendidikan
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Indeks Kesehatan
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	Indeks Kesehatan
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Indeks Kesehatan
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Indeks Kesehatan
Prevalensi wasting (kurus dan	Indeks Kesehatan

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
sangat kurus) pada balita (%)	
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Indeks Kesehatan
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Indeks Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Indeks Kesehatan
Persentase puskesmas dengan obatesensial (%)	Indeks Kesehatan
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Indeks Kesehatan
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Indeks Kesehatan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Persentase penduduk miskin perkotaan Persentase penduduk miskin perdesaan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Indeks Pendidikan
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Indeks Pendidikan
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Indeks Pendidikan
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Indeks Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Indeks Pendidikan
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)) (nilai)	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)
Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	Indeks Pembangunan Pemuda
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	Indeks Pembangunan Pemuda
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pendidikan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Indeks Pendidikan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi)	Indeks Pendidikan
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Indeks Pendidikan
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	Indeks Pendidikan
Budaya dan Prestasi Olahraga:	Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Indeks Kesehatan

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	Emisi gas rumah kaca Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Rasio konektivitas provinsi
Rasio Elektrifikasi (%)	Persentase Desa Teraliri Listrik
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Presentase PMKS yang mandiri
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restrorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Rasio konektivitas provinsi
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Persentase Desa Teraliri Listrik
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	Emisi gas rumah kaca
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Emisi gas rumah kaca
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Emisi gas rumah kaca
Persentase penurunan emisi GRK (%)	Emisi gas rumah kaca
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Emisi gas rumah kaca
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks kualitas air (IKA)
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks kualitas udara (IKU)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	Emisi gas rumah kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	Emisi gas rumah kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	Emisi gas rumah kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	Emisi gas rumah kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	Emisi gas rumah kaca
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Kualitas Kebijakan
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Nilai SAKIP
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Indeks Kualitas Kebijakan

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah 2022



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada PN1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8  
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan Prioritas pada PN1

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan		
1	KP : Akselerasi pengembangan pembangkit energiterbarukan	Program Pengembangan danKonservasi Energi Program Pemanfaatan Energi BaruTerbarukan
2	KP : Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	-
3	KP : Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensienergi	Program Pengembangan danKonservasi Energi
4	KP : Peningkatan pemenuhan energi domestik	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
5	KP : Pengembangan industripendukung EBT	Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi danElektronika (ILMATE)
6	KP : Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Program perlindungan tanaman pangan danhortikultura
7	KP : Pengelolaan hutan berkelanjutan	Program Peningkatan ProduksiHasil Hutan Program Peningkatan PengolahanHasil Hutan Program Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
8	KP : Penyediaan air untukPertanian	Program Perencanaan TeknisSumber Daya Air Program Bina Manfaat SumberDaya Air Program Pengelolaan Sumber DayaAir Program Pengelolaan DaerahAliran Sungai (DAS) Program Pengelolaan DAS Program Perencanaan Teknis
		Irigasi Program Bina Konstruksi IrigasiProgram Bina Operasi dan pemeliharaan Irigasi Program Pengelolaan JaringanIrigasi
9	KP : Penyediaan air bakuuntuk kawasan prioritas	Program Air Tanah Program pengembangan air baku
10	KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Program Air Tanah Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
11	KP : Peningkatan kualitaskonsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Konsumsi dan pengembangansumber daya manusia



No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
12	KP : Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Program ketersediaan dan distribusi pangan Program pelatihan peternakan dan ketahanan pangan  Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura Program pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura Program prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura Program Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan Program pelatihan Sumber Daya Manusia tanaman pangan dan hortikultura
13	KP : Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian  Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
14	KP : Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumberdaya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
15	KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	-
16	PP : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara  Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan  Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
17	KP : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Program Pengelolaan dan

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut
18	KP : Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
19	KP : Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  Program Peningkatan Mutu Produk Perikanan
20	KP : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut  Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut
21	KP : Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	-
22	KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Program Usaha Kecil
23	KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi  Program kelembagaan Koperasi Program Pemberdayaan Koperasi
24	KP : Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasi dan wirausaha  Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Mandiri Program Pelatihan Kerja Kompetensi Program Peningkatan Kesempatan Kerja
25	KP : Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Program Usaha Kecil  Program pendidikan dan pelatihan perkoperasi dan wirausaha
26	KP : Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Program Industri Pariwisata  Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan

27	KP : Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Program Industri Pariwisata
28	KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha
29	KP : Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
30	KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
31	KP : Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Program Pengembangan Ekspor
32	KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	-
33	KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	-
34	KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Program Destinasi Pariwisata
		Program Industri Pariwisata Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Program Pemasaran Pariwisata
35	KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program BUMD Lembaga Keuangan Program BUMD Non Lembaga Keuangan
36	KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Program digitalisasi pendidikan UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
37	KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	-
38	KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan Program Pemberdayaan Industri Logam Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Program Pembangunan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
39	KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Program Manajemen Data dan Informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah 2023

Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap dukungan Program Prioritas pada PN2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, disajikan pada tabel berikut. Dukungan Program Prioritas Daerah terhadapKegiatan Prioritas pada PN2.

Tabel 4.9  
Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap dukungan  
Program Prioritas pada PN2

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan danMenjamin Pemerataan		
1	KP: Pengembangan KawasanStrategis	Program Penataan Ruang
2	elembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan PertanggungjawabanKeuangan Daerah Program Peningkatan Kualitas PengelolaanKeuangan Daerah
3	KP : Pengembangan KawasanPerkotaan	Program Pembangunan Jalan dan JembatanWilayah Pelayanan III Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala danPemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah
4	KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan, dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Desa Program Pengembangan Potensi Desa

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10  
Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap  
Dukungan Program Prioritas pada PN3

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
1	KP: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	-
2	KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	-
3	KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Manajemen Data dan Informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4	PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program Perlindungan Perempuan dan Anak Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus  Program Perlindungan Masyarakat untuk ketahanan bencana
5	KP : Sistem jaminan sosial nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
7	KP : Kesejahteraan Sosial	Program peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan
		Prasarana Keolahragaan  Program Kesejahteraan Dan Disiplin
8	KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Program Pelayanan Kesehatan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
10	KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Sumber Daya  Kesehatan Program Manajemen  Kesehatan  Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit  Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan  Program Kesehatan Akibat Bencana dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi
11	KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pelayanan Kesehatan
12	KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
13	KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan
14	KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
15	KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
16	KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah 2023

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11  
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan Prioritas pada PN4

No	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
1	KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan
2	KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	Program Kesejahteraan Dan Disiplin
3	KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	-
4	KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
5	KP : Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6	KP : Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7	KP : Revitalisasi dan aktualisasinilai budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan keragaman budaya
8	KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan keragaman budaya
9	KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	-
10	KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Program Pengelolaan keragaman budaya

No	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
11	KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan  Program Pembinaan, Pemahaman danPengamalan Keagamaan
12	KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan, Pemahaman danPengamalan Keagamaan
13	KP : Penyelarasan Relasi Agama danBudaya	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan Program Pembinaan, Pemahaman danPengamalan Keagamaan
14	KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Program Pembinaan, Pemahaman danPengamalan Keagamaan
15	KP : Pengembangan Ekonomi danSumber Daya Keagamaan	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama danKemasyarakatan
16	KP : Peningkatan Budaya Literasi	Program Pengelolaan keragaman budaya
17	KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasadan aksara daerah, serta sastra	Program Pengembangan NilaiBudaya
18	KP : Pengembangan budaya Iptek,inovasi, kreativitas, dan daya cipta	-
19	KP : Penguatan institusi socialpenggerak literasi dan inovasi	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12  
Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan Prioritas pada PN5

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung PengembanganEknomi dan Pelayanan Dasar		
1	KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan
2	KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Air Tanah
3	KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Program Air Tanah Program pengembangan air baku
4	KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Program Pengembangan
		Sistem Jaringan Transportasi Massal Perkotaan Berbasis Rel dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian  Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP  Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan ASDP
5	KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	
6	KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Program Perencanaan Teknis Irigasi  Program Bina Konstruksi Irigasi  Program Bina Operasi dan pemeliharaan Irigasi  Program Pengelolaan Jaringan Irigasi
7	KP : Konektivitas Jalan	Program Pembangunan
		Jalan dan Jembatan Wilayah  Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkaladan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Program Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan  Program Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
8	KP : Konektivitas Kereta Api	
9	KP : Konektivitas Laut	-
10	KP : Konektivitas Udara	
11	KP : Konektivitas Darat	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
12	KP : Transportasi Perkotaan	
13	KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	-
14	KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan
15	KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
16	KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan
17	KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Program Ketenagalistrikan
18	KP : Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
19	KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Pengembangan Informasi Komunikasi Publik
20	KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	-

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan Prioritas pada PN6

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
1	KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Udara  Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3
2	KP : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Udara  Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3
3	KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Udara  Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3
4	KP : Penguatan Kelembagaan	-

No.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
5	KP : Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan penanggulangan bencana
6	KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
7	KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
8	KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	-
9	KP : Pengembangan Industri Hijau	-
10	KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	-

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN7 Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Tranformasi Pelayanan Publik, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan Prioritas pada PN7

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
PN 7 Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Tranformasi Pelayanan Publik		
1	KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	-
2	KP : Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3	KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Komunikasi Publik
4	KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas
6	KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
7	KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Program pelayanan Rehabilitasi sosial UPTDPanti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
8	KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN Non Provinsi
9	KP : Transformasi pelayanan publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik
10	KP : Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah
11	KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi  Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja
12	KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
13	KP : Penguatan Keamanan Laut	-
14	KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
15	KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	-

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Selain itu terdapat janji politik Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.15  
Keselarasan Antara Janji Politik dengan Implementasi Program  
Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No.	Janji Politik	Program	Perangkat Daerah
1	<b>SULTENG KERJA CEPAT</b> - Reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, inklusif dan meritokratis	-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;	Perangkat Daerah Provinsi
	- Menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	- Sinkronisasi kebijakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat dan swasta.	- Program Pemerintah dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	- Percepatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2	<b>SULTENG CERDAS</b> - SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin;	- Program Pengelolaan Pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Jaminan kesehatan gratis	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	- Percepatan Penurunan Stunting;	- Program Konvergensi OPD terkait	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pangan
	- Gratis Pelayanan Pendidikan	-Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

<b>3 SULTENG SEJAHTERA</b>			
	- Bantuan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial; 2. Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial;
		- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		- Program Pengelolaan SDA	Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Mineral
- Program Pengembangan Perumahan			
		1. Program Pelatihan Kerjadan Produktifitas Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		- Program Perencanaan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		- Program Penyelenggaraan Jalan	
		- Program Pengelolaan DAS	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
			Dinas Kehutanan
		- Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1. Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan & Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		2. - Program Pembinaan Perpustakaan	
		1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.	Dinas Perputakaan dan Kearsipan

		<div>2. Pengelolaan PerikananTangkap</div> <div>3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</div> <div>3. Program Pengelolaan &amp;Pemasaran Hasil perikanan</div>	Dinas Kelautan danPerikanan
		<div>1. Program Penyediaan &amp;Pengembangan SaranaPertanian</div> <div>2. Program Penyediaan &amp;Pengembangan Prasarana Pertanian</div> <div>4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan &amp; Kesehatan Masyarakat Veteriner</div> <div>4. Program Pengendalian &amp;Penanggulangan Bencana Pertanian.</div> <div>Program Penyuluhan Pertanian</div>	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		<div>1. Pengelolaan Pendidikan;</div> <div>2. Pengendalian PerizinanPendidikan;</div> <div>3. Pengembanga nkurikulum;</div> <div>4. Pendidik dan tenaga kependidikan;</div> <div>Pengelolaan Pendidikan</div>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		<div>1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomiuntuk Kedaulatan &amp; Kemandirian Pangan.</div> <div>2. Program Peningkatan Diversifikasi &amp; KetahananPangan Masyarakat.</div> <div>5. Program Penanganan Kerawanan Pangan</div>	Dinas Pangan
		<div>1. Program Peningkatan &amp;Daya Tarik Destinasi Pariwisata</div> <div>2. Program Pemasaran Pariwisata</div> <div>3. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata &amp;</div>	Dinas Pariwisata

		Ekonomi Kreatif	
		1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
	- Pelatihan dan Pembinaan bagi Wirausaha milenial;	1. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan & Pengembangan 3. Prasarana Pertanian 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perkebunan dan Peternakan  Dinas Koperasi dan UKM;
		2. - Program perencanaan dan pembangunan industri;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, Nelayan, Buruh dan Korban PHK	1. Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Budidaya 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
		4. - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan
		5. - Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Janji Politik	Program	Perangkat Daerah
	- Padat karya tunai bagimasyarakat miskin;	- Program Penyelenggaraan Jalan  - Program Pengelolaa nSumber Daya Air  - Program Pengembangan Perumahan	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;  Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Mineral;  Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman da nPertanahan
	- Penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal;	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	<b>SULTENG MAJU</b>  - Pembangunan infrastrukturstrategis - Pembiayaan infrastrukturyang kreatif dan inovatif;	- Program Penyelenggaraan Jalan  - Program PengelolaanSumber Daya Air - Program PengembanganPerumahan	Dinas Bina Marga dan Penataa n Ruang;  Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Mineral  Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman da nPertanahan



No.	Janji Politik	Program	Perangkat Daerah
		- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		- Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	- Desa terang dan terkoneksi internet	- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	<b>SULTENG TANGGUH</b>		
	- Kabupaten kota tangguh bencana;	- Program Pengelolaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	- Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas;	1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Mineral
	- Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah;	- Program Penyelenggara Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	- Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air	1. Program DAS 2. Program Hutan	Dinas Kehutanan

#### 4.4 Program Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Sulawesi Tengah tahun 2024 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2024. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut

##### 1) **Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah (Tangguh Bersinar)**

Stunting telah menjadi isu prioritas nasional termasuk Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi ancaman nyata terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Stunting menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun di Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 28,2 persen, tertinggi ketujuh se-indonesia dan berada diatas angka nasional yaitu 21,6 persen. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan pada angka 8 persen pada tahun 2026, yang berarti diperlukan upaya yang sangat keras untuk mewujudkan target tersebut.

Dalam lingkup wilayah yang lebih spesifik, Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Prevalensi stunting di Kabupaten Sigi pada tahun 2022 berada pada angka 36,8 persen, walaupun mengalami penurunan sebesar 3,9 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, prevalensi stunting Kabupaten Sigi ditargetkan menurun menjadi 23,86 persen pada tahun 2024. Dengan demikian terdapat gap sebesar 12,94 persen yang harus dicapai. Pada sisi lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sigi juga merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi tingginya prevalensi stunting di kabupaten tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, maka dirancang suatu program bernama Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah (Tangguh Bersinar) yang dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder.

Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Sigi.

Lingkup kegiatan pelaksanaan program meliputi:

- a. Intervensi spesifik yaitu intervensi yang menasar penyebab langsung

terjadinya *stunting* oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif yaitu intervensi yang menasar penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* yang pelaksanaannya sebagian besar ada di luar sektor Kesehatan. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif mencakup indikator layanan esensial sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

- b. Intervensi untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, akses pendidikan, akses sanitasi, akses air minum layak dan akses listrik.

## 2) Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu)

Dalam rangka percepatan penurunan daerah rawan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiasi membuat sebuah program kreatif yang dinamakan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu) Sulawesi Tengah. Pelaksanaan inovasi ini merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan serta pengawasan kepada kabupaten/kota selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Program ini ingin didesain sebagai role model (best practice) bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah dalam upaya bersama menurunkan persentase daerah rawan pangan lebih cepat dan efektif. Ide keterpaduan akan dibuat dalam bentuk perlakuan (intervensi) yang akan diberikan pada desa pilot project. Tingkat keberhasilan akan diukur terutama signifikansi pemanfaatan dana yang digunakan berbanding keberhasilan persentase daerah rawan pangan yang berhasil menuju daerah tahan pangan.

Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu) adalah inovasi pada sektor pangan yang diharapkan dapat memberikan kemajuan pada kemampuan distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau. Tetra dalam Bahasa Yunani berarti 4 (empat) karena pada inovasi memiliki 4 (empat) kebaruan (novelty) terpadu yaitu :

1. Konsep Terminal Pangan yang menjawab permasalahan tingginya harga pangan, rendahnya diversifikasi pangan dan meringkaskan tata niaga serta memotong rantai pasok tengkulak.
2. Konsep Transportasi Pangan yang menjawab permasalahan pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi pangan sesuai jumlah kalori perkapita, pemenuhan skor pola pangan harapan dan mempercepat akses pangan.
3. Konsep Keterpaduan Pangan yang menjawab permasalahan sektoral

penanganan pangan, keterpaduan tugas dan fungsi penyediaan, ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan & pengawasan pangan.

4. Konsep keterpaduan sasaran bahwa lokasi pilot project yang ditentukan adalah prioritas Rawan Pangan yang bersinggungan dengan daerah kemiskinan ekstrim, stunting, desa tertinggal dan lainnya Inovasi dibuat sebagai upaya intervensi terhadap permasalahan yang ditemui, dimana pada tahun 2022 daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah meningkat agak signifikan.

Lokasi yang menjadi sasaran Inovasi yaitu desa-desa yang berada di 3 (tiga) kabupaten yang memiliki kecamatan dan desa rawan pangan Prioritas I (sangat rentan) dan Prioritas II (rentan) berdasarkan FSVA, Desa yang ditentukan juga merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim tinggi atau presentase pada Desil 1 yang tinggi. Penentuan desa pilot project diusulkan oleh kabupaten dengan hasil analisis peta FSVA.

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memprioritaskan percepatan pascabencana dan program prioritas lainnya.

Perubahan RKPD memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dilaksanakan karena adanya asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena adanya asumsi makro yang berimbas kepada struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, disamping itu untuk menampung beberapa tambahan prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Dengan memperhatikan realisasi kinerja dan keuangan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, serta adanya kebijakan terkait dengan dana transfer Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan Tahun 2024, meliputi:

- a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2024 sebesar 4,867 triliun rupiah, pada APBD Tahun 2024 menjadi sebesar 5,150 triliun rupiah, dan

pada perubahan RKPD Tahun 2024 disesuaikan menjadi sebesar 5,921 triliun rupiah;

- b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 5,418 triliun rupiah, APBD Tahun 2024 menjadi sebesar 5,771 triliun rupiah, dan pada rencana perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar 6,212 triliun rupiah;
- c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 551 miliar rupiah, APBD Tahun 2024 sebesar 621 miliar rupiah, dan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar 290 miliar rupiah.







Proyeksi kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1  
Kerangka Pendanaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO		URAIAN	TARGET RKPD TA 2024	TARGET APBD TA 2024	PROYEKSI RKPD TA 2025 (BAPENDA)	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD TA 2024	%
1		2	4	3	4		
1.1		<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.988.452.858.664,55</b>	<b>2.059.942.177.139,00</b>	<b>2.017.463.660.424,53</b>	<b>2.192.661.212.139,00</b>	<b>132.719.035.000,00</b>
1.1.1		Pajak Daerah	1.430.000.000.000,00	Rp 1.450.000.000.000,00	1.671.540.000.000,00	Rp 1.609.000.000.000,00	159.000.000.000,00
		PKB		Rp 337.000.000.000,00		Rp 340.000.000.000,00	3.000.000.000,00
		BBNKB		Rp 395.000.000.000,00		Rp 395.000.000.000,00	-
		PBBKB		Rp 395.000.000.000,00		Rp 550.000.000.000,00	155.000.000.000,00
		PAP		Rp 73.000.000.000,00		Rp 74.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		PAJAK ROKOK		Rp 250.000.000.000,00		Rp 250.000.000.000,00	-
1.1.2		Retribusi Daerah	25.780.965.000,00	Rp 25.780.965.000,00	16.500.000.000,00	Rp 17.500.000.000,00	8.280.965.000,00
1.1.3		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	230.100.000.000,00	Rp 230.100.000.000,00	50.100.000.000,00	212.100.000.000,00	- 18.000.000.000,00
1.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	302.571.893.664,55	Rp 354.061.212.139,00	279.323.660.424,53	354.061.212.139,00	-
1.2		<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.875.175.785.000,00</b>	<b>Rp 3.087.538.737.000,00</b>	<b>2.910.175.785.000,00</b>	<b>Rp 3.724.838.737.000,00</b>	<b>Rp 637.300.000.000,00</b>
1.2.1		Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.875.175.785.000,00	3.087.538.737.000,00	2.910.175.785.000,00	3.724.838.737.000,00	<b>637.300.000.000,00</b>
		Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	515.000.000.000,00	Rp 699.700.000.000,00	Rp 550.000.000.000,00	Rp 1.337.000.000.000,00	637.300.000.000,00
		Dana Alokasi Umum	1.547.264.182.000,00	Rp 1.638.594.346.000,00	Rp 1.547.264.182.000,00	Rp 1.638.594.346.000,00	-

		Dana Alokasi Khusus	812.911.603.000,00	Rp 749.244.391.000,00	Rp 812.911.603.000,00	Rp 749.244.391.000,00	-
		Dana Insentif Daerah					
1.3		<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>3.974.291.500,00</b>	<b>2.577.756.500,00</b>	<b>3.974.291.500,00</b>	<b>3.974.291.500,00</b>	1.396.535.000,00
1.3.1		Pendapatan Hibah	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	3.974.291.500,00	3.974.291.500,00	
1.3.3		Pendapatan Lainnya		-		-	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.867.602.935.164,55</b>	<b>5.150.058.670.639,00</b>	<b>4.931.613.736.924,53</b>	<b>5.921.474.240.639,00</b>	771.415.570.000,00
a		<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp 3.741.702.039.138,14</b>	<b>Rp 4.026.575.510.640,00</b>	<b>Rp 4.696.013.736.924,53</b>	<b>Rp 4.368.127.832.874,33</b>	341.552.322.234,33
	1	Belanja Pegawai	Rp 1.856.272.837.457,43	Rp 2.076.590.534.363,00	Rp 1.891.811.979.593,20	Rp 2.062.223.993.465,00	14.366.540.898,00
	2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.392.779.878.514,71	Rp 1.660.632.723.644,00	<b>Rp 2.804.201.757.331,33</b>	Rp 2.018.722.433.699,33	358.089.710.055,33
	4	Belanja Hibah	Rp 384.150.441.256,00	Rp 272.349.803.003,00		Rp 269.978.956.080,00	2.370.846.923,00
	5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 108.498.881.910,00	Rp 17.002.449.630,00		Rp 17.202.449.630,00	200.000.000,00
b		<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 941.694.724.382,00</b>	<b>Rp 1.007.276.988.358,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.005.156.313.772,00</b>	- 2.120.674.586,00
							-
c		<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 10.000.000.000,00</b>	<b>Rp 2.194.600.300,00</b>	- 7.805.399.700,00
		Belanja Tidak Terduga	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 2.194.600.300,00	- 7.805.399.700,00
d		<b>Belanja Transfer</b>	<b>Rp 725.240.827.193,00</b>	<b>Rp 727.240.827.190,00</b>	<b>Rp 825.600.000.000,00</b>	<b>Rp 836.940.827.190,00</b>	109.700.000.000,00
	1)	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	Rp 706.140.827.193,00	Rp 708.140.827.190,00	Rp 806.500.000.000,00	Rp 817.840.827.190,00	109.700.000.000,00
	2)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Rp 19.100.000.000,00	Rp 19.100.000.000,00	Rp 19.100.000.000,00	Rp 19.100.000.000,00	-
		<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>Rp 5.418.637.590.713,14</b>	<b>Rp 5.771.093.326.188,00</b>	<b>Rp 5.531.613.736.924,53</b>	<b>Rp 6.212.419.574.136,33</b>	<b>Rp 441.326.247.948,33</b>
		<b>Surplus Defisit</b>					

3.1		Penerimaan pembiayaan					
3.1.1		Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	Rp 551.034.655.548,59	Rp 621.034.655.549,00	Rp 600.000.000.000,00	Rp 290.945.333.497,33	- 330.089.322.051,67
		<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp 551.034.655.548,59</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 600.000.000.000,00</b>	<b>Rp 290.945.333.497,33</b>	- 330.089.322.051,67
3.2		Pengeluaran pembiayaan					-
		<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					-
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp 551.034.655.548,59</b>	<b>Rp 621.034.655.549,00</b>	<b>Rp 600.000.000.000,00</b>	<b>Rp 290.945.333.497,33</b>	- 330.089.322.051,67
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

5.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Program prioritas pembanugnan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dijabarkan dalam 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 14 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 unsur penunjang pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Tabel 5.2  
Urusan Pendidikan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.322.343.081.742,00	
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.319.665.879.444,00	1.322.343.081.742
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	648.999.730,00	
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	424.452.900,00	
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	417.059.850,00	
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	379.268.850,00	
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	379.114.545,00	
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	428.306.423,00	

2. Kesehatan

Tabel 5.3  
Urusan Kesehatan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	545.252.640.991,00	550.757.518.991
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	230.640.182.029,00	
RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	196.949.904.068,00	
RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah	113.576.800.000,00	
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	607.029.749,00	
UPT Laboratorium Kesehatan	2.900.600.000,00	
UPT Badan Pelatihan Kesehatan	578.125.145,00	

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.4  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	425.940.488.062,00	
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	422.995.634.831,00	490.862.318.949
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Provinsi Sulawesi Tengah	2.944.853.231,00	
Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	529.875.149.662,00	605.775.149.662
Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	463.527.723.301,00	
UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.483.140.032,00	
UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I	16.922.212.488,00	
UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II	46.942.073.841,00	

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 5.5  
Perumahan dan Kawasan Permukiman

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	103.528.040.931,00	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	103.528.040.931,00	113.784.835.492

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 5.6  
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	16.629.262.654,00	
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	16.629.262.654,00	16.629.262.654

6. Sosial

Tabel 5.7  
Urusan Sosial

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	75.235.520.888,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	75.235.520.888,00	75.235.520.888
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	42.507.601.693,00	

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	40.371.925.636,00	42.507.601.693
UPT Panti Sosial Anak	500.000.000,00	
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	339.301.966,00	
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.296.374.091,00	

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tabel 5.8  
Tenaga Kerja

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	53.048.404.122,00	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	50.469.782.668,00	53.048.404.122
UPT.BLK-PP	1.167.800.180,00	
UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	651.287.424,00	
UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	759.533.850,00	

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 5.9  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	18.305.793.902,00	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	17.633.323.902,00	19.805.793.902
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	672.470.000,00	

3. Pangan

Tabel 5.10  
Pangan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	35.435.708.101,00	
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	33.063.666.448,00	35.435.708.101
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	2.372.041.653,00	

4. Lingkungan Hidup

Tabel 5.11  
Lingkungan Hidup

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	14.328.499.286,00	
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	13.639.699.180,00	14.478.499.286
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	688.800.106,00	

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 5.12  
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	12.474.810.645,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	12.474.810.645,00	12.474.810.645

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 5.13  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	25.531.165.961,00	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	25.531.165.961,00	26.821.165.961

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 5.14  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	12.707.305.627,00	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	12.707.305.627,00	13.907.305.627

8. Perhubungan

Tabel 5.15  
Perhubungan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	45.171.845.176,00	
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	44.292.755.716,00	45.171.845.176
UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A	879.089.460,00	

9. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 5.16  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	26.156.082.930,00	
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	26.156.082.930,00	28.319.082.930

10. Koperasi dan UKM

Tabel 5.17  
Koperasi dan UKM

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	20.520.091.120,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	15.783.653.604,00	20.520.091.120
UPT Balai Pelatihan	4.736.437.516,00	

11. Penanaman Modal

Tabel 5.18  
Penanaman Modal

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	18.094.996.968,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	18.094.996.968,00	18.094.996.968



12. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.19  
Kepemudaan dan Olahraga

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	42.163.319.045,00	
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	42.163.319.045,00	72.280.942.045

13. Kebudayaan

Tabel 5.20  
Urusan Kebudayaan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19.629.172.907,00	
Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	16.205.172.985,00	19.629.172.907
UPT. Taman Budaya dan Permuseuman	3.423.999.922,00	

14. Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 5.21  
Perpustakaan dan Kearsipan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	27.161.626.349,00	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	27.161.626.349,00	27.161.626.349

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.22  
Kelautan dan Perikanan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	76.614.880.328,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	63.706.686.479,00	76.614.880.328
UPT. Balai Perbenihan Perikanan	3.391.433.442,00	
UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.297.171.308,00	
UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah I	2.792.000.000,00	
UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah II	1.283.640.544,00	
UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah III	1.627.000.000,00	
UPT. Pelabuhan Perikanan Wilayah IV	1.116.963.025,00	

UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini	350.000.000,00	
UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto	350.000.000,00	
UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai	350.025.530,00	
UPT. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali	349.960.000,00	

2. Pariwisata

Tabel 5.23  
Urusan Pariwisata

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	17.982.111.516,00	
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	17.982.111.516,00	18.982.111.516

3. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 5.24  
Tanaman Pangan dan Hortikultura

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	153.570.324.483,00	
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	144.829.056.357,00	153.570.324.483
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.274.660.427,00	
UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.426.602.252,00	
UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.669.904.789,00	
UPT Pendidikan dan Pelatihan	1.370.100.658,00	

4. Perkebunan dan Peternakan

Tabel 5.25  
Perkebunan dan Peternakan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	96.559.793.750,00	
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	90.108.918.135,00	103.940.121.250
UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan	1.390.955.500,00	
UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	986.151.006,00	
UPT Pembibitan Ternak	1.581.440.972,00	
UPT Veteriner	1.461.456.475,00	

UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.030.871.662,00	
---	------------------	--

5. Kehutanan

Tabel 5.26  
Urusan Kehutanan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	81.210.161.712,00	81.210.161.712
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	62.544.133.914,00	
UPTD Tahura	1.528.778.800,00	
UPT KPH Dampelas Tinombo	3.146.479.750,00	
UPT KPH Dolago Tanggunung	871.909.300,00	
UPT KPH Toili Baturube	820.000.000,00	
UPT KPH Banawa Lalundu	2.449.250.000,00	
UPT KPH Kulawi	1.091.044.000,00	
UPT KPH Sintuwu Maroso	1.772.479.700,00	
UPT KPH Sivia Patuju	1.623.683.700,00	
UPT KPH Balantak	932.872.400,00	
UPT KPH Pulau Peling	950.525.750,00	
UPT KPH Tepo Asa Aroa	788.000.000,00	
UPT KPH Tepe Asa Maroso	864.723.950,00	
UPT KPH Gunung Dako	761.482.140,00	
UPT KPH Pogogul	1.064.798.308,00	

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 5.27  
Energi dan Sumber Daya Mineral

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	24.747.135.158,00	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	22.450.386.253,00	24.747.135.158
UPT Pelayanan Teknis Laboraturium	299.999.930,00	
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	394.349.705,00	
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	394.349.825,00	
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya		

Mineral Wilayah III	419.349.954,00	
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	394.349.666,00	
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V	394.349.825,00	

7. Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 5.28  
Perindustrian dan Perdagangan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	30.273.847.292,00	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	22.873.442.843,00	30.273.847.292
UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	3.796.927.249,00	
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	2.001.014.070,00	
UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	1.602.463.130,00	

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 5.29  
Sekretariat Daerah

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	174.394.246.943,00	179.392.746.943
Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	76.020.287.393,00	
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4.415.000.000,00	
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3.519.199.931,00	
Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4.600.000.000,00	
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	2.770.559.860,00	
Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	45.308.399.700,00	
Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4.500.000.000,00	
Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	3.549.999.355,00	
Biro Admnistrasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	8.199.999.947,00	
KDH	9.411.033.264,00	
WKDH	4.100.000.000,00	
TU Pimpinan	7.999.767.493,00	

2. Sekretariat DPRD

Tabel 5.30  
Sekretariat DPRD

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	159.237.267.093,00	
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	159.237.267.093,00	252.237.267.093

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 5.31  
Urusan Perencanaan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	47.055.134.278,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	47.055.134.278,00	51.255.134.278

2. Keuangan

Tabel 5.32  
Urusan Keuangan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	103.412.814.268,00	
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	87.123.151.447,00	113.412.814.268
UPT Wil. I Palu	3.482.351.254,00	
UPT Wil. II Parigi Moutong	1.517.211.162,00	
UPT Wil. III Poso	1.170.639.651,00	
UPT Wil. IV Morowali	1.388.951.767,00	
UPT Wil. V Banggai	1.503.523.303,00	
UPT Wil. VI Banggai Kepulauan	1.347.727.101,00	
UPT Wil. VII Toli-Toli	1.263.531.535,00	
UPT Wil. VIII Buol	773.332.897,00	
UPT Wil. IX Tojo Una-Una	1.170.275.024,00	
UPT Wil. X Donggala	1.144.635.623,00	
UPT Wil. XI Sigi	1.527.483.504,00	

<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>1.142.578.188.695,00</b>	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.142.578.188.695,00	1.252.278.188.695

3. Kepegawaian

Tabel 5.33  
Urusan Kepegawaian

<b>NAMA SKPD</b>	<b>PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>20.496.552.355,00</b>	
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19.634.766.605,00	21.444.952.355
UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	861.785.750,00	

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.34  
Urusan Pendidikan dan Pelatihan

<b>NAMA SKPD</b>	<b>PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>28.238.408.314,00</b>	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28.238.408.314,00	28.238.408.314

5. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 5.35  
Urusan Penelitian dan Pengembangan

<b>NAMA SKPD</b>	<b>PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>16.613.700.478,00</b>	
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	16.613.700.478,00	17.813.700.478

6. Pengelolaan Penghubung

Tabel 5.36  
Pengelolaan Penghubung

<b>NAMA SKPD</b>	<b>PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>16.280.414.171,00</b>	
Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	16.280.414.171,00	16.280.414.171

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tabel 5.37  
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	37.997.197.048,00	
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	37.997.197.048,00	37.997.197.048

G. Unsur Pemerintahan Umum

Tabel 5.38  
Unsur Pemerintahan Umum

NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN PERGESERAN FINAL	TOTAL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	111.790.539.544,00	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	111.790.539.544,00	127.685.433.544

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai amanat regulasi tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui <http://sipd.go.id>.

Mengenai rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Buku II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

## BAB VI

### P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yang memuat visi misi, kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang



dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

2. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing Perangkat daerah perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempedomani Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (a) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (b) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta; (c) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024; dan
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala.

Demikian Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007